

MANAJEMEN PENGEMBANGAN SDM KEPENDIDIKAN BERMUTU DI PERGURUAN TINGGI

Nur Ali Rahman

Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Abstract

The evolving culture of our contemporary society continues to have an ongoing and profound effect on the practice of educational human resources management in university, because a good society can be performed through a good performance of individual. Human resources whose a good performance can be educated in an excellence university. In realities, the excellence universities are changed by the good human resources including an educational staffs, practicing central-office administrators and building principals who want to become more familiar with the field of human resources management.

This article tries to discuss about management of quality educational human resources development in university.

Keywords: human resources, management, quality educational

A. Pendahuluan

Kompleksitas permasalahan yang muncul di permukaan dan lahirnya masyarakat "sizofrenia"—yaitu masyarakat dengan kepribadian terbelah antara keyakinan dan pengamalannya yang tidak merasa bersalah jika dia telah membuat sesuatu yang salah (Tilar, HAR., 1999, hal. 95)—bersumber pada lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga dan lingkungan perguruan tinggi atau sekolah. Karena itu di dalam ketiga lingkungan tersebut perlu ada "suri tauladan" bagi lingkungannya. Masyarakat yang baik hanya dapat dibentuk dengan menampilkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan karakter yang baik. Sumber daya manusia yang berkarakter baik dapat dibentuk melalui pendidikan yang baik. Dengan demikian, mutu masyarakat banyak dipengaruhi oleh mutu pendidikan tinggi, sedangkan mutu pendidikan tinggi banyak dipengaruhi oleh mutu SDM kependi-

dikannya. Rendahnya mutu pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan sebenarnya merupakan refleksi dari rendahnya mutu SDM kependidikan di perguruan tinggi.

B. Manajemen Pengembangan SDM Kependidikan Bermutu di Perguruan Tinggi

Mutu pendidikan merupakan masalah mikro pendidikan, sehingga ia tidak bisa diselesaikan secara makro. Mutu pendidikan sangat terkait dengan persoalan mutu sumber daya manusia (SDM) kependidikan yang di antaranya; kemampuan dosen, kemampuan pimpinan, kemampuan tenaga administrasi, kesiapan perguruan tinggi dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan, dan masyarakat pendukung pendidikan yang ada di wilayahnya. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan tinggi terkait dengan manajemen pengembangan SDM kependidikan di perguruan tinggi. Manajemen pengembangan SDM kependidikan di perguruan tinggi baru dapat dilakukan jika didukung ketersediaan data mengenai SDM tenaga kependidikan baik secara lokal maupun nasional. Untuk itu, langkah yang perlu segera dilakukan adalah memetakan situasi SDM kependidikan secara lokal, yang didukung ketersediaan data terbaru secara lengkap.

Hasil pemetaan situasi SDM kependidikan tersebut akan mengklasifikasikan SDM kependidikan di perguruan tinggi tertentu berdasarkan kategorisasi-kategorisasi tertentu. Menurut Nur Ali (2004) ada empat kategori perguruan tinggi (PT). Pertama, PT dengan kategori *pra-formal*, yaitu PT yang sebenarnya tidak layak dianggap sebagai sebuah perguruan tinggi, sebab belum didukung ketersediaan sarana belajar, termasuk dosen yang memadai. Kedua, PT *formal* yaitu PT yang sudah memiliki sarana dan Dosen yang cukup, namun proses belajar masih berjalan sekedarnya saja. Ketiga, PT *transisional*, yaitu PT yang sudah memiliki fasilitas lebih dibandingkan PT formal, bahkan mutu pendidikan yang diselenggarakan sudah baik, hanya belum memiliki kemandirian. Keempat, PT *otonom*, yaitu PT yang kondisi kampusnya yang diharapkan sudah terwujud sehingga sudah mampu mengelola pendidikan dan menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi.

Di dalam keempat kategori perguruan tinggi tersebut, mutu SDM kependidikannya antara yang satu dengan lainnya berbeda-beda, oleh karena itu perlakuan pembinaan dan pengembangan SDM yang diberikan perlu dibedakan sesuai dengan kategori PT tersebut. Untuk itu, pengembangan SDM kependidikan di PT perlu mendasarkan pada peta kategorisasi SDM nya. Ada tiga kelompok perguruan tinggi yang diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri SDM kependidikannya yaitu; (a) kelompok mapan, (b) kelompok transisi, dan (c) kelompok terbelakang (Rebore, 1984; Cooper, dkk, 2004).

Adapun aspek-aspek yang perlu dianalisis dalam manajemen pengembangan sumber daya manusia kependidikan di perguruan tinggi yang memiliki pengaruh cukup signifikan pada mutu layanan dan lulusannya di antaranya adalah; (a) aspek penyediaan dan pemanfaatan SDM kependidikan, (b) aspek perekrutan dan proses seleksi, (c) aspek penilaian prestasi kerja, dan (d) aspek metode penilaian prestasi kerja. (Rebore, 2004).

1. Aspek Penyediaan dan Pemanfaatan SDM Kependidikan:

Penyediaan dan pemanfaatan SDM kependidikan di perguruan tinggi secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok dengan ciri-ciri sebagai berikut:

KELOMPOK	CIRI-CIRI
1. Kelompok Mapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SDM yang cukup b. Perekrutan SDM dilakukan secara obyektif dan berdasarkan analisis kebutuhan yang obyektif pula c. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas khususnya antara tugas edukasional dan administrasi d. Jalur karir yang jelas dan terencana e. Penilaian prestasi kerja dan imbalan yang jelas dan obyektif f. Kesempatan pengembangan yang terbuka
2. Kelompok Transisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SDM yang cukup b. Perekrutan SDM dilakukan secara obyektif tapi masih berdasarkan analisis kebutuhan yang belum obyektif c. Pembagian tugas dan wewenang (edukasional dan administrasi) cukup jelas pada tingkat tertentu d. Jalur karir yang cukup jelas tapi belum terencana. e. Penilaian prestasi kerja dan imbalan yang jelas tapi belum obyektif f. Kesempatan pengembangan terbuka pada tingkat tertentu
3. Kelompok Terbelakang	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SDM yang kurang b. Pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas, jabatan/tugas edukasional dirangkap dengan jabatan/tugas administrasi. Bahkan kewenangan mengajar tidak jelas batas-batasannya c. Jalur karir yang tidak jelas dan tidak direncanakan d. Penilaian prestasi kerja dan imbalan tidak jelas dan subyektif e. Belum dikembangkan program pengembangan SDM

2. Aspek Perekrutan dan Proses Seleksi

Sumber kandidat dalam perekrutan dapat diperoleh dari dalam dan dari luar perguruan tinggi. Kedua sumber ini masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan antara lain sebagai berikut:

Sumber Kandidat;

Keunggulan/ Kekurangan	Dari dalam Perguruan tinggi	Dari Luar Perguruan tinggi
Keunggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murah, mudah dan cepat 2. Memperkecil arus keluar masuk pegawai 3. Mengurangi resiko pengangkatan pegawai yang mempunyai komitmen yang rendah terhadap organisasi 4. Dapat meningkatkan moral pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kandidat meluas, sehingga besar peluang memperoleh tenaga unggul 2. Tingkat produktivitas meningkat lebih cepat karena suasana baru, tukar pengalaman dan suasana kerja yang bersaing 3. Memperluas hubungan dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi semakin tinggi
Kekurangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kandidat terbatas, sehingga kecil peluang memperoleh bibit unggul. 2. Dapat menimbulkan imbreeding pada produktivitas. 3. Dapat menimbulkan diskriminasi pegawai akibat perbedaan kemampuan yang mencolok sehingga menimbulkan keresahan sosial dikalangan pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahal, kompleks dan memakan waktu lama. 2. Pegawai lama yang mempunyai komitmen tinggi mudah tergeser, sehingga memungkinkan arah tujuan PT menyimpang. 3. Memerlukan program orientasi

3. Aspek Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja adalah proses penilaian prestasi kerja tenaga kependidikan (karyawan) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang prestasi kerja dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja pada waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja tidak hanya bermanfaat bagi manajemen tetapi juga kepada karyawan itu sendiri, antara lain:

1. Mendorong perbaikan prestasi kerja karyawan. Para karyawan berusaha untuk mendapat penilaian yang baik dan hasilnya memberikan umpan balik kepada karyawan dan manajemen untuk melakukan pembetulan dan perbaikan prestasi.
2. Dasar penyesuaian kompensasi. Penilaian prestasi kerja membantu manajemen dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan atau imbalan lain yang berdasarkan *merit system*.
3. Dasar penempatan. Hasil penilaian prestasi kerja sangat membantu dalam melakukan promosi, transfer dan demosi.
4. Kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Prestasi kerja yang rendah mungkin menunjukkan kebutuhan akan pelatihan. Sebaliknya, prestasi yang tinggi mungkin menunjukkan prestasi yang perlu dikembangkan.
5. Perencanaan dan pengembangan karir.
6. Dasar untuk melakukan perbaikan proses stafing, informasi manajemen sumber daya manusia dan desain pekerjaan.
7. Perbaikan kesempatan kerja yang adil.
8. Bahan untuk mengevaluasi pengaruh faktor-faktor eksternal.

4. Aspek Metode Penilaian Prestasi Kerja

Secara umum penilaian prestasi kerja dapat dikelompokkan atas dua kelompok yaitu metode-metode penilaian berorientasi masa lalu dan berorientasi masa depan. Antara lain:

a. Metode penilaian berorientasi masa lalu

Metode ini menggunakan prinsip penilaian prestasi kerja yang dialami karyawan pada masa lalu.

Keunggulannya adalah obyek yang akan dinilai jelas dan mudah diukur karena peristiwanya telah terjadi.

Kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan potensi pengembangan prestasi masa mendatang dan sepanjang kehidupan kerja karyawan harus direkam dengan baik. Metode tersebut antara

lain : *rating scale, checklist, critical incident method, field review method*, atau dengan melakukan ujian obyektif dan observasi langsung.

b. Metode penilaian berorientasi masa depan

Metode ini memusatkan perhatian pada penilaian prestasi melalui penilaian-penilaian prestasi karyawan untuk berkembang dan berprestasi pada waktu mendatang. Keunggulannya adalah memberi motivasi dalam pengembangan diri dan menguntungkan organisasi pada masa mendatang. Kelemahannya adalah harus ditetapkan ukuran dan kriteria yang jelas dan obyektif karena yang akan dinilai tidak konkrit dan belum terjadi.

Beberapa metode/teknik yang biasa digunakan dalam penilaian berorientasi masa depan adalah:

a. *Self appraisals* (Penilaian diri sendiri)

Teknik ini bermanfaat bila tujuan evaluasi adalah untuk melanjutkan pengembangan diri. Bila karyawan menilai dirinya sendiri maka penilaian defensi cenderung tidak terjadi sehingga upaya perbaikan diri cenderung dilaksanakan.

b. *Psychological appraisals* (Penilaian psikologis)

Penilaian ini bisanya dilakukan atas bantuan para psikolog untuk menilai potensi karyawan pada masa mendatang yang berkaitan dengan intelektual, emosi, motivasi, dan kepribadian.

c. Pendekatan *management by objectives* (MBO)

Manajemen by objective ini pertama kali dipopulerkan sebagai pendekatan oleh Peter Drucker (1954). Dalam pendekatan ini tenaga kependidikan dan atasan bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran pelaksanaan kerja masa akan datang lalu berdasarkan itu dilakukan penilaian prestasi kerja secara bersama-sama pula. Salah satu formula yang dapat digunakan untuk menentukan prestasi kerja yaitu:

$$P = f (M \times K)$$

Keterangan: P = prestasi kerja

M = motivasi

K = kemampuan

Fatah, N. (2001, hal. 16).

d. **Manajemen berbasis orang.**

Manajemen ini merupakan suatu konsep manajemen modern yang mengkaji keterkaitan dimensi perilaku, komponen sistem dalam kaitannya dengan perubahan dan pengembangan SDM dan organisasi. Menurut model manajemen ini, pimpinan perguruan tinggi yang pada umumnya bekerja pada lingkungan yang menuntut untuk berubah sebagai akibat dari bertambahnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan anaknya, perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Salah satu upaya yang paling penting adalah melalui pengembangan sumber daya manusia kependidikannya.

e. **Pendekatan melalui pusat penilaian.**

Di sini manajemen mempunyai pusat-pusat penilaian yang melakukan penilaian prestasi kerja karyawan berdasarkan kriteria dan ukuran yang telah dibakukan.

C. Penutup

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya manajemen pengembangan sumber daya manusia kependidikan di perguruan tinggi perlu dilakukan terlebih dahulu pemetaan SDM kependidikannya agar pembinaan dan pengembangan yang akan diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi perguruan tinggi dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Bruce S. Dkk. 2004. *Better Policies, Better Schools; Theories and Applications*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Fatah, N. 2001. *Landasan Manajemen Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Hough, 1984. *Educational Policy; An International Survey*. Sidney: Croom Helm. Ltd.
- Kompas, 2002. *Perbaikan Mutu Pendidikan Harus Terkait Upaya Pemberdayaan Sekolah*. *Kompas*, 18 Desember 2002, hal. 9.
- Nur Ali, 2004. *Orientasi Pengembangan Fakultas Kependidikan, Malang: Makalah Diskusi LPM UIN Malang*, tanggal 2 Juni 2004.
- Rebore, R. 2004. *Human Resources Administration in Education; A management Approach*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Tilar, HAR., 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Indonesia Tera.

ANALISIS PASAL 284 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ZINA

M. Aunul Hakim

Dosen Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Abstract

Indonesia is a state that had a Criminal Code named by KUHP. The regulation draft about adultery specially mentioned at paragraph 284. According to this paragraph, the definition of adultery is sexual intercourse conducted by a man/woman who has valid marriage with another woman/man who is not his/her wife/husband and it is conducted based on the wish of each of them. In Criminal Code, it is stated that such deed may be imposed as a crime if there is a plea from the wife/husband who is harmed. Adultery crime is called as offense that warrants complaint, and punishment is 9 months. It's different with the meaning of adultery according to Islamic Law which has meaning a sexual intercourse conducted by a man and woman who are not a valid pair of marriage.

Keywords: adultery, plea, punishment

A. Pendahuluan

Praktek perzinaan sudah dikenal sejak dahulu sampai saat ini di negara manapun di dunia ini. Aturan-aturan yang melarang atau yang mencegah adanya praktek perzinaan telah dibuat oleh negara, agama ataupun adat, namun fenomena perzinaan masih tetap menggejala dan selalu meningkat.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bersifat kekeluargaan, kolektif. Dalam masyarakat demikian, zina bukanlah suatu perbuatan yang semata-mata bersifat pribadi, melainkan terkait juga dengan kepentingan keluarga, lingkungan dan masyarakat. Bertolak belakang dengan pandangan tersebut adalah pandangan masyarakat barat pada umumnya dan masyarakat Eropa dan Belanda khususnya sebagai negara penjajah yang mana secara tidak langsung memiliki peran besar dalam memproduksi Hukum Pidana di Indonesia. Masyarakat barat bersifat

individualistik-liberalistik, hubungan seks dipandang sebagai hal yang sangat pribadi dan dapat dilakukan dengan apa saja, sepanjang hubungan seks itu dilakukan tanpa adanya paksaan. Dengan demikian merupakan suatu hal yang wajar apabila perbuatan zina tertentu, yang dilakukan oleh mereka yang terikat dalam perkawinan (*adultery*), ditetapkan sebagai tindak pidana aduan.

Menurut hukum adat dari sebagian besar daerah Indonesia, persekutuban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar nikah, adalah dianggap sebagai suatu perbuatan yang hina, tidak membedakan apakah si pelaku itu sedang punya isteri/suami, ataupun tidak punya isteri/suami. Anak yang dilahirkan akibat persekutuban itu disebut "anak haram/jadah". Ini dapat dipahami, karena masyarakat Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius. Walaupun negara Indonesia bukan negara agama, negara Indonesia tetap sangat memperhatikan dan selalu berusaha memelihara kehidupan beragama. Di Indonesia terdapat jalinan yang cukup kuat antara negara dan agama. Dengan demikian nilai-nilai agama sangat berpengaruh terhadap perumusan tindak pidana kesusilaan. Dalam hal ini Oemar Seno Aji mengemukakan pandangannya sebagai berikut, dalam menggariskan politik hukum pidana nasional khususnya dalam bidang kesusilaan kita lihat unsur agama untuk mengisi dan mengarahkan delik-delik susila sesuai dengan keinginan kita untuk memancarkan Pancasila dalam segala bidang hukum, termasuk hukum pidana, unsur agama memegang peranan pengisian, jika tidak dikatakan faktor yang memastikan dalam mencari kualifikasi apakah suatu delik itu bersifat susila atau tidak.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, mereka memandang zina adalah salah satu dari perbuatan yang melanggar norma-norma agama maupun norma adat, dan negara juga telah mengatur kehidupan rakyatnya dengan berbagai macam undang-undang dan peraturan-peraturan demi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakatnya khususnya untuk memberantas praktek perzinahan, maka produk hukum pidana di Indonesia dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat dengan KUHP.

Sebagaimana diketahui KUHP itu merupakan produk hukum kolonial Belanda yang banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran modern sekuler. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang, telah mengatur tentang hukum perzinaan dalam Pasal 284, sedangkan empat pasal berikutnya mengatur tentang hukum persetubuhan yang disertai dengan unsur-unsur lain, sehingga dalam hal ini akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia tentang tindak pidana zina menurut pasal tersebut.

B. Zina dan dampaknya

Hubungan seksual pada dasarnya memang kegiatan pribadi, namun istilah “*perzinaan*” muncul sebagai pencerminan adanya ketidakwajaran dalam aktivitas pribadi. Guna mengukur wajar tidaknya aktivitas seksual, seperangkat nilai yang ada pada relasi seksual dapat dijadikan sebagai parameter, yang antara lain terdiri dari:

1. *Nilai prokreasi*, bahwa hubungan seksual ditujukan untuk menghasilkan keturunan.
2. *Nilai rekreasi*, yakni kontak seksual merupakan kegiatan memperoleh kesenangan.
3. *Nilai keintiman*, mengandung makna bahwa *intercourse* (hubungan seksual) tidak hanya melibatkan unsur badaniah, melainkan mencakup pula unsur batiniah.
4. *Nilai legitimasi*, bahwa hubungan seksual merupakan bentuk penegasan terhadap keabsahan ikatan perkawinan.
5. *Nilai ibadah*, yaitu sebagai *manifestasi* pelaksanaan perintah Tuhan tentang pentingnya kasih dan pemeliharaan antara suami dan isteri. (Reza, 1998, 2-3)

Berdasarkan kelima nilai di atas, perzinaan ternyata hanya memenuhi nilai kedua, dan sama sekali tidak mengikutsertakan nilai-nilai lainnya. Kedangkalan seksualitas yang dipraktikkan dengan berpegang hanya pada

nilai rekreasi ini, dalam pandangan penulis, merefleksikan sebuah gaya hidup *hedonistis* (anggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan hidup adalah tujuan paling utama). Membandingkannya dengan tingkah laku seksual binatang, perzinaan nyata-nyata menunjukkan realitas yang tragis. Alasannya, pada binatang, kontak seksual merupakan sebuah aktivitas dengan orientasi jangka panjang. Sedangkan pada perzinaan, pilihan untuk melakukan intercourse di luar ikatan pernikahan merupakan indikasi bahwa para pelakunya menghindari adanya konsekuensi *fisik, psikis, dan sosial*

Aib yang ditanggung keluarga para pezina (*kerugian sosial*), penyakit kelamin akibat sering berganti pasangan dan anak yang lahir maupun digugurkan sebagai akibat perzinaan (*kerugian fisik*), serta perasaan bersalah dan menyesal (*kerugian psikologis*), tidak sewajarnya dinafikan begitu saja. Meskipun "*hanya*" melibatkan pelaku dan keluarga terdekat, ketiga kerugian tersebut merupakan risiko *paripurna* yang, celakanya, berdampak lebih besar terhadap kaum hawa.

Umumnya agama mengajarkan, bahwa bahwa hubungan sex di luar perkawinan adalah suatu moral yang salah. Bagi seseorang yang beragama dan mengerti akan ajarannya bilamana bertindak melawannya maka ia akan senantiasa merasa bersalah dan menyebabkan ia tersisih dari suatu sumber kekuatan, kedamaian dan kepercayaan yang sangat ia perlukan dalam mengarungi samudra kehidupan.

Remaja yang melakukan zina akan mendatangkan suatu resiko yang sangat besar, yaitu mereka dapat mempunyai keturunan yang mengakibatkan malapetaka baik bagi mereka maupun bagi bayinya, karena mereka belum cukup dewasa untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Anak laki-laki belum siap untuk bekerja untuk membantu isteri dan anak, mereka harus belajar dahulu, dalam keadaan yang tidak memungkinkan karena adanya perkawinan. Mereka belum cukup pandai, pengalaman bagaimana memilih teman hidup atau bagaiman mendirikan rumah tangga. Maka orang tua dan masyarakat akan menentang dan menghukumnya.

Dampak negatif dari perbuatan zina terhadap kesehatan jasmani adalah timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang diawali dengan tumbuhnya gelembung-gelembung bernanah yang menyerang kulit atau alat kelamin penderita. Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya

dan menular. Penularan bukan hanya dengan melakukan hubungan seksual saja, melainkan juga dengan bersentuhan melalui kulit, sapu tangan, kain, dan sebagainya. Akibat yang lebih berbahaya lagi dari penyakit kelamin ini adalah bahwa penyakit ini dapat mengakibatkan cacat pada anak yang lahir dari orangtua yang mengidap penyakit tersebut (Ahmad Wardi Muslih, 2005, 5-6).

Penyakit lain yang ditimbulkan oleh perbuatan zina ini adalah penyakit AIDS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mengakibatkan hilangnya kekebalan (daya tahan) tubuh. Penyakit ini amat ditakuti karena sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkannya.

C. Hukum Pidana dan sanksinya

Hukum pidana menurut Prof. Mr. W.F.C. van Hattum seperti tercantum dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH, adalah sebagai berikut:

“het samenstel van de beginselen en regelen, welke de Staat of eenige andere openbare rechtsgemenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt”

Yang artinya “suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman” (Lamintang, 1997, 2-3).

Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu *obyektif* dan *subyektif*. Menurut Prof. Simons, hukum pidana dalam arti obyektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu

hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumnya itu sendiri " (Lamintang, 1997, 4).

Adapun dalam arti *subyektif*, hukum pidana itu mempunyai dua pengertian, yaitu hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Dalam sisi lain, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu *hukum pidana material* dan *hukum pidana formal*. Menurut Prof. van Hamel, hukum pidana *material* itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang hukum pidana *formal* menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material " (Lamintang, 197, 10).

Tindak pidana atau tindakan melawan hukum terbagi menjadi dua, yaitu *crimeneel onrecht* dan *police onrecht*. *Crimineel onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tertib hukum dalam arti yang lebih luas dari pada sekedar kepentingan-kepentingan, sedangkan *policie onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.

Dalam hukum positif menurut KUHP ada dua jenis hukuman/pidana, yaitu *pidana pokok* dan *pidana tambahan*. *Pidana pokok* meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan beberapa barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (R. Sugandhi, 1981, 12).

Pidana mempunyai tujuan-tujuan, yaitu untuk pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan untuk pengimbangan / pengimbangan (Muhari Agus Santoso, 2002, 28).

Efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu alat kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama,

dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengukur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum (Barda Nawawi, 1998, 42).

D. Perzinaan dalam pasal 284 KUHP

a. Definisi zina

Zina dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XIV pada pasal 284.

KUHP merumuskan delik zina pada pasal 284 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipenjarakan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 - ke-1. a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, *bahwa pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya;*
 - b. perempuan yang bersuami, yang berzina;
 - ke-2. a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang *diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu bersuami;*
 - b. perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan *perbuatan itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah beristri dan pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu.*
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami istri itu berlaku pasal 27 KUH Perdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.
- (3) Bagi pengaduan itu tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.
- (4) Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi laki istri itu berlaku pasal 27 KUH Perdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena

perceraian atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.”

Zina (*overspelt*) menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya (R. Sugandhi, 1981, 300).

Menurut hukum, baru dapat dikatakan “*persetubuhan*”, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggauta kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani (Lamin-tang, 1997, 301).

Persetubuhan adalah peraduan antara anggota atau alat kelamin laki-laki dengan perempuan di mana alat kelamin laki-laki harus masuk pada alat kelamin perempuan. Ini mempunyai arti bahwa bukan merupakan persetubuhan manakala alat kelamin laki-laki tidak masuk ke dalam alat kelamin perempuan atau bukan masuk ke dalam alat kelamin perempuan, tapi masuk ke lubang yang lain misalnya mulut atau dubur.

Yang ditunjuk pasal 27 KUH Perdata dalam pasal 1, 2 dan 5 pasal 284 KUHP di atas adalah berbunyi: “*Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya*” (Subekti, 1995, 8), maka dari sini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut KUHP yaitu perkawinan dengan satu istri/suami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu istri, dianggap tidak sah jika belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar pernikahan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinaan (salah satu pihak sudah kawin). Yang dipidana menurut KUHP, hanya apabila persetubuhan di luar nikah itu dilakukan secara paksa (perkosaan), terhadap orang yang pingsan, tidak berdaya atau terhadap anak di bawah umur 15 tahun.

Hoge Raad berpendapat bahwa mengadakan hubungan kelamin dengan orang lain bukan merupakan zina apabila ada persetujuan dari pihak suami atau istri. Perbuatan itu belum termasuk pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Dalam kasus ini seorang laki-laki sebagai calo telah menjadikan istrinya seorang wanita tuna susila, yang dengan demikian membenarkan cara hidup istrinya tanpa syarat apapun (Soerodibroto, 1994, 171).

b. Sanksi tindak pidana zina

Hampir semua kejahatan hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.

Sanksi pidana hanya mungkin terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai dapat dipidana oleh pembentuk Undang-Undang (Schaffmeister dkk, 1995, 26).

Dasar penetapan pidana zina terhadap pelaku tindak pidana zina hanya berdasar atas pengaduan. Dalam teori hukum pidana, dikenal dua jenis tindak pidana aduan yaitu:

- (1) Tindak pidana aduan absolut (*absolute klach delict*)
- (2) Tindak pidana aduan relatif (*relative klach delict*) (R. Sugandhi, 1981, 89).

Tindak pidana aduan relatif artinya, tindak pidana yang sebenarnya adalah tindak pidana biasa (bukan aduan), tetapi dalam hal tertentu dia berubah menjadi tindak pidana aduan. Contohnya, pencurian dalam lingkungan keluarga. Pencurian, sebenarnya bukan tindak pidana aduan. Tetapi kalau pencurian dalam keluarga (pencurian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap uang saku suaminya yang tersimpan rapi di kaos kakinya, atau pencurian oleh seorang anak terhadap perhiasan ibu kandungnya), maka pencurian ini termasuk tindak pidana aduan. Tidak akan dilakukan penuntutan oleh pihak berwajib, kecuali ada pengaduan dari keluarganya.

Berbeda dengan tindak pidana aduan relatif (relative klach delict), tindak pidana aduan absolut (absolute klach delict), dalam keadaan apa pun dia adalah tindak pidana aduan. Tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak yang berhak menurut hukum yang berlaku. Menurut *Wayan P. Windia* (dosen Hukum Adat pada Fakultas Hukum Unud), karena zina adalah tindak pidana aduan absolut (absolute klach delict), maka dalam hal ini, walaupun pasangan yang sedang dimabuk cinta menampakkan semangat bercinta menyala-nyala dan terang-terangan, baik dilakukan dalam lingkungan keluarga, dengan tetangga, dengan "daköcan" (dagang kopi cantik), dengan teman sekantor atau atasan langsung dalam satu lembaga pemerintah, tidak dapat dituntut oleh pihak berwajib, tanpa ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan menurut hukum yang berlaku. Pihak yang dianggap paling berhak mengadukan adalah suami, bagi seorang istri yang berselingkuh, atau seorang istri bagi suami yang berselingkuh. Oknum Hansip dan Kamtib, mertua dan ipar, keluarga dekat dan keluarga jauh, apalagi tetangga, tidak berhak mengadukan sebuah "proyek perselingkuhan", dengan maksud agar perbuatan itu dituntut menurut hukum.

Pengaduan yang dimaksud dalam pasal di atas tidak boleh dibelah menurut *R. Soesilo*, maksudnya apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki (C), maka B (sebagai yang melakukan perzinahan dan C sebagai yang turut melakukan perzinahan, kedua-duanya harus dituntut (*R. Soesilo*, 1995, 209). Tidak mungkin misalnya A minta supaya yang dituntut hanya C saja, tetapi hal ini tidak mengurangkan bahwa jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas alasan oportunitet sesungguhnya berkuasa untuk tidak melakukan penuntutan terhadap perempuan tersebut.

Dalam KUHP, pengaduan bisa dicabut sebelum pemeriksaan di muka sidang pengadilan, adapun Hukum Islam pencabutan/pembatalan bisa terjadi sampai pada proses eksekusi khusus jika dasar penghukuman adalah pengakuan.

Sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana zina menurut pasal di atas yaitu pidana penjara, yaitu dihukum dengan hukuman penjara *selama-lamanya sembilan bulan*. Ini adalah lama hukuman yang sangat pendek, bahkan dengan kata-kata *selama-lamanya sembilan bulan* bisa berarti hukuman bisa berkurang dari sembilan bulan menurut keputusan hakim.

E. Analisis pasal 284 KUHP dari kacamata Hukum Islam

Setelah dikemukakan di atas tentang penjabaran dari pasal 284 KUHP tentang perzinaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Definisi zina menurut KUHP memberikan kesimpulan bahwa kategori zina adalah terbatas pada hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita yang salah satu atau keduanya terikat hubungan perkawinan, jika dua pelaku persetubuhan itu sama-sama tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain tidak dijerat dalam pasal ini, dan *mafhum mukhalafah* dari makna zina dalam pasal 284 KUHP bahwa siapapun yang melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan istri/suami yang sah yang dilakukan dengan suka sama suka tidak termasuk orang yang melakukan pidana zina.

Syamsul Huda menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan demikian, maka menurut KUHP tidaklah merupakan tindak pidana dalam hal-hal sebagai berikut (Syamsul Huda, 2001,18):

- a. Dua orang belum kawin yang melakukan persetubuhan, walaupun:
 - perbuatan itu dipandang bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat
 - wanita itu mau melakukan persetubuhan karena tipu muslihat atau janji akan dinikahi, tetapi diingkari
 - berakibat hamilnya wanita itu dan si laki-laki tidak bersedia menikahinya atau ada halangan untuk menikah menurut undang-undang.

- b. Seorang laki-laki telah beristri menghamili seorang gadis (berarti telah melakukan perzinahan), tetapi istrinya tidak membuat pengaduan untuk menuntut.
- c. Seseorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami isteri di luar perkawinan, padahal perbuatan itu tercela dan bertentangan dengan atau mengganggu perasaan kesusilaan/moral masyarakat setempat.

Hukum Islam memandang setiap hubungan seksual di luar nikah sebagai zina, baik pelakunya sudah kawin atau belum. Definisi yang lebih lengkap diberikan oleh Mazhab Hanafi, yaitu hubungan seksual yang haraṃ pada kelamin perempuan yang hidup dan menimbulkan syahwat dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa di negeri yang adil, yang memberlakukan hukum-hukum Islam, (terhadap perempuan) yang terlepas dari kepemilikan yang benar/sah dan pernikahan yang benar/sah, terlepas dari syubhat akan kepemilikan dan akad pernikahannya, terlepas pula dari syubhat keraguan dalam kepemilikan dan pernikahan (Wahbah Zuhaili, 2004, 5349).

KUHP mencerminkan kepentingan individu keluarga itu lebih penting dari pada kepentingan masyarakat umum, sementara Hukum Islam mementingkan kepentingan masyarakat umum yang di dalamnya juga untuk kepentingan individu keluarga.

Menurut KUHP, tindak pidana zina adalah termasuk tindak pidana aduan absolut (*absolute klach delict*) yang artinya tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak yang berhak menurut hukum yang berlaku dan dalam hal ini pihak yang dirugikan yaitu istri atau suami. Jika si suami atau si istri tidak mengadukan suami/istrinya, maka tidak berlaku baginya pasal 284 KUHP.

Apabila melihat pada KUHP pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*", asas legalitas yang dianut di negeri ini sangat ironis, yang sama maknanya dengan pasal 14 ayat 2 UUDS 1950 yang menyebutkan, "*Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum*

yang sudah ada dan berlaku terhadapnya (Supomo, 1954, 33). Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina yang dilakukan orang-orang yang tidak termasuk dalam rumusan KUHP tidak dapat dipidana sebelum ada hukum yang mengatur, sehingga pasal ini sangat longgar untuk dapat menjaring perbuatan tindak pidana zina karena hanya berdasarkan pada pengaduan suami atau istri saja jika merasa dirugikan.

Di dalam Hukum Islam, indikator-indikator untuk menetapkan perbuatan tindak pidana zina lebih luas, Hukum Islam menyatakan bahwa penetapan pidana zina bagi seseorang diputuskan untuk diberi sanksi sebagai pelaku zina jika ada salah satu dari tiga hal, yang bersangkutan mengaku atas perbuatannya berzina, adanya empat saksi yang menyaksikan perzinaan itu, atau qarinah berupa tanda kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami.

Delik zina dalam Hukum Islam adalah delik biasa, bukan delik aduan, yaitu diproses melalui hukum jika ada pengakuan, empat saksi atau tanda kehamilan. Dan jika diketahui ada pelanggaran hukum, aparat penegak hukum dapat menyelidiki dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masalah sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana zina, KUHP memberikan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dan hukuman itu tidak membedakan berat dan ringannya hukuman antara yang berstatus kawin dengan yang tidak berstatus kawin. Hal ini sangat berbeda jauh dengan Norma Hukum Islam yang memberi makna zina sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan suami istri yang sah dan tidak mengandung syubhat. Dan zina ini merupakan tindak pidana kejahatan (*jarimatul hudud*) yang ancamannya bagi yang sudah kawin (*muhshan*) *dirajam* (dilempari batu) sampai meninggal dunia, adapun bagi yang belum kawin (*ghairu muhshan*) *dijilid* (didera) seratus kali dan diasingkan satu tahun.

Pasal 140 ayat 2 KUHP menyatakan "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak

terdapat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan (KUHP, tt, 61).

Dengan melihat pada pasal 140 KUHP, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak *opportunitet* yaitu menyampingkan dan men-deponeer perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum. Sehingga bisa jadi salah satu pelaku zina tidak dihukum atas dasar hak *opportunitet* ini. Hak oportunitet ini sangat bertentangan dengan jargon penegakan supermasi hukum "*equality before the law*" yang memandang semua orang sama di hadapan hukum.

F. Penutup

Dari fenomena seperti di atas ini jelas-jelas memberikan petunjuk bahwa konsep zina yang ditawarkan oleh KUHP tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya perbuatan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis tanpa hubungan perkawinan termasuk zina. Selain itu sanksi yang diberikan oleh KUHP kurang memberi hukuman yang setimpal atas perbuatan asusila itu (pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan).

Penyusunan KUHP, khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan yang tidak dilandasi oleh pemikiran yang bersumber kepada norma agama, dan hanya didasarkan pada pertimbangan rasio semata, pada waktu yang lain dianggap tidak lagi melanggar kesusilaan, dan bahkan dianggap wajar saja. Menurut teori hukum modern yang dinyatakan oleh Jerome Frank, tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Philippe Nonet dan Selznick, 2003, 59), maka seharusnya dalam menyusun KUHP baru memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kenyataan-kenyataan tersebut merupakan realita yang dapat memperkuat upaya dilakukannya kriminalitas perbuatan zina dalam arti luas, meliputi sebuah bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan.

Kalau kriminalisasi demikian disetujui maka persetujuan yang dilakukan di luar perkawinan oleh mereka yang sama-sama tidak terikat dalam perkawinan tertentu (*fornication*) harus dinyatakan sebagai tindak pidana dan merupakan standar delik zina.

Semoga dalam merumuskan hukum pidana baru di Indonesia khususnya tentang delik zina di masa yang akan datang sangat memperhatikan norma-norma agama dan hukum adat yang menjunjung tinggi moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Muhari Agus Santoso., 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Yogyakarta, Averrooes Press.
- Philippe Nonet dan Selznick, 2003. *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Jakarta, (HuMa).
- Reza, 1998. *Perzinaan dan aspek-aspeknya*.
- R.Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politea.
- R. Sugandi,R., 1981. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.
- , *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Surabaya, Karya Anda, t.t.,
- Schaffmeister dkk., 1995. *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberti.
- Soerodibroto, 1994. *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Supomo, 1954. *Undang-Undang Dasar Sementara Rrepublik Indonesia*, Jakarta, Noordhoff-Kolff N.V.
- Syamsul Huda, 2001. *Pemikiran tentang Tindak Pidana Zina Menurut Syariat Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasiona*, Malang.
- Wahbah Zuhaili, 2004. *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikri, Damaskus.

TINGKAT KECERDASAN MAHASISWA DITINJAU DARI PERBEDAAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UIN MALANG

Retno Mangestuti

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Abstract

The aims of this research is to study the difference of Intelligent Quotient (IQ), Emotional Intelligence (EI), Spiritual intelligence among faculty in UIN Malang.

The subjects in this research were 304 student of Islamic State University in Malang, using proportional random sampling technique, with the result that representative and balance each faculty. The instrument used in this research are IQ test and psychologis scale. Psychologis scale are spiritual intelligence scale, emotional intelligence scale, and agresiviti scale. The data were analyzed using analysis of variance with SPSS version 10.0 for windows.

The research result show: that there's differences among faculty in UIN Malang at Intelligent Quotient but there's no differences among faculty in UIN Malang at Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence.

Key word: intelligent quotient, spiritual intelligence, emotional intelligence.

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat sempurna, dengan dibekali berbagai potensi, seperti yang tercantum dalam surat At Tin ayat 3: "*dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk*". Salah satu bentuk kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya adalah adanya kemampuan manusia untuk bersikap dan berperilaku secara inteligen.

Inteligensi merupakan salah satu potensi individu dalam bentuk ukuran kapasitas tertentu dalam menerima dan merespon stimulus dari luar yang kemudian dikelola dengan menggunakan akal untuk menentukan bentuk-bentuk reaksi dalam perilakunya. Inteligensi merupakan kapasitas

bawaan yang diturunkan secara genetik dari orangtuanya. Masyarakat awam, mengenal inteligensi sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah kecerdasan intelektual.

Setidaknya saat ini dikenal adanya beberapa jenis kecerdasan, diantaranya adalah jenis kecerdasan intelektual yang biasa dikenal dengan istilah *intelligence quotient (IQ)* yaitu ukuran kecerdasan seseorang dalam menyelesaikan masalah secara tepat.

Pada tahun 1995, Daniel Goleman mempopulerkan suatu konsep baru dalam bidang psikologi yang disebut dengan *Emotional Intelligence*. Menurut Goleman (1996) kecerdasan intelektual (IQ) bila tidak disertai dengan pengolahan emosi yang baik tidak akan menghasilkan seseorang sukses dalam hidupnya. Peranan IQ hanyalah sekitar 20% untuk menopang kesuksesan hidup seseorang, sedangkan 80% lainnya ditentukan oleh faktor yang lain. Selanjutnya ia mengatakan bahwa pentingnya pengelolaan emosi bagi manusia dalam pengambilan keputusan bertindak adalah sama pentingnya, bahkan seringkali lebih penting daripada nalar, karena menurutnya, kecerdasan intelektual tidak berarti apa-apa bila emosi yang berkuasa.

Pada pertengahan tahun 2000, dunia psikologi dikejutkan kembali oleh adanya penemuan baru yang dikemukakan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall tentang kecerdasan manusia yang berhubungan dengan spiritual, yang dikenal dengan sebutan kecerdasan spiritual. Selanjutnya Zohar & Marshall (2000) mengatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai dalam kehidupan.

Menurut Ginanjar (2003) ketiga bentuk kecerdasan tersebut di atas sangat penting dan harus dikembangkan dalam kehidupan seseorang. Hal ini disebabkan karena kecerdasan intelektual diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan aspek kognitif, kecerdasan emosional diperlukan untuk mengatasi masalah afektif, dan kecerdasan spiritual diperlukan untuk mengatasi masalah kebermaknaan dalam menjalani kehidupan.

Dalam konteks penelitian ini, istilah kecerdasan intelektual biasa disebut dengan IQ, kecerdasan emosional dikenal dengan EI, dan kecerdasan

spiritual dikenal dengan istilah SI. Penulis lebih sepekat dengan penggunaan EI dan SI bukan istilah EQ dan SQ. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa emosi dan spiritual adalah dua konstruk psikologis yang bersifat dinamis yang perkembangannya berbeda dengan konsep kognitif. Perkembangan kognitif lebih bersifat progresif sampai pada usia tertentu sehingga bisa diukur dengan cara membagi usia mental (*Mental Age*) oleh usia kronologis (*Cronological Age*) yang kemudian dikali 100. Hasil perhitungan inilah yang kemudian disebut dengan istilah *Quotient*, sedangkan emosi dan spiritual perkembangannya bersifat dinamis, karena itu maka yang diukur dalam kecerdasan emosional dan spiritual terletak pada kualitas kemampuannya yang dalam hal ini dikenal dengan istilah *Intelligence*.

Dalam perkembangan pendidikan dewasa ini, memang seyogyanya mengadopsi ketiga kecerdasan tersebut (yakni Intelektual, emosional dan spiritual). Demikian pula yang telah dilakukan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan berlandaskan Ulul Albab, berusaha mencetak insan yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak mulia. Akan tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa UIN Malang adalah perguruan tinggi yang terdiri dari enam fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah, Syariah, Humaniora dan Budaya, Psikologi, Ekonomi serta Sains dan Teknologi. Tiap-tiap Fakultas yang ada di UIN Malang ini pada dasarnya memiliki karakteristik, dan kemampuan mahasiswa yang berbeda-beda, baik itu karena faktor genetik (bawaan) maupun faktor lingkungan. Faktor lingkungan disini, bisa berupa lingkungan dimana dia tinggal maupun lingkungan akademis dimana dia belajar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perbedaan kecerdasan pada mahasiswa di enam fakultas yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Malang.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang perbedaan tingkat kecerdasan pada enam Fakultas di UIN Malang. Hasil penelitian ini menjadi penting mengingat sampai saat ini

penelitian yang membandingkan tiga jenis kecerdasan pada mahasiswa di enam Fakultas UIN Malang belum pernah dilakukan.

C. Kajian Pustaka

1. Kecerdasan Intelektual

Masyarakat awam, mengenal inteligensi sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Gambaran anak yang berinteligensi tinggi adalah seorang anak yang pintar yang selalu naik kelas dengan nilai baik. Bahkan, gambaran tersebut meluas pada citra fisik seperti ganteng, berpakaian bersih, matanya bersinar dan lain sebagainya.

Pandangan awam seperti yang digambarkan di atas, walaupun tidak memberikan arti yang jelas tentang inteligensi namun pada umumnya tidak berbeda jauh dari makna inteligensi sebagaimana yang dimaksud oleh para ahli. Apapun definisinya, makna inteligensi memang mendeskripsikan suatu kepintaran dan kebodohan.

Dalam memahami hakekat inteligensi, Maloney dan Ward (1976), mengemukakan adanya empat pendekatan yang bisa diajukan, yaitu: Pendekatan teori belajar. Inti pendekatan teori ini terletak pada pemahaman mengenai hukum-hukum dan prinsip umum yang digunakan oleh individu untuk memperoleh bentuk-bentuk perilaku baru. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini para ahli lebih memusatkan perhatiannya pada perilaku yang tampak dan bukan pada pengertian mengenai konsep mental dari inteligensi itu sendiri.

1. *Pendekatan teori belajar*. Inti pendekatan teori ini terletak pada pemahaman mengenai hukum-hukum dan prinsip umum yang digunakan oleh individu untuk memperoleh bentuk-bentuk perilaku baru.
2. *Pendekatan Neurobiologis*. Pendekatan ini beranggapan bahwa inteligensi memiliki dasar anatomis dan biologis, sehingga bisa disimpulkan bahwa perilaku inteligen dapat ditelusuri pada dasar-dasar neuro-anatomis dan proses neurofisiologisnya.

3. *Pendekatan Psikometris*. Pendekatan ini beranggapan bahwa inteligensi merupakan suatu konstruk atau sifat psikologis yang berbeda-beda kadarnya pada setiap orang. Namun dikarenakan para ahli psikometri biasanya lebih tertarik pada masalah pengukuran psikologis, maka mereka lebih memperhatikan pada cara praktis untuk melakukan klasifikasi dan prediksi berdasarkan hasil pengukuran inteligensi daripada meneliti hakikat inteligensi itu sendiri.
4. *Pendekatan Teori Perkembangan*. Inti dari pendekatan ini terletak pada perhatiannya terhadap perkembangan inteligensi secara kualitatif dalam kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan biologis individu.

Menurut Groth-Marnat (dalam Azwar, 1996), dua pendekatan pertama sangat menarik bila dipandang dari perspektif teoritis, sedangkan dua pendekatan terakhir lebih mempunyai pengaruh pada segi praktis dan lebih banyak dipelajari serta diteliti. Dengan demikian maka penelitian ini menggunakan pendekatan psikometris karena bertujuan untuk mengukur inteligensi dengan ukuran-ukuran tertentu.

Dalam hal pengukuran, para ahli psikologi telah banyak yang berusaha mengadakan pengukuran intelegensi dengan maksud mendapatkan gambaran yang seobyektif mungkin tentang intelegensi individu, melalui pengembangan tes intelegensi. Tes-tes tersebut merupakan instrumen yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang kualitas inteligensi (kapasitas intelektual) dengan memakai ukuran kuantitatif. Di antara para ahli psikologi sekaligus sebagai perintis penyusunan tes intelegensi adalah Binet dan Weschler.

Alfred Binet adalah seorang ahli psikologi Prancis. Pada tahun 1905, mulai menyusun tes intelegensi yang dibantu oleh Simon, sehingga skala tes yang dihasilkan sering disebut Skala Binet-Simon. Satuan taraf intelegensi dinyatakan dengan IQ (*Intelligence Quotient*) yaitu sebagai perbandingan antara umur mental atau mental age (MA) dengan umur kalender atau Chronological Age (CA) dan dikalikan dengan 100 atau

$$IQ = \frac{MA}{CA} \times 100$$

Pada tahun 1936 Wechsler mengembangkan tes intelegensi yang relatif lebih baik daripada tes Binet. Tes yang dikembangkan oleh Wechsler itu dapat dipergunakan untuk mengukur inteligensi orang dewasa yang mempunyai rentang sampai umur 64 tahun.

Beberapa tes intelegensi yang dapat digolongkan ke dalam kelompok tes yang bebas pengaruh kebudayaan antara lain adalah *Standart Progressive Matrices* yang dikembangkan oleh Raven.

Hasil suatu tes inteligensi dapat diinterpretasikan dengan cara membandingkan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Namun yang paling umum, interpretasi hasil suatu tes psikologi biasanya dilakukan dengan membandingkan individu dengan hasil tes individu lain dalam kelompok usianya.

2. Kecerdasan Emosional

Emosi adalah perasaan tertentu yang berkecenderungan dan dialami seseorang serta berpengaruh terhadap kehidupan. Karena itu orang tidak akan pernah dapat lepas dari emosi. Penelitian Martani (1996) membuktikan bahwa emosi-emosi tertentu dapat ditentukan melalui rangsang suara atau gambar. Meskipun dalam hal ini unsur biologis memainkan peran tetapi pengalaman kehidupan serta budaya akan mempengaruhi ekspresinya. Oleh karena itu pengelolaan emosi sangat dimungkinkan, agar kekuatan yang terkandung dalam emosi dapat dimanfaatkan secara positif. Selanjutnya ia mengatakan bahwa, orang yang sehat biasanya mampu mengenal emosi yang dialaminya dan dapat mengekspresikan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungannya.

Istilah *Emotional Intelligence* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Kecerdasan Emosional, pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayor dari University of New Hampshire pada tahun 1990, Kedua tokoh diatas banyak diilhami oleh gagasan dari Gardner yang mengemukakan konsep *multiple intelligence*, kemudian istilah *emotional intelligence* ini dipopulerkan oleh seorang penulis kenamaan yang bernama Daniel Goleman dengan sebuah buku *Emotional Intelligence*.

Pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan seseorang telah disitir oleh Goleman (1996) yang mengatakan bahwa kecerdasan bila tidak disertai dengan pengolahan emosi yang baik tidaklah akan menghasilkan seseorang sukses dalam hidupnya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa peranan kecerdasan akademik hanyalah sekitar 20% untuk menopang kesuksesan hidup seseorang, sedangkan 80% lainnya ditentukan oleh faktor yang lain, yang diantaranya adalah faktor kecerdasan emosional. Pendapat lain yang senada dengan Goleman, dikemukakan oleh Patton (1998) yang mengatakan bahwa orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi cenderung akan mengalami kesuksesan ditempat kerjanya. Patton (1998) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan emosi secara efektif dalam mencapai suatu tujuan.

Gardner (1993), menyebut istilah kecerdasan emosional dengan istilah kecerdasan antarpribadi dan kecerdasan intrapribadi, adapun definisi dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kecerdasan antarpribadi adalah kemampuan untuk memahami orang lain, yang wujudnya berupa pemahaman terhadap apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana mereka bekerja sama dengan sesamanya. Dalam rumusan yang lain, ia mengatakan bahwa kecerdasan antar pribadi itu mencakup kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan hasrat orang lain.
2. Kecerdasan intrapribadi adalah kemampuan yang bersifat korelatif tetapi terarah ke dalam diri sendiri, yang wujudnya berupa kemampuan untuk membentuk suatu model diri sendiri yang teliti dan mengacu pada diri, serta kemampuan untuk menggunakan model tersebut sebagai alat untuk menempuh kehidupan secara efektif.

Berbeda dengan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EI) lebih banyak diperoleh dari pengalaman atau pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Shapiro (1997) yaitu : *“Perhaps the most important distinction between IQ and EI is that EI much less genetically*

loaded, providing an opportunity for parents and educators to pick up where nature left off in determining a child's chances of success." Pernyataan ini mengisyaratkan adanya harapan dan optimisme bagi pendidik (para orang tua dan guru) untuk meningkatkan apa yang dimiliki anak agar mereka memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berhasil atau sukses dalam menjalani kehidupannya. Hal ini akan terwujud melalui usaha yang sungguh-sungguh dari para orang tua dan pendidik di sekolah.

Ciri-ciri dari kecerdasan emosional dikemukakan oleh Goleman (1996), yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut: kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan tahan dalam menghadapi frustrasi, kemampuan untuk mengendalikan dorongan hati dan tidak melebihi-lebihkan kesenangan, kemampuan untuk mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk berempati dan berdoa.

Menurut Golhman (1997) kecerdasan emosional bisa dicirikan dengan adanya kemampuan seperti: mengatur emosi, menyejukan emosi ketika dilanda kesedihan, mengendalikan emosi ketika emosi meluap-luap, mampu memusatkan perhatian, berhubungan dengan orang lain secara harmonis, mampu memenuhi tugas-tugas akademik, dan bersahabat dengan orang lain. Selanjutnya, ia membagi kecerdasan emosional pada dua bagian, yaitu:

1. Kemampuan pada orang tua yang dicirikan dengan adanya kemampuan seperti: sadar terhadap emosi anak, mampu berempati terhadap anak, mampu menyejukkan hati anak, dan mampu membimbing anak.
2. Kemampuan pada anak, yang dicirikan dengan adanya kemampuan seperti: mampu mengontrol impuls, mampu menahan kepuasan, mampu memotivasi diri, mampu memahami orang lain, mampu menguasai emosi baik ketika sedih maupun ketika senang.

Salovey (dalam Goleman, 1996) menempatkan kecerdasan pribadi dari konsep Gardner kedalam definisi tentang kecerdasan emosional, ia membagi kecerdasan emosional kedalam lima dimensi, yaitu:

1. Mengenali emosi diri yaitu kesadaran dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi.
2. Mengelola emosi, yaitu menangani perasaan agar perasaan tersebut dapat terungkap dengan tepat. Pengelolaan emosi ini terwujud dengan adanya suatu kemampuan seperti menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, menghilangkan kemurungan, dan mengurangi ketersinggungan.
3. Memotivasi diri sendiri, yaitu menata emosi diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Motivasi diri ini terwujud dalam suatu kemampuan untuk antusias, gairah dan daya juang yang tinggi dalam mencapai kesuksesan yang disertai dengan dorongan hati yang kuat untuk mencapai cita-cita.
4. Kemampuan berempati, yaitu suatu kemampuan untuk mengetahui bagaimana keadaan perasaan orang lain.
5. Kemampuan untuk membina hubungan, yaitu ketrampilan untuk mengelola emosi orang lain sekaligus mampu membina persahabatan dengan orang lain.

Pada penelitian ini kecerdasan emosional yang diukur menggunakan skala yang disusun penulis dengan merujuk pada teori Gardner (1993), Salovey (dalam Goleman, 1995), dan Goleman (1995), adapun aspek yang diukur dalam skala ini adalah:

- a. Kemampuan yang bersifat intrapersonal yang dicirikan dengan adanya mengenal emosi diri, mengelola emosi diri, kemampuan untuk memotivasi diri sehingga bersikap optimis.
- b. Kemampuan yang bersifat antarpersonal yang dicirikan dengan kemampuan berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk berempati.

3. Kecerdasan Spiritual

Istilah spiritual berasal dari akar kata *spirit* yang berarti roh. Kata ini berasal dari kata latin *Spiritus* yang berarti bernafas. Karena itu spiritual bisa diartikan sebagai roh dan nafas karena berfungsi sebagai energi

kehidupan yang membuat seseorang menjadi hidup. Selanjutnya, istilah spiritual berfungsi sebagai sifat dari suatu bentuk kecerdasan selain intelektual dan emosional.

Kecerdasan Spiritual berarti kemampuan manusia untuk dapat mengenal dan memahami diri sepenuhnya sebagai makhluk spiritual maupun sebagai bagian dari alam semesta. Dengan memiliki kecerdasan spiritual berarti kita memahami sepenuhnya makna dan hakikat kehidupan yang akan dituju. Menurut Zohar & Marshal (2000) Kecerdasan spiritual diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, sehingga kecerdasan ini berfungsi untuk menempatkan perilaku dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, dengan kata lain kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang membedakan kebermaknaan tindakan atau jalan hidup seseorang dari yang lain. Selanjutnya Covey & Meril (1991) menjelaskan bahwa kehidupan yang bermakna bukan perkara kecepatan atau efisiensi saja, tapi merupakan perkara apa dan mengapa seseorang melakukan sesuatu.

Kecerdasan spiritual adalah kesadaran yang dengannya manusia hanya mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi juga secara kreatif menentukan nilai-nilai baru. Ahli jiwa termashur Abraham Maslow menggunakan istilah aktualisasi diri (*self-actualisation*) Sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Maslow menemukan bahwa, tanpa memandang suku atau asal-usul seseorang, setiap orang mengalami tahap-tahap peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupannya. Kebutuhan tersebut meliputi: Kebutuhan fisiologi (*Physiological*), Kebutuhan keamanan dan keselamatan (*Safety*), Kebutuhan rasa memiliki, sosial dan kasih sayang (*social*), Kebutuhan akan penghargaan (*Esteem*), Kebutuhan aktualisasi diri (*Self-actualisation*)

Maslow (dalam Prijaksono & Erningpraja, 2003) mendefinisikan aktualisasi diri sebagai sebuah tahapan spiritualitas seseorang, dimana seseorang berlimpah dengan kreatifitas, intuisi, keceriaan, suka cita, kasih sayang, kedamaian, toleransi, kerendahan hati, serta memiliki tujuan hidup yang jelas, dan misi untuk membantu orang lain mencapai tahap

kecerdasan spiritual ini. Menurut Maslow pengalaman spiritual adalah *peak experience, plateau-the farthest reaches of human nature*. Pengalaman spiritual adalah puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia serta merupakan peneguhan dari keberadaannya sebagai makhluk spiritual, pengalaman spiritual merupakan kebutuhan tertinggi manusia. Bahkan Maslow menyatakan bahwa pengalaman spiritual telah melewati hierarki kebutuhan manusia.

Zohar & Marshal (2000) menyebutkan tanda-tanda dari kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik adalah: kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif), kesadaran yang tinggi, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, kualitas kehidupan yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal, kecenderungan untuk bertanya, dan bertanggung jawab untuk membawakan misi dan nilai pada orang lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Tischler & McKeage (2002) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual dicirikan dengan adanya lima kemampuan inti, yaitu: 1) Kemampuan Transendental yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan batin, kedamaian hati, dan ketentrangan jiwa dengan merasa bahwa tuhan selalu menyertai dan membimbing hidup individu 2) Kemampuan untuk memasuki kondisi spiritual yang dicirikan pada komitmen individu untuk menjalin hubungan yang dalam dengan tuhan, kekuatan iman, serta kepasrahan individu. 3) Kemampuan menanamkan nilai-nilai religius yang ditampakan dalam aktivitas-aktivitas individu selalu merasa dalam koridor agama. 4) Kemampuan untuk memanfaatkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. 5) Kapasitas untuk berperilaku saleh yang ditunjukkan dengan sikap yang mudah memberikan maaf, mensyukuri nikmat, kesederhanaan, serta mengasihi sesama.

Pendapat lain dikemukakan oleh Emmons dan Myers (2003) yang menyatakan bahwa komponen dari kecerdasan spiritual adalah: 1) Kemampuan untuk mentransendensi; 2) Kemampuan untuk mensucikan pengalaman sehari-hari; 3) Kemampuan untuk mengalami

kondisi-kondisi kesadaran puncak; 4) Kemampuan untuk menggunakan potensi-potensi spiritual untuk memecahkan masalah; dan 5) Kemampuan untuk terlibat dalam berbagai kebajikan.

Menurut penulis, pendapat diatas masih belum tegas dalam mencirikan kecerdasan spiritual, karena itu dengan memperhatikan teori diatas dibuat definisi lain untuk memberikan kriteria kecerdasan spiritual. Menurut penulis kecerdasan spiritual adalah suatu bentuk kecerdasan dalam memahami makna kehidupan yang dicirikan dengan adanya kemampuan yang bersifat internal dan eksternal. Ciri dari kemampuan tersebut adalah:

1. Kemampuan yang bersifat internal yaitu kemampuan yang berhubungan diri dan Allah (*hablun min al-Allah*), cirinya adalah kesadaran terhadap sesuatu yang transenden, adanya visi yang bersifat spiritual, dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari penderitaan.
2. Kemampuan yang bersifat eksternal yaitu kemampuan yang berhubungan dengan sesama manusia (*hablun min al-nas*), cirinya adalah keengganan untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain dan kecenderungan untuk mengajak pada kebaikan.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maka dalam penelitian ini diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual adalah suatu kemampuan mental untuk memecahkan masalah secara cepat, tepat dan efisien. Data ini diperoleh dari hasil tes IQ pada mahasiswa dengan menggunakan alat ukur SPM (*Standart Progressif Matrices*).
2. Kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi secara tepat. Kecerdasan ini dicirikan dengan adanya kemampuan yang bersifat ke dalam diri (*intrapersonal*) dan ke luar diri (*antarpersonal*). Data ini diperoleh dari pernyataan mahasiswa melalui skala kecerdasan emosional yang mengacu pada teori yang dikemukakan

- yang diukur dalam skala ini adalah: 1) Kemampuan yang bersifat intrapersonal yang dicirikan dengan adanya mengenal emosi diri, mengelola emosi diri, kemampuan untuk memotivasi diri sehingga bersikap optimis. 2) Kemampuan yang bersifat antarpersonal yang dicirikan dengan kemampuan berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk berempati.
3. *Skala kecerdasan spiritual*. Alat ukur ini berupa skala psikologis sebanyak 30 item yang mampu mengungkap aspek dari kecerdasan spiritual. Skala ini disusun oleh penulis dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Marshal & Deborah (2000) dan Tischler & McKeage (2002). Aspek yang diukur dalam skala ini adalah: 1) Kemampuan yang bersifat internal adalah kesadaran terhadap sesuatu yang transenden, mempunyai visi yang bersifat spiritual, dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari penderitaan.; 2) Kemampuan yang bersifat eksternal adalah kecenderungan untuk mengajak pada kebaikan dan keengganan untuk berbuat yang merugikan orang lain.

Bentuk skala yang digunakan adalah skala pengukuran Likert, dimana sebagai dasar penentuan nilainya dikategorikan dalam sangat setuju (SS) diberi skor 5, setuju (S) diberi skor 4, netral (N) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1. Sebelum digunakan dalam penelitian, skala ini diuji cobakan terlebih dahulu pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang.

Jumlah responden yang dijadikan uji coba berjumlah 151 orang, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nunanly (dalam Azwar, 2000) yang mengatakan bahwa untuk uji coba item diperlukan jumlah subjek sebanyak 5 atau 10 kali dari jumlah item, karena itu jumlah 151 orang sudah cukup untuk memenuhi kriteria di atas. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur. Kriteria item dianggap sah ketika memenuhi koefisien korelasi di atas .2000 sedangkan reliabilitas skala dianggap andal ketika memenuhi nilai koefisien alfa (") minimal sebesar .6000.

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas ditemukan bahwa untuk skala kecerdasan emosional dari 30 item diperoleh 25 item valid dengan tingkat

reliabilitas sebesar “.7516, sedangkan untuk skala kecerdasan spiritual dari 30 item diperoleh 10 item valid dengan tingkat reliabilitas sebesar “.7571. Dari hasil di atas bisa disimpulkan bahwa kedua skala dapat memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas.

G. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini, maka analisis data dilakukan dengan *analisis varians* yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiga jenis kecerdasan ditinjau dari perbedaan fakultas yang dalam penelitian ini terdiri dari enam fakultas yaitu fakultas Tarbiyah, Sainteks, Syariah, Humaniora dan Bahasa, Psikologi, dan fakultas Ekonomi. Dalam pelaksanaan analisis, penulis menggunakan komputer program SPSS 10 for Window.

Dari hasil analisis ditemukan bahwa untuk variabel kecerdasan intelektual ditemukan nilai $F=3.904$ dan $P=0.022$, untuk variabel kecerdasan emosional ditemukan nilai $F=1.396$ dan $P=0.226$, dan untuk variabel kecerdasan spiritual ditemukan nilai $F=1.861$ dan $P=0.101$. Hasil di atas bisa diinterpretasikan bahwa perbedaan kecerdasan yang disebabkan karena perbedaan fakultas hanya terdapat pada variabel kecerdasan intelektual, sedangkan pada variabel emosional dan spiritual tidak terdapat perbedaan. Untuk mengetahui urutan dan perbedaan rerata kecerdasan intelektual bisa dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 2
Urutan Kecerdasan Intelektual Berdasarkan Perbedaan Fakultas

No.	Urutan Fakultas	Jumlah subjek	Skor minimal	Skor Maksimal	Nilai Mean
1	Sains & Teknologi	57	15	57	44.65
2	Humaniora & Bahasa	59	12	56	41.75
3	Psikologi	40	10	51	40.95
4	Syariah	41	18	55	40.12
5	Ekonomi	37	13	52	38.46
6	Tarbiyah	70	5	52	38.37

oleh Gardner (1993), Salovey (dalam Goleman, 1995) dan Goleman (1995). Adapun aspek yang diukur dalam skala ini adalah:

- a. Kemampuan yang bersifat intrapersonal yang dicirikan dengan adanya mengenal emosi diri, mengelola emosi diri, kemampuan untuk memotivasi diri sehingga bersikap optimis.
 - b. Kemampuan yang bersifat antarpersonal yang dicirikan dengan kemampuan berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk berempati.
3. Kecerdasan spiritual adalah suatu kemampuan untuk memecahkan persoalan makna dan nilai dalam kehidupan. Kecerdasan ini dicirikan dengan adanya kemampuan untuk memaknai yang hubungannya dengan dunia internal maupun eksternal. Data ini diperoleh dari pernyataan mahasiswa melalui skala kecerdasan spiritual yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Zohar dan Marshal (2000), Tischler & McKeage (2003).

E. Populasi dan Sampel

Populasi, menurut Hadi (1996) adalah semua individu yang termasuk dalam kriteria-kriteria sample yang ditentukan, sedangkan menurut Nadzir (1987), pengertian populasi yaitu kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang.

Sampel menurut Arikunto (1991) adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian tidak selalu meneliti individu di dalam suatu populasi karena dalam setiap pengumpulan data, selalu akan berhadapan dengan faktor dana, tenaga, waktu yang tersedia untuk memperoleh data tersebut. Dengan keterbatasan tiga faktor tersebut, maka penelitian hanya dilakukan pada sebagian dari populasi. Selanjutnya Sudjana (1988) menyatakan bahwa yang dimaksud sample adalah sebagian populasi yang dikenai langsung oleh penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportional random sampling* yaitu memilih individu-individu yang ada dikelas-kelas perkuliahan dari tiap-tiap fakultas secara random dengan

mempertimbangkan keseimbangan jumlah mahasiswa dari tiap fakultas. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh sampel sebanyak 304 orang. Untuk Fakultas Tarbiyah, Humaniora, dan Saintek diambil sebanyak dua kelas, sedangkan untuk Fakultas Psikologi, Ekonomi, dan Syariah diambil sebanyak satu kelas.

Tabel 1
Deskripsi Jumlah Sampel Penelitian

NO	FAKULTAS	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Tarbiyah	28 orang	42 orang	70 orang
2	Humaniora	14 orang	35 orang	59 orang
3	Sainstek	13 orang	35 orang	58 orang
4	Psikologi	13 orang	27 orang	40 orang
5	Ekonomi	17 orang	20 orang	37 orang
6	Syariah	25 orang	15 orang	40 orang
Jumlah		110 orang	194 orang	304 orang

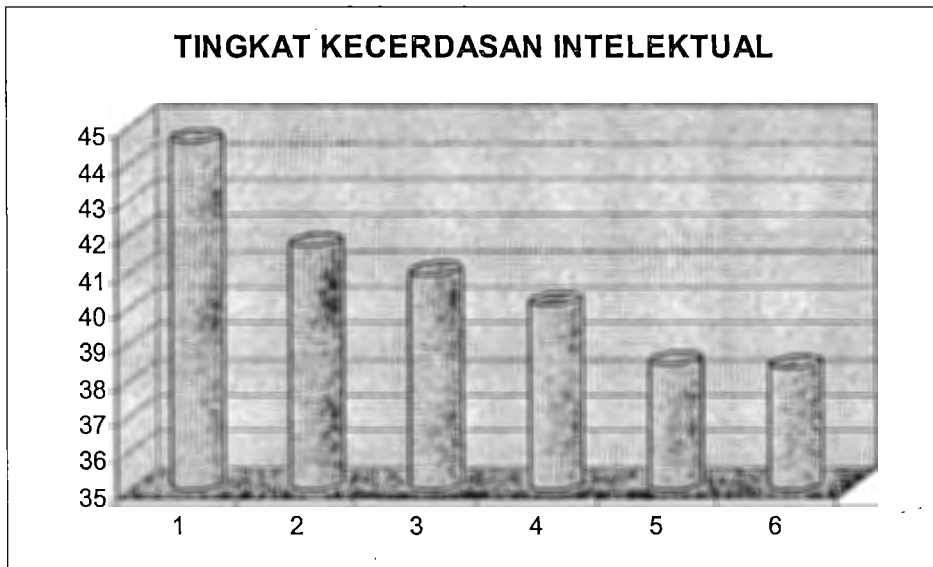
F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, alat ukur yang digunakan adalah berupa tes dan skala psikologis. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Tes Intelligensi (Standart Progressif Matrices)*. Tes ini berupa gambar dengan sebagian yang terpotong. Tugas subjek adalah mencari potongan yang cocok untuk gambar tersebut dari alternatif potongan-potongan yang sudah disediakan. Keunggulan alat tes ini pelaksanaannya bisa dilakukan secara klasikal, dan dengan alat tes ini subjek bisa dikelompokkan tingkat kecerdasannya menjadi 5 kelompok yaitu: 1) *Intellectually superior*, 2) *Definitely above the average in intellectual capacity*, 3) *Intellectually average*, 4) *Definitely below average in intelletually capacity*, 5) *Intellectually defective*.
2. *Skala kecerdasan emosional*. Alat ukur ini berupa skala psikologis sebanyak 30 item yang mampu mengungkap aspek-aspek kecerdasan emosional. Skala ini disusun oleh penulis dengan merujuk pada teori Gardner (1993), Salovey (dalam Goleman, 1995), dan Goleman (1995). Aspek

Temuan yang paling menarik untuk dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kecerdasan intelektual karena jenis kecerdasan inilah yang menunjukkan adanya perbedaan antara tiap fakultas. Untuk mengetahui urutan tingkat kecerdasan intelektual pada tiap fakultas bisa dilihat dari histogram di bawah ini:

Tabel 3
Histogram Tingkat Kecerdasan Intelektual pada Tiap Fakultas



Hasil diatas tentu saja sangat menggembirakan bagi civitas akademika pada Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya jurusan matematika yang dijadikan sebagai subjek pada penelitian ini, karena fakultas inilah yang mampu mendapatkan skor tertinggi dari kecerdasan intelektual dibanding dengan fakultas-fakultas lainnya di lingkungan UIN Malang.

Perolehan skor tertinggi kecerdasan intelektual pada fakultas Sains dan Teknologi, dimungkinkan karena mahasiswa lebih banyak mengedepankan kemampuan yang bersifat kognitif, sebagaimana tuntutan akademiknya. Misalnya para mahasiswa sering diberikan latihan dalam menghitung angka-angka yang notabene merupakan salah satu aspek penting yang diukur dalam pengukuran kecerdasan intelektual. Selain itu, mungkin saja adanya suasana akademis yang cukup kondusif di fakultas tersebut

sehingga para mahasiswa menjadi terpacu untuk terus meningkatkan kemampuannya.

Keadaan tersebut cukup menjadikan perhatian bagi civitas akademika fakultas lainnya untuk selalu meningkatkan pelayanan para pengelola dan dosen dalam mengelola pendidikan sehingga berhasil meningkatkan kecerdasan intelektual pada mahasiswanya. Adanya perbedaan tingkat kecerdasan intelektual pada tiap-tiap fakultas menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena mungkin saja perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan berbagai aspek dalam mengelola pendidikan di tiap-tiap fakultas. Data ini harus dikaji lebih lanjut sehingga ditemukan faktor yang mendasari adanya perbedaan ini, sehingga pada akhirnya setiap fakultas akan terus berusaha untuk memperbaiki hasil yang dicapai selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S., 1998. *Psikologi Inteligensi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- , 2000. *Pengembangan Skala Psikologis*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S., 1990. *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Aziz, R., 2001. Peranan Kecerdasan Emosional terhadap penyesuaian diri dan perilaku delinkuen pada remaja di Yogyakarta, *Ulul Albab, Jurnal Studi Islam, Sains, dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1.
- Baron, R.A & Byrne, D., 1997. *Social Psychology*, Boston: Allyn & Bacon
- Cooper, R.K., & Sawaf, A., 1998. *Executive EQ, Kecerdasan Emosional Dalam Kepemimpinan Dan Organisasi*, (Alih bahasa Widodo) Jakarta: Gramedia.
- Efendi, A., 2005. *Revolusi Kecerdasan Abad 21, Kritik MI, EI, SQ, AQ & Successful Intelligence Atas IQ*, Bandung: Alfabeta.
- Farid, M., & Mashuri, 2003. *Mengenal Inteligensi*, Jakarta: Sains.
- Hadi, S., 1996. *Metodologi Research*, (Jilid 3), Yogyakarta: Andi Offset.
- Gardner, H., 1993. *Frames of Mind*, New York: Basic Book.
- Ginanjar, A., 2003. *Emosional Spiritual Quotient, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Jakarta: Gramedia.
- Goleman, D., 1995. *Emotional Intelligence, Why it more than IQ*, New York: Bantam Books.
- Gothman, J., 1997. *The Heart of Parenting*: New York: Bantam Books.
- Groth-Marnat, G., 1984. *The Handbook of Psychological Assesment*, New York: Van Nostrand Reindholt Company.
- Martaniah, S.M., 1997. Model Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Jurnal Psikologika*, No.2, Januari.
- Monks, Fj., Knoers, A.M.P, & Haditono, S.R., *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir. M., 1987. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patton, P., 1998. *Emotional Intelligence Di Tempat Kerja*, (Alih Bahasa Dahlan) Jakarta: Pustaka Delapratasa.

- Pasiak, T., 2003. *Revolusi IQ, EQ, dan SQ, Antara Neurosains dan Al-Quran*, Bandung: Mizan.
- Raven, J.C., 1972. *Guide to The Standard Progressive Matrices*, (Salinan Fakultas Psikologi UGM) Yogyakarta: UGM.
- Santoso, S., 2001. *SPSS Versi 10, Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Jakarta Media Komputindo.
- Search, dkk, 1994. *Psikologi Sosial*, (terjemahan Adriyanto), Jakarta: Erlangga.
- Sudjana, N., 1988. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru.
- Tischler, B., & McKeage, R., 2002. Linking emotional intelligence, spirituality and Workplace Performance, *Journal of Managerial Psychology*, Vol. 17, 3.
- Vernon, P.E., 1973. *Intelligence and Cultural Environment*, London: Methuen & Cooperation LTD.
- Zohar, M., & Marshall, I., 2000. *Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence*, London: Blumsburry Publishing, Inc.

SIA DALAM PERSPEKTIF *AGENCY THEORY*

Ahmad Fahrudin Alamsyah

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Abstract

Since agency theory was found in 1970th by accountancy experts in the United States, the reliability of accountancy role as information media for people outside company was questioned. Agency theory explaining risk problem between principals and agents resulting from cooperation between principals and agents frequently discusses the role of accounting information as relating media between both sides. The insight discrepancy between principals and agents and the information difference of agents make agents often report invalid (assimetris) information to earn expected advantages. This moral hazard urges the principals to implement controlling system to watch management behaviors as "amanah" holders.

Keywords: accounting information system, agency theory, principals, agents

A. Pendahuluan

Sejarah telah mencatat bahwa informasi merupakan hal yang penting bagi individu dan organisasi terutama dalam hal pengambilan keputusan. Mulai dari jaman bercocok tanam dan abad industri, masyarakat telah merasakan pentingnya informasi. Sekarang kita telah memasuki abad informasi dan informasi telah menjadi sumberdaya yang bernilai dan harus dikelola secara efektif mengingat cepatnya perubahan lingkungan yang terjadi.

Tulisan ini berupaya menengahkan suatu Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang menghubungkan dengan teori agensi. Bagian awal akan menengahkan definisi dan mengenai munculnya teori agensi serta asumsi-asumsi yang terdapat didalamnya, dan biaya agensi, kemudian dilanjutkan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi, pengertian sistem informasi akuntansi, komputer dalam sistem informasi akuntansi, dan peran

sistem informasi akuntansi bagi manajemen. Inti tulisan ini adalah sistem informasi akuntansi dalam perspektif teori agensi.

B. Teori Agensi

1. Pengertian dan Sebab Kemunculannya

Paper mengenai penerapan *agency theory* pertama kali diungkapkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Hubungan keagenan yang muncul akibat satu atau lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya mendelegasikan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks hubungan ini muncul antara:

- a. Pemegang saham (*shareholders*) dan para manajer.
- b. Pemegang saham dengan kreditor (*bondholders* atau pemegang obligasi).

Jadi, jika diartikan secara sempit, suatu hubungan *agency* adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (pelaku utama) mengajak orang lain (agen) untuk menjalankan beberapa jasa (*service*) atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan.

Spencer dan Zeckhauser (1971) dan Ross (1973) memberikan analisis formal dari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan strukturisasi kompensasi dari agen untuk mengatur insentifnya dengan kepentingan dari pelaku utama. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan *agency* yang timbul dari konflik-konflik atas kepentingan adalah umum pada dasarnya bagi semua aktivitas yang bersifat kerjasama diantara individu-individu yang memiliki kepentingan sendiri baik aktivitas itu terjadi atau tidak terjadi dalam gaya hirarki yang dianjurkan oleh analogi agen utama.

Jensen dan Meckling mengartikan biaya-biaya *agency* sebagai jumlah biaya-biaya strukturisasi kontrak-kontrak (formal dan informal): memonitor pengeluaran-pengeluaran oleh pelaku utama, pengeluaran-

pengeluaran surat obligasi (bond) oleh agen, dan kerugian residual. Kerugian residual adalah biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang berhubungan dengan perusahaan dalam aktivitas-aktivitas nyata yang terjadi karena tidak membayar untuk menguasai semua kontrak dengan sempurna. Mereka menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan kontrak membuat peramalan yang rasional tentang aktivitas-aktivitas yang harus dipenuhi dan struktur kontrak-kontrak untuk memudahkan aktivitas-aktivitas tersebut. Pada saat kontrak-kontrak tersebut dirundingkan, tindakan-tindakan yang dimotivasi dengan insentif yang terbentuk melalui kontrak-kontrak tersebut diantisipasi dan dicerminkan dalam harga-harga dan lamanya kontrak. Sehingga, biaya-biaya *agency* dari hubungan apapun dimunculkan oleh pihak-pihak terhadap hubungan kontrak. Hal ini berarti bahwa beberapa individu selalu dapat beruntung dengan menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk mengurangnya. Jensen dan Meckling menggunakan kerangka-kerangka *agency* untuk menganalisis resolusi konflik-konflik kepentingan antara pemegang saham, para manajer, dan pemegang obligasi dari perusahaan tersebut.

Perkembangan dari suatu teori struktur kontrak optimal dalam suatu perusahaan melibatkan pembentukan teori umum perusahaan. Jensen (1983) menjelaskan peran dari teori *agency* dalam usaha tersebut. Fama (1980), Fama dan Jensen (1983) menganalisis sifat dari permintaan residual dan pemisahan manajemen dan penanggungungan resiko dalam perusahaan dan dalam bentuk-bentuk organisasi lainnya. Mereka memberikan suatu teori yang berdasarkan pertukaran (*trade-off*) pembagian resiko dan keuntungan-keuntungan lain dari bentuk perusahaan dengan biaya-biaya *agency* untuk menjelaskan kelangsungan hidup bentuk perusahaan dalam aktivitas-aktivitas skala besar, non keuangan yang kompleks. Mereka juga menjelaskan kelangsungan dari kepemilikan, persekutuan, kerjasama, dan non laba dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Karena karakteristik primer membedakan diantara bentuk-bentuk organisasional ini merupakan sifat dari residual dan permintaan ekuitas mereka.

2. Biaya Agensi

Konflik-konflik kepentingan timbul diantara para pemegang saham umum, pemegang surat obligasi (bond), dan para manajer karena keputusan investasi dan pendanaan dari perusahaan tersebut. Mereka menyatakan bahwa dengan memandang permasalahan struktur keuangan sebagai satu yang menentukan kuantitas optimal dari hutang *versus* ekuitas adalah terlalu sempit. Lebih umum lagi permasalahan yang melibatkan penentuan struktur kepemilikan optimal dari perusahaan termasuk kuantitas relatif dari hutang dan ekuitas yang dimiliki para manajer dan pihak luar dan juga perincian hutang (jangka pendek, jangka panjang publik, swasta; dapat dirubah (*convertible*); dapat diadakan (*callable*); dan perjanjian-perjanjian yang terkait) dan ekuitas (saham umum dengan pemindahan hak milik tidak terbatas atau terbatas, alokasi hak-hak memilih, saham istimewa, jaminan, dan lain-lain).

Pada tingkat yang paling umum, permasalahan struktur modal melibatkan determinasi bersama dari keseluruhan set kontrak diantara pemegang saham, pemegang obligasi, dan para manajer dan juga agen-agen lain dalam hubungan kontrak-kontrak termasuk para pelanggan, para pekerja, yang menyewakan, yang menjamin, dan lain-lain.

Myers (1977) menguji suatu aspek khusus dari biaya-biaya hutang *agency*, permasalahan investasi yang kurang (*underinvestment*). Analisisnya memperlihatkan bahwa dengan permintaan yang tetap (*fixed*) dalam struktur modal perusahaan, modal perusahaan, maka para pemegang saham dapat memiliki insentif untuk menolak proyek-proyek dengan nilai sekarang bersih (*net present value*) yang positif. Smith dan Warner (1979) memberikan suatu analisis terperinci dari *monitoring* dan *bonding* teknologi untuk pengendalian dari konflik kepentingan antara pemegang obligasi dan para pemegang saham, dengan memperlihatkan bagaimana kontrak-kontrak obligasi yang diamati harus bervariasi dalam tanggapannya terhadap permasalahan-permasalahan *agency* ini. Smith dan Watts (1982) menguji kontrol konflik antara para pemegang saham dan para manajer. Mereka menganalisis struktur kontrak-kontrak kompensasi manajemen yang memfokuskan pada *trade off* antara gaji, pilihan-pilihan saham, saham terbatas, rencana-rencana bonus, dan jenis-jenis lain kompensasi

yang sering diamati ini. Myers dan Smith (1982) menganalisis pembelian asuransi perusahaan dan menyatakan bahwa kontrak-kontrak asuransi menghasilkan suatu alokasi yang efisien dari penanggungan resiko dan memberikan administrasi tagihan yang efisien dari penanggungan resiko dan memberikan administrasi tagihan yang efisien terhadap perusahaan tersebut.

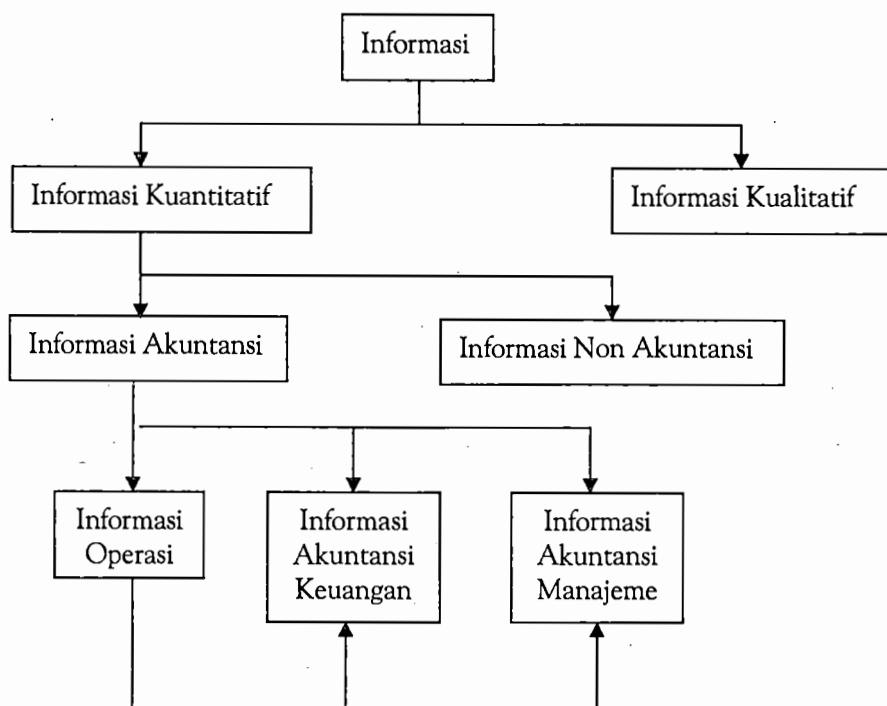
C. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1. Akuntansi Sebagai Sistem Informasi

Setiap kegiatan perusahaan menerapkan akuntansi sebagai alat komunikasi. Tujuan akhir dari kegiatan akuntansi adalah penerbitan laporan keuangan, dan laporan keuangan yang dihasilkan tersebut merupakan suatu informasi. Dengan demikian akuntansi itu sendiri baik dilakukan secara manual maupun dilaksanakan berdasarkan komputer tetap merupakan suatu sistem informasi.

Akuntansi dan sistem informasi sangat berkaitan erat karena pada hakekatnya, akuntansi merupakan sistem informasi dan merupakan penerapan teori umum informasi terhadap masalah operasi yang ekonomik dan efisien. Akuntansi juga membentuk sebagian besar informasi umum yang dinyatakan secara kuantitatif. Dalam konteks ini, akuntansi menjadi bagian dari sistem informasi umum dari suatu kesatuan yang beroperasi sekaligus menjadi bagian dari suatu bidang dasar yang dibatasi oleh konsep informasi (Wilkinson, 1988:12). Kaitan yang begitu erat ini juga tercermin dalam penggunaan istilah sistem informasi akuntansi yang tersebar luas. Adanya pertumbuhan organisasi modern yang lebih kompleks dan persaingan pasar yang lebih ketat, membuat peranan akuntansi lebih meningkat.

Gambar .1. Berbagai Tipe Informasi



Sumber : Supriyono, 1983 :3

Banyak tipe informasi yang diperlukan oleh manajer untuk mengurangi ketidakpastian dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berbagai tipe informasi yang kemungkinan diperlukan oleh pengambil keputusan dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 1.

Dengan demikian jelas bahwa akuntansi merupakan suatu bahasa bisnis. Sebagai suatu bahasa, akuntansi merupakan alat untuk berfikir manajer dalam bisnis dan untuk mengkomunikasikan pikiran-pikiran bisnis manajer kepada bawahan dan atasannya, kepada manajer lain, dan kepada pihak luar (Mulyadi, 1993:13).

2. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Bodnar dan Hopwood (1996:1) sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan,

yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. SIA mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi.

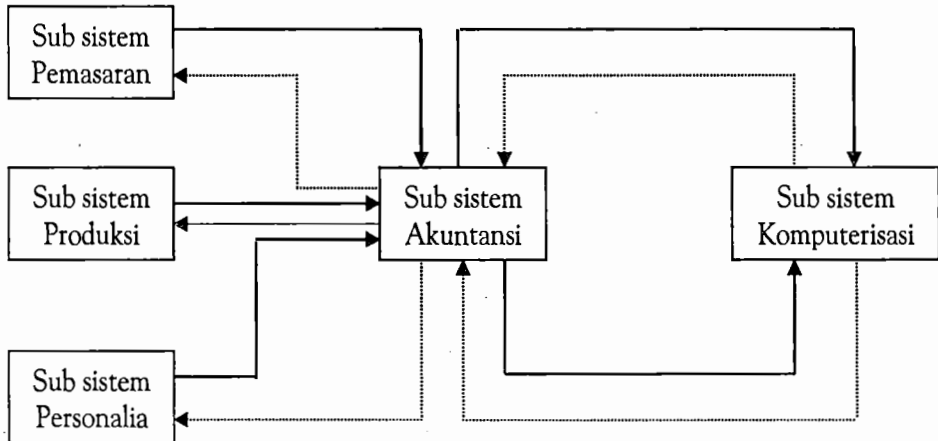
Dengan perkembangan teknologi yang pesat, maka istilah sistem informasi akuntansi meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai. Berkaitan dengan penggunaan komputer dalam pemrosesan data, maka sistem informasi didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi. Tetapi istilah sistem informasi akuntansi lebih luas dari itu guna mencakup siklus-siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. (Bodnar dan Hopwood, 1996:6).

Dengan diterapkannya komputer pada sistem informasi akuntansi, maka akan terjadi beberapa perubahan di dalam sistem. Apabila penerapan komputer sudah penuh dan cara manual benar-benar ditinggalkan, maka akan terjadi perubahan dalam hal struktur organisasi, simpanan data, pemrosesan volume data besar yang rutin, perubahan ketersediaan informasi, pengendalian intern, dan penelusuran akuntan (Jogiyanto, 1988:50-52).

3. Komputer Dalam Sistem Informasi Akuntansi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa sistem informasi akuntansi merupakan salah satu sub sistem dalam suatu perusahaan. Di pihak lain, kehadiran komputer dalam perusahaan tentu saja akan membentuk sub sistem tersendiri yaitu sub sistem komputer. Dengan adanya sub sistem komputer tersebut, maka antara sistem informasi akuntansi dan sub sistem komputer akan berinteraksi dan membentuk suatu jaringan komunikasi pengolahan data dan pendistribusian hasilnya. Hal ini dapat ditunjukkan dalam gambar 2 sebagaimana dibawah ini:

Gambar .2.



Sumber : Wirakusumah, 1987:10

————— = arus data
..... = arus informasi

Apabila suatu perusahaan membentuk suatu sub sistem komputer, maka sub sistem ini dapat mengambil alih aktivitas-aktivitas pengolahan data yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Sebelum komputer dapat mengolah data keuangan, sistem informasi akuntansi masih harus tetap menghimpun dan mengklasifikasikan data transaksi sehingga data ini dapat diolah oleh komputer.

4. Peran Sistem Informasi Akuntansi Bagi Manajemen

Sistem informasi akuntansi sekarang ini tidak hanya sebagai pengumpul data, mengolahnya menjadi informasi berupa laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi mempunyai peran yang penting di dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumberdaya, dan pengukuran atau pengendalian. Laporan-laporan dari sistem informasi akuntansi akan memberikan kepada manajemen mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi untuk menjadi suatu bukti yang berguna dalam menentukan keputusan yang diambil. Horngren (1980:10) mengatakan bahwa akuntansi akan dapat menyediakan tiga macam tipe informasi yang memiliki arti

yang berbeda untuk tingkatan manajemen yang bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Pengumpulan data.* Aspek dari akuntansi ini memungkinkan baik pihak intern maupun ekstern untuk mengevaluasi kinerja dan posisi organisasi.
- b. *Pengarahan perhatian.* Pelaporan dan interpretasi dari informasi ini akan membantu manajemen untuk memusatkan perhatian pada masalah-masalah operasi, ketidakberesan, ketidakefisienan, dan kesempatan-kesempatan. Aspek-aspek akuntansi ini akan membantu manajemen untuk melibatkan dirinya dengan aspek-aspek operasi penting guna melakukan tindakan efektif yang tepat melalui perencanaan yang cerdas atau melalui pengawasan harian yang tajam. Informasi ini biasanya dihubungkan dengan perencanaan dan pengendalian jangka pendek dengan analisis dan investigasi terhadap laporan internal akuntansi yang sifatnya rutin.
- c. *Pemecahan masalah.* Aspek akuntansi ini melibatkan perhitungan-perhitungan yang tepat dari hasil-hasil relatif terhadap cara-cara yang memungkinkan tindakan yang diambil, biasanya dengan rekomendasi mengenai prosedur yang terbaik. Pemecahan masalah biasanya dihubungkan dengan keputusan yang tidak berulang, situasi yang memerlukan analisis atau laporan-laporan akuntansi khusus.

Sistem informasi akuntansi menyiapkan informasi bagi manajemen dengan melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua sumber data yang diterimanya. Manajemen organisasi perusahaan menerima informasi ini dan memanfaatkannya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Keputusan manajemen sebaiknya akan mempengaruhi proses operasi intern organisasi perusahaan termasuk sistem informasi akuntansi dan juga mempengaruhi hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen, mendapat dua peran penting dari sistem informasi akuntansi yaitu: (1) informasi akuntansi sering memberikan dorongan kepada pengambil keputusan bagi manajemen dengan menunjukkan adanya

suatu situasi yang mendukung tindakan manajemen. (2) informasi akuntansi sering memberikan suatu dasar untuk mengadakan pilihan antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dilakukan (Cushing, 1983:10).

Dalam menghadapi globalisasi dan persaingan yang makin ketat, maka manajemen perlu memiliki sistem informasi yang strategik. Sistem informasi strategik merupakan sistem informasi dimana fungsi utama dari sistem baik proses pendefinisian transaksi dan membuat laporan dengan format yang baku tepat pada waktunya atau kemampuan dalam menganalisis dan memenuhi permintaan pelanggan terutama penggunaan sistem informasi strategik untuk mendukung atau menentukan strategi kompetisi perusahaan untuk memenangkan atau mempertahankan keunggulan bersaing atau mengurangi keunggulan lawan (Frenzel, 1996:40).

Walaupun kepentingan pemilik dan kreditor tercover dalam informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi, tetapi SIA dengan informasi yang dihasilkan tetaplah menekankan (lebih terfokus) pada kepentingan manajer sebagai pengelola. Namun demikian, keberadaan SIA dalam perusahaan tetap berusaha untuk mengakomodasi kepentingan pemilik dan juga kreditor maupun investor.

D. SIA dalam Perspektif Teori Agensi

Sejak ditemukannya *agency theory* pada tahun 1970-an oleh para pakar akuntansi di Amerika Serikat, maka peran akuntansi sebagai media informasi untuk pihak yang berada diluar perusahaan dipertanyakan reliabilitasnya. Teori agensi yang menjelaskan problem resiko bersama yang timbul dari kooperasi dari antara dua pihak telah banyak membahas bagaimana peran informasi akuntansi sebagai media hubungan kedua belah pihak (Jensen dan Meckling, 1976). Eisenhardt (1989) mengemukakan bahwa problem yang timbul dari hubungan kerja antara dua pihak pemberi kerja (prinsipal) dan manajemen (agen) disebabkan dua hal: pertama, keterbatasan pihak pemberi kerja atau pemilik untuk memperoleh informasi dari pemegang pekerjaan atau manajemen setiap saat yang dikehendaki oleh pemilik; kedua,

sikap yang berbeda antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen) dalam menghadapi dan menerima resiko.

Manajemen sebagai pihak yang diberi tugas untuk menjalankan dana dari pemilik harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Di lain pihak prinsipal sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas, baik finansial maupun non finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan prinsipal untuk memberikan insentif pada agen. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung resiko (Eisenhardt, 1988). Agen yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh tidak akan memberikan seluruh informasi itu untuk prinsipal. Sebaliknya prinsipal yang memerlukan informasi atas kepemilikannya tetapi akses pada informasi internal perusahaan terbatas akan meminta manajemen memberikan informasi selengkapnyanya. Keinginan prinsipal tersebut pada umumnya sangat sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor, seperti biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi, dsb. Produk dari ketidak adanya keharmonisan antara agen dan prinsipal ini adalah timbulnya ketidak seimbangan informasi (*information asymmetry*), dimana agen memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan atau tugas-tugas yang harus dikerjakannya dibanding prinsipal, sehingga dapat dikatakan bahwa agen memiliki informasi privat yang tidak diketahui oleh prinsipal.

Kondisi yang diakibatkan oleh hubungan agen dan prinsipal seperti ini menimbulkan pertanyaan besar tentang makna informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 yaitu memberikan informasi yang bermanfaat (*useful*) dalam rangka membantu pengguna untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang rasional menjadi perlu dikaji lebih lanjut; apakah informasi yang disajikan oleh agen (manajemen) tersebut memang betul-betul bermanfaat dan dapat dipercaya. Pertanyaan ini sangat relevan mengingat bahwa berdasarkan beberapa penelitian (Ou

dan Penman, 1989, Penman, 1991, Ou, 1996) menunjukkan kegunaannya atas manfaat informasi akuntansi. Sangat mungkin hal ini disebabkan oleh adanya rekayasa agen dalam menghindari resiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuannya menyajikan kinerja yang baik pada prinsipal. Prinsipal sendiri tidak punya otoritas yang luas untuk akses pada informasi langsung pada perusahaannya. Tidak perlu diragukan lagi bahwa proses penyajian laporan keuangan untuk prinsipal sangat dimungkinkan dipenuhi dengan model *window dressing*. Pemilihan metode akuntansi seperti FIFO dan LIFO untuk penilaian persediaan, metode garis lurus dan jumlah angka tahun untuk menentukan jumlah penyusutan, *aging schedule* dan presentase dari penjualan kredit untuk penghapusan piutang dan masih banyak lagi cara-cara *window dressing* yang dihalalkan. Belum lagi transaksi *off-balance sheet*, seperti *leasing* dan *contingent liabilities* (Donegan dan Sunder, 1989).

Dalam kondisi semacam ini sangatlah mungkin adanya konflik yang terjadi antar pemilik dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Ada asumsi yang mengemukakan sifat dasar manusia (tentunya manusia dunia barat); pertama, manusia pada umumnya *self interest* yaitu mementingkan diri sendiri dan tidak mau berkorban demi orang lain. Kedua, manusia mempunyai pikiran yang terbatas atas persepsi masa yang akan datang atau dengan istilah *agency theory* adalah *bounded rationality*, ketiga, manusia selalu menghindari resiko yang menimpa dirinya sendiri walaupun atas *cost* orang lain (Eishardt, 1989). Ketiga sifat ini menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

Adanya realitas empiris tersebut, maka pertanyaan yang lebih konseptual adalah tentang informasi akuntansi yang disajikan manajemen untuk prinsipal: apakah informasi akuntansi yang bersifat keuangan ini bisa memberikan makna sebagai pertanggungjawaban si penerima amanah pada pemberi amanah/principal? Dalam konsep *agency theory*; pertanggungjawaban yang benar atas operasi manajemen terhadap prinsipal sangat diragukan. Ditunjuknya auditor eksternal untuk memberikan pendapat pada laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen adalah petunjuk nyata bahwa ada keinginan besar pada manajemen untuk bersifat jujur

dan obyektif pada penyajian informasi. Pertanggungjawaban keuangan untuk pemilik dari pihak lain yang terkait. Dengan konsepsi seperti ini, sangat masuk akal bahwa informasi akuntansi diragukan oleh banyak peneliti tentang manfaatnya. Karena konteks dari informasi dan proses penyusunannya sudah diragukan reliabilitasnya.

Adanya perbedaan preferensi antara prinsipal dan agen dan juga informasi privat yang dimiliki oleh agen memungkinkan bagi agen untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, guna memperoleh beberapa keuntungan yang diharapkan. Tindakan *moral hazard* ini mendorong prinsipal untuk memberlakukan sistem pengendalian agar mereka dapat mengontrol tindakan manajemen.

E. Penutup

Lahirnya *agency theory* itu sendiri sebetulnya merupakan cubitan yang pedas atas komunitas akuntansi. Ketidakpercayaan atas informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan tersebut mulai timbul awal 1970-an ketika akademisi mulai mempertanyakan validitas dan reliabilitas informasi akuntansi. Ditinjau dari sudut sejarah akuntansi, akuntansi tumbuh dari berbagai fenomena agama-agama besar seperti Islam dan Katolik. Sumbangan agama terhadap akuntansi menunjukkan betapa akuntansi seharusnya menjadi informasi yang dapat dipercaya dan sekarang telah berubah menjadi media yang menguburkan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, George H. dan Hopwood, William E., 1996. *Sistem Informasi Akuntansi*, Terjemahan Amir Abadi Jusuf. Buku satu. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Cushing, Barry E., 1983. *Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan*, Edisi ketiga. Alih bahasa oleh Ruchyat Kosasih. Penerbit Erlangga, Surabaya.
- Eisenhardt, Kathleen M., 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy Management Review*.
- Frenzel, Carrol W., 1980. *Management of Information Technology*, Second Edition, Boyd and Freser Publ. Co, USA.
- Horngren, Charles T., 1980. *Introduction to Management Accounting*, Fourth Edition. Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi.
- Jensen, Michael C. dan Meckling, W.H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure, *Journal of Finance and Economics*, 3.
- Jogiyanto, H.M., 1988. *Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Konsep Dasardan Komponen*, Buku 1. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Kelly, Lauren, 1987. The Development of a Positive Theory of Corporate Management's Role in Ekternal Financial Reporting, *Accounting Theory and Policy*, Edited by Robert Bloom and Pieter T. Elgerts. Second edition.
- Machfoedz, Mas'ud, 1997. Akuntansi True Reward Systems dan Media Pertanggungjawaban Pada Tuhan, *Makalah Kuliah Tamu*.
- Mulyadi, 1993. *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, Rekayasa*, Bagian satu, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Ross and Zimmerman J.I., 1987. Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standarts, *Accounting Theory and Policy*, Edited by Robert Bloom and Pieter T. Elgerts. Second edition.
- Supriyono, 1989. *Akuntansi Manajemen: Struktur Pengendalian Manajemen*, Jilid 2, BPFE UGM dan STIE YKPN, Yogyakarta.

Smith Jr, Clifford W., 1990. *The Modern Theory of Corporate Finance*, Second edition.

Wirakusumah, Arifin, 1987. Sistem Informasi Akuntansi, *Majalah Akuntansi* NO.4. April 1987.

Wilkinson, Joseph W., 1988. *Sistem Akuntansi dan Informasi*, Terjemahan Marianus Sinaga, Edisi kedua. Jilid 1. Penerbit Erlangga, Surabaya.

Zimmerman, Jerold L., 1987. Positive Research in Accounting, , *Accounting Theory and Policy*, Edited by Robert Bloom and Pieter T. Elgerts. Second edition.

INSTITUSI PERSAUDARAAN SUFI

Abdul Malik

Abstract

Change of the personal mysticism to be an institute or league related from the development and spreading of the mysticism itself. Therefore by the dissemination of the mysticism invited many more people wanted to learn about the mysticism (tasawuf). Beside that they also met the knowledgeable and experienced people in mysticism which guided them. How ever, learning with the teaching method that was arranged base on experience of a practical science was a must, because of those two significances, the tasawuf / mysticism teacher formulated a learning tasawuf system based on his experience himself. Therefore, that learning system was a distinctive feature of this institution which differenciated from other institutions. By that simplest methode, a suficmystic relationship was developing between teacher and student, then the students wanted to keep the teacher's doctrine. Consequently, it created a distinctive style of this relationship transforming their scientific. So, this short papper will conferred about what kind of institution transforming their scientific

Keywords : *sufi, institution, transformation, teacher, student*

A. Pendahuluan

Peralihan tasawuf yang bersifat personal menjadi sebuah lembaga tidak terlepas dari perkembangan dan perluasan tasawuf itu sendiri. Dengan semakin luasnya pengaruh tasawuf itu, semakin banyak orang yang berhasrat mempelajari tasawuf. Untuk itulah mereka menemui orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam pengalaman tasawuf yang dapat menuntun mereka, sebab belajar dari seorang guru dengan metode mengajar yang disusun berdasarkan pengalaman dalam suatu ilmu yang bersifat praktikal adalah suatu keharusan. Oleh karena bertemunya dua kepentingan itulah, kemudian seorang guru tasawuf memformulasikan suatu sistem pengajaran tasawuf yang berdasarkan pengalamannya sendiri. Sistem

pengajaran itulah yang kemudian menjadi ciri khas bagi institusi ini yang membedakannya dari institusi yang lainnya.

Dari bentuk yang paling sederhana itu, persaudaraan sufi berkembang dari hubungan yang terjadi antara syaikh dan muridnya, kemudian muncul keinginan dari para muridnya untuk melestarikan ajaran syaikhnya sehingga menimbulkan gaya tersendiri dari persaudaraan ini dalam menstransformasikan keilmuwan mereka. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana bentuk institusi tasaawuf dalam menstransformasikan keilmuwan mereka.

B. Sejarah Munculnya Persaudaraan Sufi

Sebelum dibahas tentang karakteristik institusi sufi ini, maka perlu juga diketengahkan bagaimana awal mula persaudaraan ini muncul sehingga akan dapat dimaklumi mengapa mereka (persaudaraan ini) mempunyai inisiatif membentuk sebuah institusi.

Term sufi sebenarnya baru dikenal pada penghujung abad II H, sebagai perkembangan lanjut dari kesalehan asketis atau para zahid yang mengelompok di serambi mesjid Medinah. Dalam perjalanan kehidupan kelompok ini lebih menghususkan untuk beribadah dan mengembangkan kehidupan rohaniah dengan mengabaikan kenikmatan duniawi. Mungkin jika disebut secara kasar, maka kelompok ini merupakan oposisi dari pemerintah yang gila akan kehidupan duniawi.

Secara garis besar ada 3 faktor yang menimbulkan gerakan para sufi ini muncul. (1) adalah karena corak kehidupan yang *profan* dan hidup kepelisiran yang diperagakan oleh umat Islam terutama para pembesar negeri dan para hartawan. Dari aspek ini, dorongan yang paling deras adalah sebagai reaksi terhadap sikap glamour dari kelompok elit dinasti penguasa. Protes tersamar ini mereka lakukan dengan gaya murni etis, pendalaman kehidupan spiritual dengan *motivasi etikal*. Kelompok ini sebenarnya ingin menjadi kelompok yang netral, namun belakangan para sarjana Barat menyebutnya sebagai oposisi ulama Madinah. (lihat Montgomery Watt, 1985:37) (2) timbulnya sikap apatis sebagai reaksi maksimal kepada radikalisme kaum khawarij dan polarisasi politik yang ditimbulkannya.

Kekerasan pergulatan politik pada masa itu, menyebabkan orang-orang yang ingin mempertahankan kesalehan dan ketenangan rohaniyah, terpaksa mengambil sikap menjauhi kehidupan masyarakat ramai untuk menyepi dan sekaligus menghindarkan diri dari keterlibatan langsung dalam pertentangan politik. Sikap demikian melahirkan ajaran '*uzlah* yang dipelopori oleh Surri al-Saqathi (w.253 H). (3) adalah karena corak kodifikasi hukum Islam dan perumusan ilmu kalam yang rasional sehingga kurang bermotivasi etikal yang menyebabkan kehilangan moralitasnya, menjadi semacam wahana tiada isi atau semacam bentuk tanpa jiwa. Formalitas paham keagamaan dirasakan semakin kering dan menyedihkan *ruh al-Din* yang menyebabkan terputusnya komunikasi langsung suasana keakraban personal antara hamba dan penciptanya. Kondisi hukum dan teologi yang kering tanpa jiwa itu, karena dominasinya posisi moral dalam agama, para *zuhhad* tergugah untuk mencurahkan perhatian terhadap moralitas, sehingga memacu pergeseran asketisme kesalehan kepada tasawuf. Doktrin *al-Zuhd* misalnya, yang tadinya sebagai dorongan untuk meningkatkan ibadah semata-mata karena takut siksa neraka, bergeser kepada demi kecintaan dan semata-mata karena Allah agar selalu dapat berkomunikasi dengan-Nya. Konsep *tawakal* yang tadinya berkonotasi kesalehan yang etis, kemudian secara diametral dihadapkan kepada pengingkaran kehidupan yang *profanistik* disatu pihak dan konsep sentral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yang kemudian populer dengan doktrin *al-Hubb*. Doktrin *al-Hubb* merupakan tingkat akhir sebelum *ma'rifat* yang berarti mengenal Allah secara langsung melalui pandangan batin. (Rivay Siregar, 2000:40) Menurut sebagian sufi, *ma'rifat* Allah adalah tujuan akhir dan sekaligus merupakan tingkat kebahagiaan paripurna yang mungkin dicapai oleh manusia didunia ini.

C. Terbentuknya Sebuah Institusi Persaudaraan Sufi

Begitulah upaya para sufi untuk mendapatkan jenjang-jenjang yang menurut mereka harus didapatkan. Untuk mempermudah proses itu, sebagian para sufi mempunyai ide untuk membangun sebuah lembaga yang dirasakan perlu dalam mentransmisikan keilmuwan mereka, selain itu juga

lembaga ini akan bermanfaat untuk melestarikan ajaran-ajaran dari para guru terdahulunya. Lembaga-lembaga ini memiliki nama yang khas sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalnya *Ribat*, *Khanaqah* serta *Zawiyah*.

Lembaga ini menjadi pusat latihan bagi para murid yang belajar ke tariqat tertentu, bagaikan sebuah asrama yang didirikan untuk menampung para muridnya. Sifat sufisme adalah evolusioner, untuk itu suatu lembaga sufi niscaya tidak mungkin mengambil suatu bentuk permanen yang kaku. Di tempat-tempat tertentu dan dibawah guru-guru individual, sekolah-sekolah muncul dan melaksanakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kebutuhan manusia terhadap penyempurnaan pribadi. Sekolah-sekolah (seperti sekolah *Rumi* dan *Data Ganj Bakhsh*, sebagai contoh) menarik minat banyak orang yang bukan Muslim, meskipun sekolah-sekolah sufi sejak kemunculan Islam, selalu dipimpin oleh orang-orang yang berasal dari tradisi muslim.

Memang jika dilihat dari sejarahnya, sufisme telah mencapai usia dewasanya sebagai sebuah gerakan sosial, dan benar-benar telah mengembangkan sebuah metafisika sufi dan mengintegrasikan pemikiran dan praktik sufi dengan bentuk lain dari keyakinan dan peribadatan Islam. Sejak awal pertumbuhannya hingga pertengahan abad ke-sepuluh kaum sufi telah mencapai identitas yang koheren sebagai satu diantara kelompok Muslim yang mencari kebenaran Islam. Meskipun sufisme benar-benar bersifat individual, tempat-tempat pertemuan kaum Sufi memberi mereka sebuah identitas kolektif. *Ribaths* yang semula merupakan tempat tinggal bagi prajurit Muslim yang berjaga-jaga di wilayah perbatasan dengan imperium Bizantium di Afrika Utara; di perbatasan Iran Timur mereka menampung prajurit sukarelawan untuk jihad (perang suci). Dalam modelnya di wilayah perbatasan tersebut, *ribaths* serupa dengan tempat-tempat pertemuan sebagaimana yang terdapat di Abadan, Damascus, dan Ramla pada pertengahan abad kedelapan. Sebagai tiruan terhadap tradisi kependetaan Kristen, terdapat sejumlah gua sebagai tempat pertemuan sufi di khurasan. Namun, perlu diketahui bahwa para Sufi sendiri sama sekali tidak pernah menganggap dirinya bertujuan menjalankan suatu tugas, yaitu tugas mentransendentalkan bentuk-bentuk lahiriyah dan fakta keagamaan yang lain atau pemerolehan pengetahuan agama lain dengan menjalankan tugas

tersebut. Mungkin sulit untuk menjelaskan dengan istilah yang lebih sederhana dari agama formal bahwa pengalaman mistik adalah tunggal. Bahwa ada kesamaan yang lestari. Paling tidak orang hanya dapat memahami fakta tersebut menurut pengertian yang lazim, karena fakta pengalaman sufi dan aliran mistik yang lainnya bidang kajiannya adalah psikologi, bukan bidang akademis. (Idries Shah, 2000:481)

Term *khanaqah* sendiri muncul pada akhir abad ke-9 dan digunakan secara luas untuk pengertian tempat tinggal sufi di Khurasan dan Transaxonia. Kata tersebut digunakan untuk pemukiman orang-orang pendatang tanpa sebuah afiliasi bersama kepada seorang guru, tetapi *khanaqah* digunakan untuk tujuan yang bersifat sekteraiian oleh seorang tokoh mistik dan teologi Muhammad Ibn Karram (806-869). Dari *khanaqah* ini lantas para sufi menyusun aturan-aturan peribadatan dan sebuah kitab hukum perilaku dan mengatur hukum komunal *khanaqah*. (Perlu diketahui bahwa yang pertama kali menyusun aturan-aturan peribadatan itu adalah Abu Sa'id ibn Abi al-Khair (967-1049). (Lihat: Ira M Lapidus, 1999:258) Term yang sama digunakan di Mesir Tengah, dimana *khanaqah* dibentuk sebagai pusat budaya dan teologi dari para sufi. Pemerintah setempat memberikan subsidi bagi kemanfaatan pengaruh lembaga itu. Kata *zawiyah* (pojok), digunakan untuk unit yang lebih kecil, menyerupai tempat tinggal untuk menyepi (*solitair*) dari para Syaykh. Istilah ini juga dihubungkan dengan tapal batas istana para tentara yang didirikan oleh Islam, selain itu juga mengacu pada pusat dari sebuah persaudaraan. (Annemarie Schimmel, 1975:232)

Di Makkah sendiri term *zawiyah* atau *tekye* digunakan sebagai gedung pertemuan para pengikut tariqat disana, yang beberapa diantaranya dihuni banyak banyak pengikutnya. (Martin Van Bruinesen, 1995:33)

D. Para Sufi Menemukan Konsep Institusi

Demikianlah akhirnya, sebuah persaudaraan itu secara tidak langsung para sufi telah membuat sebuah sistem institusi, yaitu sistem institusi yang terbentuk secara spontan karena ada keinginan dari para muridnya untuk melestarikan ilmu guru terdahulunya. Sebagian para sufi yang menginginkan

sebuah transmisi keilmuan harus berupaya berguru pada seorang syaikh yang mumpuni dan dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya, artinya ilmu mereka haruslah bersambung dengan ilmu Rasulullah saw. Istilah bersambung ini kemudian dikenal dengan *silsilah*. *Silsilah* merupakan bentuk dari upaya dari para syaikh untuk memperoleh sebuah ilmu yang legal langsung dari Rasulullah, semacam pencarian sanad yang dilakukan oleh para ahli hadis. Menurut J. Spencer Trimingham, *silsilah* adalah mata rantai spiritual dalam tariqat yang bersambung kepada Nabi Muhammad saw hingga ke syaikh yang sekarang. Dengan keterikatannya pada *silsilah* inilah *murid* yang baru ditahbiskan punya sarana untuk menempuh dan melaksanakan perjalanan menuju Allah dibawah lindungan *ilahi*. (J. Spencer Trimingham, 1973:186).

Muhammad, dalam *silsilah* bagaikan kartu nama dan legitimasi seorang guru untuk menunjuk ke cabang tariqat mana ia termasuk dan bagaimana hubungannya dengan guru-guru tariqat lainnya. (Martin Van Bruinesen, 1998:48).

Idealnya, setiap guru yang tercantum dalam *silsilah* ini seharusnya mendapatkan ilmu dari Nabi saw melalui guru-guru sebelumnya. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian, kadang-kadang dua orang berurutan dalam *silsilah* dapat saja tidak pernah bertemu, karena yang pertama wafat sebelum kedua lahir atau karena mereka tinggal di negeri yang berjauhan sekali. Sebagian para ahli hadis menolak, karena menurut mereka hadis yang sanadnya terputus, tidak *muttasil* dinamai *munqati'* dan bila terputus sanadnya dua orang/rawi atau lebih berturut-turut, maka hadis itu dinamai *mu'dal*, karena itu hadisnya lemah (*daiif*) dan tidak dapat dijadikan hujjah. (Lihat: M. Ajjaj al-Khatib, 1989:339-340).

Sebagian sufi menolak *silsilah* semacam itu dan menganggapnya palsu, tetapi sebagian besar tidak menolak kemungkinan bahwa seorang *wali* menerima pelajaran dari guru yang mendahuluinya bukan lewat komunikasi secara langsung, tetapi lewat *komunikasi spiritual*, yaitu melalui pertemuan dengan wujud ruhaniyahnya. Dalam *silsilah*, hubungan demikian itu kadang-kadang disebut *barzakhi* atau *uwaisi*. (*Barzakhi*, karena pembaiatannya ternyata berasal dari alam barzakh, alam antara, yaitu tempat bersemayamnya ruh orang meninggal sebelum datangnya hari kebangkitan. Istilah

uwaisi berasal dari *uwais al-Qarani*, orang dari yaman yang sezaman dengan Nabi, dan tak pernah berjumpa ketika beliau masih hidup tetapi dipercaya telah diislamkan oleh Nabi setelah beliau wafat.

Untuk lebih berhati-hati lagi dalam mentransformasikan keilmuannya para sufi melakukan upacara *bay'ah*. *Bay'ah* merupakan ikrar atau ritus pentahbisan seorang *murid* masuk dalam suatu tariqat sufi. Layaknya seorang sarjana yang akan lulus dari sebuah institusi pendidikan. Ikrar ini sesungguhnya adalah ikrar antara Allah dan hamba-Nya, yang senantiasa mengikat sang *murshid* dan *murid* secara bersamaan. Di dalam *bay'ah* ini ada momen suci ketika energi spiritual (*barakah*) (*Barakah* merupakan kekuatan sufi untuk menembus secara batin signifikansi-nominal dari makna, *barakah* memiliki kualitas *magis*. Salah satu kualitas magis ini adalah, barang siapa yang diberi *barakah* maka ia telah diubah karena dampak dari orang ini secara spiritual tercurahkan. (Lihat: Shah:2000)

Dalam mata rantai spiritual (*silsilah*) dialirkan dari *murshid* kepada *murid*. Ini memungkinkan seorang *murid* untuk menempuh perjalanan dengan aman dan selamat di bawah perlindungan dan pertolongan *ilahi*. (Amstrong: 35)

Ada suatu interaksi ganda yang saling terkait dalam perjanjian tersebut, suatu hubungan berdasar perjanjian yang diresmikan melalui *bay'at* ini. Dalam konjungtur inilah seorang salik diperbolehkan menyebut dirinya sendiri sebagai murid. Telah berlaku pada semua tariqat bahwa seseorang hanya dapat menjadi anggota tariqat setelah melalui per-*bay'at*-an. Bentuk dari upacara tersebut bermacam-macam di tempat yang berbeda, tetapi seperti biasa kebanyakan ritus yang demikian menyangkut kematian dan kelahiran secara simbolik. Mula-mula sang *murid* harus melakukan taubat, yaitu dengan mengingat segala dosa di masa lampau, memohon pengampunan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi semua kebiasaan jelek yang diperbuatnya dulu. Pada bagian inti upacara itu, sang *murid* menyatakan sumpah setia kepada *syaiikh*-nya, setelah itu *murid* diperbolehkan turut serta dalam ritual-ritual bersama dalam tariqat itu. (Bruinesen, 1998)

Setelah melakukan *bay'ah*, maka calon sufi mendapatkan *ijazah* dari para *syaiikh*-nya. Layaknya seorang guru yang menggunakan metode dalam proses belajar mengajar, para sufi juga menerapkan metode yang dikenal

dengan *rabitah*. *Rabitah* adalah sebuah metode dari para sufi dalam mentransmisikan keilmuwan mereka. Hal ini mereka lakukan untuk melihat kemampuan murid yang belajar supaya mereka dapat menjalankan keilmuwan yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam realitasnya para *murid* yang belajar mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, ada yang harus dibimbing langsung oleh sang guru, ada juga yang langsung dibiarkan oleh sang guru untuk melakukan kontemplasi dalam ruangan khusus. Untuk itulah metode *rabitah* digunakan oleh para *murshid* kepada para muridnya terutama yang masih *awam* akan ilmu yang diajarkan para *murshid* tersebut, karena dalam metode ini para *murid* diharuskan menggambarkan (*visualization*) rupa sang guru hal itu menandakan bahwa murid harus dalam pengawasan sang guru. Jika dianalogkan dengan sistem pengajaran formal, maka siswa yang masih dalam pengawasan sang guru merupakan siswa yang *awam*, begitu juga dalam institusi ini. Dalam setiap tariqat sendiri mempunyai konsep *rabitah* yang bervariasi, namun *rabitah* seringkali muncul dalam bentuk seberkas cahaya yang memancar dari sang *murshid*.

Muhammad Amin al-Kurdi sendiri memberikan definisi bahwa *rabitah murshid* adalah menghadapkan hati murid kepada hati gurunya, dan menghadirkan rupa sang guru dalam imajinasinya walaupun secara fisik sang guru tidak hadir. Dengan asumsi bahwa hati sang guru itu ibarat sebuah pancuran yang melimpah dari lautan yang luas ke dalam hati murid yang *murabit*. Untuk menyauk berkah darinya, karena sang guru adalah mediator untuk sampai kepada Tuhan. (Muhammad Amin Kurdi, 1994:444).

Memang untuk dapat memahami hubungan antar guru dan murid dalam sufisme hanya dapat dipahami melalui sistem pengajarannya. Di satu sisi ajaran sufi berada diluar konsep ruang dan waktu. Hal ini sesuai dengan unsur dasar dalam sufisme, bahwa guru dan murid mempunyai status yang sama. Disisi lain ajaran sufi meliputi semua aspek kesadaran manusia yang terdiri dari pengalaman, kehidupan dan konsep benda-benda. Suatu bentuk interaksi yang khas menimbulkan suatu transformasi. Maka dari itu, hubungan tersebut pada dasarnya jauh melampaui ruang lingkup belajar mengajar formal. (Shah, 2000: 463).

Tujuan akhir dari institusi ini adalah ma'rifat kepada Allah untuk itu para murid diharuskan melakukan *Dhikr* (ingat) kepada Allah. *Dhikr*

merupakan amalan dasar dalam menempuh jalan sufi dan bisa dilakukan secara sendirian maupun bersama-sama. (Armstrong, *sufi*: 41)

Begitulah sistem yang digunakan persaudaraan ini, yang nampaknya banyak diadopsi oleh para pemerhati pendidikan dalam mengembangkan program pendidikan yang selama ini belum berhasil, misalnya sistem asrama yang sekarang menjadi trend dalam dunia pendidikan. Sistem itu tak lain adalah adopsi dari sistem *ribaths*, *kahanaqah* dan *zawiyah* yang dipakai oleh para sufi untuk menimba ilmu. *Wa Allah A'lam bi al-Sawab*.

E. Penutup

Perjalanan sufi yang pada mulanya bersifat individual akhirnya menjadi sebuah institusi melalui proses yang panjang dan melelahkan, karena ada ide dari sebagian murid untuk melestarikan ajaran para gurunya. Akhirnya terbentuklah sebuah institusi persaudaraan yang sangat unik. Keunikan ini mereka tampakkan dalam menstranformasikan ilmu mereka. Misalnya: dengan sistem *barakah* yang ternyata membuat para muridnya berupaya untuk memanfaatkan betul sistem ini. Mungkin bisa dikatakan bahwa *barakah* merupakan suatu siasat dari para guru agar para muridnya selalu taat pada mereka.

Namun, secara garis besar sistem yang ada dalam persaudaraan ini sangat unik dan perlu dikaji bahkan mungkin diadopsi kedalam sistem pendidikan yang modern jika perlu. Memang akhir-akhir banyak pemerhati pendidikan tampaknya juga banyak mengadopsi sistem kelembagaan ini, misalnya saja sistem asrama yang sekarang menjadi trend dikalangan dunia pendidikan sekarang. Sistem itu sebenarnya diadopsi dari institusi semisal *Ribaths*, *kahanaqah* ataupun *zawiyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, M. Ajaj. 1989. *Usul al-Hadith*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin Kurdi, Muhammad, 1994. *Tanwir al-Qulub Fi Mu'amalat 'Allam al-Ghuyub*. tt: Dar al-Fikr.
- Haeri, Fadhlala, 2000. *Jenang-Jenang Sufisme*, terj. Ibnu Burdah & Shohifullah. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Lapidus Ira, 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam* bagian I & II, terj. Ghufron A. Mas'adi Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Schimmel, Annemarie, 1975. *Mystical Dimensions Of Islam*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Shah, Idries. *Mahkota Sufi, Dunia Ekstra Dimensi*, terj. Hidayatullah & Roudlon. Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- Siregar, Rivay. 2000. *Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Trimingham, J. Spencer., 1973. *The Sufi Orders In Islam*. London: Oxford University Press.
- Van Bruinesen, Martin., 1995. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Van Bruinesen, Martin., 1998. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Watt, Montgomery., 1985. *Islamic Philosophy and Theology*. Edindburgh: Edindburgh University Press.

REAKTUALISASI SYARI'AH ISLAM

Zaenul Mahmudi

Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Abstract

As syari'ah, al-Qur'an is one of the sources of Islamic law and the living orientation for Muslim ummah in going through their life. Textual message of Islam (al-Qur'an) had stopped when Muhammad died. In other side, the growing up of the problems is faster than their solutions can be made. The problems grow up in line with globalization and information technology that offer some traditions and cultures that meet our different cultures and traditions. We can't create a new message of al-Qur'an but we can create methode of understanding to understand al-Qur'an in nowadays context. We need to use methodological tools from multidiscipline of science in understanding al-Qur'an in order to actualize spirit of al-Qur'an in Indonesian and nowadays context.

Keywords: *syari'ah, reactualization, islamic jurisprudence*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial yang berubah, diskursus tentang reaktualisasi syari'ah telah sering diwacanakan sebagai upaya menselaraskan ajaran Islam dengan perubahan zaman dan perubahan sosial. Dalam konteks Indonesia, pada tahun 90-an, Munawir Sadzali telah mewacanakan "kontekstualisasi ajaran Islam" dalam konteks keindonesiaan, khususnya dalam permasalahan pembagian warisan (Sjadzali, 1995). Dia menilai pembagian warisan yang ada dalam ketentuan fikih klasik perlu ada penyesuaian dengan kultur Indonesia. Menurutnya perlu ada ketentuan yang lebih fleksibel dengan kondisi para ahli waris. Namun wacana ini hanya tinggal wacana, karena tidak ada dukungan dari masyarakat.

Tidak adanya respon masyarakat terhadap wacana yang mengangkat budayanya sendiri sebagai dasar pijakan hukum menunjukkan bahwa "budaya" yang berkembang di Indonesia masih didominasi pemikiran fikih

yang dihasilkan oleh para ulama abad 8-10-an yang disokong penuh oleh tradisi pemikiran fikih pesantren. Masyarakat Indonesia belum memiliki keberanian dan merasa berat untuk meninggalkan pemikiran fikih yang dihasilkan oleh para ulama klasik. Padahal pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang dihasilkan sebagai respon terhadap kondisi sosial pada waktu itu yang kemungkinan sudah tidak sesuai lagi dengan konteks keindonesiaan dan kekinian.

Dalam fikih, banyak teori yang memberikan ruang terjadinya perubahan hukum ketika kondisi sosial juga berubah. Kaidah fikih "*al-hukm yadûru ma'a 'illatih wujudan wa 'adaman*" (hukum itu berubah berkesesuaian dengan ada dan tidaknya illah) dan "*taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwâl*" (perubahan hukum seiring dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi) ini memperkuat statemen tersebut. Di sisi lain, jargon yang mengatakan "*al-Islâm shâlih li kull zamân wa makân*" (Islam itu baik untuk segala zaman dan tempat) menuntut agar ajaran-ajaran Islam, termasuk ketentuan hukum fikih senantiasa disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan zaman. Oleh karena itu, pemikiran fikih sebagai hasil pemikiran manusia selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan sosial.

Tulisan ini berusaha mencermati aspek-aspek syari'ah sebagai upaya untuk mengaktualisasikannya di masyarakat dalam konteks keindonesiaan dan kekinian yang telah mengalami perubahan besar dari kondisi ketika formulasi hukum fikih dilakukan oleh para ulama klasik.

B. Kemutlakan Syari'ah dan Relativitas Fikih

Syari'ah berasal dari bahasa Arab *syari'ah* yang secara bahasa berarti sumber air atau tempat yang dilalui orang atau hewan untuk minum (Ibn Manzûr, t.th, 175). *Syari'ah* merupakan sinonim dan berakar kata sama dengan *syar'* yaitu *syar'a* yang berarti mengundangkan (*to enact laws*) (Wehr, 1976: 465-466). Secara terminologis, syari'ah adalah apa yang diledigisasikan oleh Allah kepada para hamba-Nya yang meliputi hukum *aqâ'id*iyah, *'amaliyyah* dan *khuluqiyyah* (Ismâ'îl, 1985: 7). Syari'ah merupakan dasar-dasar, keyakinan-keyakinan, pokok-pokok, aturan-aturan

politik, kemasyarakatan, ekonomi, pidana yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan pribadi dan sosial di muka bumi sesuai dengan kehendak-Nya (Sânu, 2000, 249).

Maksud aturan-aturan syari'ah hanya diketahui oleh Allah karena Dialah yang membuat dan mengundangkannya. Manusia bisa memahami aturan-aturan tersebut, namun kebenaran pemahamannya hanya sampai pada tingkat kebenaran relatif. Seseorang tidak berhak mengklaim pemahamannya terhadap syari'ah sebagai kebenaran Tuhan yang bersifat mutlak, karena klaim ini akan mengeliminasi pemahaman orang lain yang berbeda dengan pemahamannya. Setiap pemahaman orang terhadap syari'ah mempunyai peluang benar dan salah tergantung kepada kualitas intelektual mereka.

Syari'ah para rasul mempunyai tujuan yang sama untuk menegakkan agama, keadilan, dan mengajarkan ketauhidan, namun dalam tataran aplikatif, syariat yang diberikan kepada para rasul berbeda-beda, disesuaikan dengan adat dan kebiasaan setempat ketika itu untuk membimbing para umatnya (al-Fâsi, T.th.: 20). Aturan-aturan syari'ah tersebut tidak melakukan eliminasi terhadap semua tradisi yang mengakar di masyarakat.

Apabila diperhatikan, maka di dalam syari'ah-syari'ah tersebut terdapat prinsip perkembangan (*tathawwur*) dari syari'ah pertama hingga syari'ah terakhir dan terdapat prinsip fleksibilitas (*murûnah*) yang akomodatif dengan kondisi sosial budaya. Terhadap adat kebiasaan, pada satu sisi, syari'ah berperan menjustificasinya dengan prinsip syari'ah dan di sisi lain membatalkannya ketika adat kebiasaan tersebut bertentangan dengannya. Menurut Mohamed Taha, aturan-aturan syari'ah para nabi sebelum Muhammad mempunyai karakteristik yang berhadapan secara diametral. Syari'ah Yahudi dan syari'ah Nasrani, masing-masing menduduki ekstrimitas yang berlawanan. Mohamed Taha mencontohkan:

“Kamu sudah mendengar perkataan demikian: “Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku ini berkata kepadamu: “Jangan melawan orang yang jahat, melainkan barang siapa menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi yang sebelah lagi” (Matius 5: 38-39).

Ketentuan yang pertama merupakan syari'ah Yahudi yang keras dan tegas, sementara ketentuan yang kedua merupakan Syari'ah Nasrani yang lunak, bahkan memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan untuk melakukan kejahatan lagi (Taha, 1996: 121). Syari'ah Yahudi merupakan tesis, Syari'ah Nasrani menjadi antitesis, dan Syari'ah Islam sebagai sintesis antara kedua syari'ah tersebut (Cooper, 2000: 115). Syari'ah Islam mengakomodir kedua ketentuan tersebut; melakukan *qishas* merupakan kelaziman, namun yang lebih baik adalah memaafkan kesalahan orang lain, bukan membiarkan dia melakukan kejahatan lagi terhadap dirinya sebagaimana ketentuan syari'ah Nasrani (5: 45 dan 42: 40).

Selain sebagai penengah kedua ekstrimitas syari'ah, Syari'ah Islam merupakan penyempurna bagi syari'ah-syari'ah sebelumnya. Kesempurnaan syari'ah Islam terlihat dari karakteristiknya yang tidak dimiliki oleh syari'ah-syari'ah sebelumnya. *Pertama*, Syari'ah Islam bersifat universal dalam arti tidak dikhususkan untuk bangsa tertentu, tetapi untuk semua bangsa di dunia; *kedua*, tidak temporal yang hanya untuk masa tertentu saja dan *ketiga*, tidak terpengaruh dengan perubahan zaman karena Syari'ah Islam memuat prinsip-prinsip yang umum, sehingga nash-nashnya elastis dan fleksibel (al-Qaradlâwi, 2001: 25-27), sehingga tetap aktual sepanjang zaman.

Sementara fikih berasal dari kata *fiqh* yang menurut bahasa adalah *al-'ilm bi al-shay' wa al-fahm lah* (mengetahui sesuatu dan memahaminya) (Ibn Manzûr, T.th (13): 522), *to understand, to comprehend* (memahami, mengetahui) (Wehr, 1976: 732), dan mengetahui perkara-perkara rahasia (*idrâk daqâiq al-umûr*) (Qal'aji, 1985: 348). Sedangkan menurut istilah, fikih adalah mengetahui hukum-hukum shar' yang bersifat '*amaliyyah* yang diselidiki dari dalil-dalil yang terperinci (Qal'aji, 1985: 348; Sânu, 2000: 323; Zahrah, T.th: 6; dan Khalâf, 1978: 11). Fikih merupakan hasil dari proses interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang dilakukan secara lambat dan gradual dengan memperhatikan kondisi sosial budaya yang berjalan seiring dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Pemaknaan fikih secara terminologis di atas terlihat bahwa aspek *human* pada fikih membedakannya dengan Syari'ah yang dilegislasikan secara *divine*. Sisi humanitas fikih terletak pada posisi fikih sebagai hasil

pemahaman manusia terhadap syariat yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga kata-kata fikih dilekatkan dengan manusia biasa (bukan rasul), seperti fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, dan fikih Hanbali.

Fikih merupakan hasil pergulatan intelektual dan dialektika mereka dengan kondisi sosial ketika dan di mana mereka hidup. Di samping itu, hasil *istinbâth* fikih juga dipengaruhi oleh kualitas mujtahid yang melakukan *istinbâth* hukum. Dalam *istinbâth* fikih terdapat peluang salah di dalamnya, seperti ketika ada beberapa mujtahid yang melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang sama, namun menghasilkan ijtihad yang berbeda, walaupun kesalahan dalam berijtihad tersebut tidak diketahui (Weiss, 1998: 119-120). Dengan demikian, kebenaran yang dihasilkan oleh hasil ijtihad fikih merupakan kebenaran relatif, semua orang yang melakukan ijtihad dalam bidang fikih memiliki peluang kebenaran dan peluang kesalahan sekaligus.

C. Ruang-Ruang Reaktualisasi

Gambaran syari'ah Islam di atas menunjukkan bahwa dia tidak bersifat kaku terhadap tradisi dan perkembangan zaman. Syari'ah Islam selalu berdialektika dengan kondisi sosial budaya. Dalam melakukan dialektika ini, Syari'ah Islam mempunyai dua peran, yaitu sebagai *model of reality* yang mengadopsi budaya masyarakat dan sebagai *model for reality* (Tibi, 1991: 8-15) yang berperan melakukan formatisasi budaya yang diidealkan dengan mengubah kondisi sosial dan budaya yang telah ada. Formatisasi budaya ini tidak dilakukan secara langsung oleh Allah melalui Al-Qur'an, tetapi melalui nalar manusia yang menafsirkan aturan-aturan Allah yang tertuang dalam Syari'ah Islam tersebut.

Salah satu peran dan merupakan peran utama diturunkannya syari'ah Islam adalah untuk melakukan transformasi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu. Tradisi dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip humanisme dieliminir dan digantikan dengan model yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut. Peran ini harus tetap dijaga untuk meluruskan budaya-budaya dan tradisi-tradisi

yang bertentangan dengan syari'ah Islam dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip universal yang diakui semua manusia.

Ada beberapa aspek Al-Qur'an yang perlu dikaji ulang untuk mendukung upaya reaktualisasi syari'ah Islam dalam konteks keindonesiaan dan kekinian, di antaranya adalah konsep *qath'i* dan *zhannî*, konsep *makkiyyah* dan *madaniyyah*, dan pembacaan baru terhadap Syari'ah.

1. Konsep *Qath'i* dan *Zhannî*

Dari sisi makna yang dimaksud (*dalâlah*)nya, nash-nash Al-Qur'an ada yang *qath'i* di mana makna nash tersebut sudah pasti, tidak memerlukan takwil, dan tidak menunjuk kepada makna yang lain dan ada yang *zhannî* di mana makna nash yang dimaksudkan tidak jelas, masih bisa ditakwilkan, dan mengandung berbagai makna. Para ulama fikih biasanya mengkategorikan nash-nash yang menunjukkan bilangan sebagai nash *qath'i*, sementara nash yang secara kebahasaan memiliki dua pengertian (*musytarak*) dan makna yang tidak jelas sebagai nash *zhannî* (Khalâf, 1978: 34-35).

Definisi yang cenderung tekstualis ini dapat menghilangkan watak dinamisitas Syari'ah Islam dalam mengakomodir permasalahan kekinian. Pemakaian *qath'i* dan *zhannî* perlu ada pembaruan; dari tekstual menuju kontekstual. Nash-nash *qath'i*, sebagai sesuatu yang tidak bisa ditakwilkan seharusnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung prinsip-prinsip umum, dasar, dan universal yang diakui keberlakuannya sepanjang masa, sementara nash-nash *zhannî*, seharusnya adalah nash-nash yang maknanya tidak mencerminkan kepada prinsip-prinsip umum, dasar, dan universal. Oleh karena itu harus ditakwilkan ke arah yang mendekati prinsip-prinsip yang universal.

Ajaran-ajaran yang termasuk nash *qath'i* adalah ajaran tentang kebebasan dan pertanggungjawaban individu (99: 7-8), kesetaraan manusia di hadapan Allah (49: 13), keadilan (5: 8 dan 16: 90), persamaan manusia di hadapan hukum (5: 8), tidak merugikan diri sendiri dan orang lain (2: 279), melakukan kritik dan kontrol sosial (103: 1-3 dan 5: 78-79), menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan (17: 34),

tolong-menolong untuk kebaikan (5: 2), yang kuat melindungi yang lemah (4: 75), musyawarah dalam urusan bersama (42: 38), kesetaraan suami-isteri dalam keluarga (2: 187), saling melakukan yang makruf di antara suami-isteri (4: 19) (Mas'udi, 200: 31-33) dan lain-lain.

Pemahaman yang benar terhadap konsep *qath'i* dan *zhanni* mengenai nash-nash Al-Qur'an dan hadis sangat membantu dalam memahami manakah nash yang merupakan pokok ajaran agama dan mana yang ornamen di mana inti ajarannya berada di balik ornamen tersebut. Ajaran *qath'i* merupakan inti ajaran agama yang tidak berubah sepanjang masa, sedangkan ajaran *zhanni* merupakan ajaran yang mungkin penerapannya memerlukan beberapa penyesuaian dengan masa dan kondisi suatu masyarakat.

2. Konsep *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*

Syari'ah Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, di Mekkah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Syari'ah Muhammad ini berbeda dengan syari'ah para nabi sebelumnya yang diturunkan sekaligus. Turunnya Al-Qur'an secara bertahap dan berangsur-angsur (*tadarruj fi al-tasyrî'*) ini bertujuan untuk memantapkan dan meneguhkan hati, memudahkan dalam mentransformasikan syari'ah kepada para umatnya, dan memudahkan untuk menghafal dan memahaminya karena ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan sehubungan dengan peristiwa-peristiwa, baik bersifat individual maupun sosial (al-Shâlih, 1993: 53-58).

Tahapan penurunan ayat tersebut melalui dua periodisasi besar, periode *makkiyyah* dan periode *madaniyyah*. Pemaknaan terhadap kedua periodisasi ini ada tiga pendapat. *Pertama*, pendapat yang didasarkan kepada tempat turun (*makân al-nuzûl*) yang berarti bahwa *makkiyyah* adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah dan sekitarnya (Mina, Arafah, Hudaibiyah dan lain sebagainya), baik ayat-ayat tersebut turun setelah hijrah atau sesudahnya. Sedangkan *madaniyyah* adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau di sekitarnya (Badar, Uhud dan lain sebagainya), baik diturunkan setelah hijrah atau sesudahnya. *Kedua*, pendapat yang didasarkan pada orang yang diajak bicara (*mukhâthabîn*)

yang berarti bahwa *makkiyyah* adalah ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang Mekkah, baik ayat-ayat tersebut diturunkan di Mekkah maupun di sekitarnya, baik setelah hijrah maupun sebelumnya. Ayat *madaniyyah* adalah ayat-ayat yang kandungannya tidak berkenaan dengan orang-orang Mekkah dan semisalnya seperti para penyembah berhala. Dan *Ketiga*, pendapat yang didasarkan kepada masa turun ayat (*zamân al-nuzûl*) mengartikan bahwa *makkiyyah* adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah, baik diturunkan di Mekkah atau di tempat-tempat lainnya. Sedangkan *madaniyyah* adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah, baik diturunkan di Madinah, daerah-daerah lain atau dalam perjalanan (Ismâ'îl, 1985: 159-160). Periode *makiyyah* adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah, baik diturunkan di Mekkah atau di tempat-tempat lainnya. Sedangkan *madaniyyah* adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah, baik diturunkan di Madinah, daerah-daerah lain atau dalam perjalanan.

Proses hijrah Rasulullah dari Mekkah ke Madinah bukan hanya merupakan langkah taktis, tetapi juga merupakan pertanda bagi perubahan isi pesan wahyu yang diturunkan. Pesan wahyu yang diturunkan di Mekkah lebih menekankan kepada prinsip toleransi dan egalitarianisme. Di Mekkah, Rasulullah mendakwahkan persamaan antara manusia di hadapan Allah dan menekankan sikap tanggung jawab individual yang harus diemban oleh semua orang, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, dan agama (al-Na'im, 1987: 21).

Namun, ketika materi wahyu ini tidak diterima oleh orang-orang kafir Mekkah secara umum, bahkan para sahabat banyak yang disiksa, maka Rasulullah dan para sahabatnya terpaksa meninggalkan Mekkah untuk hijrah ke Madinah karena kondisi Mekkah sudah tidak kondusif lagi untuk mendakwahkan Islam. Berdasarkan pengalaman tentang kurang diterimanya materi ayat-ayat *makkiyyah* oleh orang-orang Mekkah, maka materi wahyu yang diturunkan di Madinah lebih disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Madinah pada waktu itu (al-Na'im, 1987: 21). Allah memberikan jawaban atas kebutuhan aktual dan potensial bagi masyarakat yang baru tumbuh dengan menurunkan

wahyu yang tertuang dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Wahyu di Madinah inilah yang mengkonstruksi fikih pada masa-masa selanjutnya hingga masa sekarang.

Adanya dua periodisasi turunnya Syariat Islam ini yang di sisi lain juga mengandung perbedaan dalam materi ajaran memunculkan polemik konsep *naskh*, Abu Zahrah mempersyaratkan, di antaranya bahwa ayat yang *menaskh* harus ayat yang diturunkan belakangan daripada ayat yang *dinaskh* karena fungsi *naskh* adalah menghentikan hukum nas yang *dinaskh*. Akan tetapi di sisi lain Abu Zahrah mengatakan bahwa hukum yang tidak boleh *dinaskh* adalah hukum yang diakui oleh semua orang yang bernalar sehat akan kebajikannya yang harus diterima seperti: Iman Kepada Allah, beerbakti kepada orang tua, adil, dan yang diakui akan kejelekannya yang harus ditolak seperti: kezaliman dan kebohongan (Zahrah, T.th.: 191). Persyaratan ini membawa implikasi bahwa ayat *makkiyyah* *dinaskh* dengan ayat *madaniyyah*, tetapi implikasi ini tidak diterima oleh Khalid Masud yang mengatakan bahwa aturan-aturan yang bersifat parsial yang sebagian besar terdapat dalam ayat *madaniyyah* bisa *dinaskh*, sedangkan ayat-ayat *makkiyyah* yang mengandung prinsip-prinsip universal dan fundamental tentang keadilan, kebaikan, kesabaran dan lain-lain tidak bisa *dinaskh* (Masud, 1984: 2005-2006).

3. Pembacaan Baru Terhadap Syari'ah

Syari'ah Islam adalah syari'ah penutup, diturunkan untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi, baik yang berkulit hitam, merah, coklat, maupun sawo matang, diturunkan untuk semua bangsa, baik bangsa Arab, Amerika, maupun bangsa Indonesia, dan Syari'ah yang tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup pada abad ketujuh, tetapi juga abad dua puluh satu dan seterusnya (Syahrûr, 2000: 22). Kondisi Syari'ah yang demikian menuntut umat Islam untuk selalu memperbaharui bacaan dan pemahamannya terhadap Syari'ah yang disesuaikan dengan kondisi dan perubahan masyarakat, termasuk masyarakat global.

Al-Qur'an merupakan pedoman dan ajaran yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di dunia Islam. Oleh karena itu

pencarian Islam harus dimulai dan bertitik tolak dari pemahaman terhadap kitab Allah dan dengan memahami secara benar proses turunnya Al-Qur'an. Dengan perangkat keilmuan dan teknologi yang lebih modern umat Islam sekarang memiliki kerangka pemahaman metodologis yang lebih baik dibandingkan dengan para pendahulunya (abad ke-7 M) dalam memahami pesan-pesan Allah (Al-Qur'an) yang disampaikan kepada Rasul-Nya.

Al-Qur'an tidak terpengaruh dengan waktu, yang terpengaruh dengan waktu adalah pemahaman terhadapnya. Pemahaman Nabi, para sahabat, dan para khalifah terhadap Al-Qur'an dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu, ketika umat Islam membaca dan memahami Al-Qur'an harus memanfaatkan informasi ilmiah yang telah didapatkan dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat pada akhir-akhir ini. Syahrûr menyarankan agar kita memahami Al-Qur'an, seakan-akan wahyu Allah baru diturunkan ke dunia kemarin dan Nabi baru saja meninggal dunia (Syahrûr, 1990: 41). Dengan demikian, nash-nash Al-Qur'an seakan-akan diturunkan berkenaan dengan permasalahan yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu untuk memahami nash Al-Qur'an, perlu menggunakan perangkat keilmuan dan teknologi yang berkembang saat ini, bukan berdasarkan informasi dari para ulama fikih (Syahrûr, 1990: 182) yang dalam memahami Al-Qur'an juga disesuaikan dengan kondisi keilmuan dan masyarakat pada waktu itu.

D. Penutup

Syariat Islam merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang diperuntukkan untuk manusia di seluruh muka bumi, tanpa membedakan ras, suku, warna kulit, dan golongan. Syariat Islam juga diperuntukkan untuk semua masa setelah Muhammad, baik pada abad ketujuh maupun abad kedua puluh satu. Dengan berpatokan kepada semboyan "*al-Islâm shâlih li kull zamân wa makân*" (Islam senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat), maka pemahaman kita terhadap syariat senantiasa mengalami perubahan mengingat berubahnya kondisi sosial dan perangkat metodologis yang berupa perkembangan ilmu yang juga berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, John et. al., 2000. *Islam and Modernity; Muslim Intellectual Response*, New York: I.B. Tauris.
- Departemen Agama R.I., 1973. *Alkitab*, Vol. 2, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Al-Fâsî, 'Allâl, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ*, tt.: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyyah al-Dâr al-Baydhâ', tth.
- Ismâ'îl, Sya'bân Muhammad, 1985. *al-Tasyrî' al-Islâmî, Mashâdiruh wa Athwâruh*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah.
- Khalâf, 'Abd al-Wahhâb, 1978. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam.
- Manzhûr, Ibn, *Lisân al-'Arab*, Jilid 8., Beirut: Dâr al-Shâdir, t.t.
- Mas'udi, Masdar F., 2000. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Edisi Revisi, Bandung: Mizan.
- Masud, Muhammad Khalid, 1984. *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute.
- Al-Na'im, Abdullahi Ahmed, 1987. "Translator's Introduction" dalam Mahmoud Mohamed Taha, *The Second Message of Islam*, New York: Syracuse univesity Press.
- Al-Qaradhâwî, Yûsuf, 2001. *Madkhal li Dirâsah al-Syari'ahal-Islâmiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qal'ajî, Muhammad Rawâs dan Hâmid Shâdiq Qunaybî, 1985. *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'; 'Arabî-Inklîzî*, Beirut: Dâr al-Nafâ'is.
- Al-Shâlih, Shubhi, 1993. *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, ter. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sânû, Quthb Mushthafâ, 2000. *Mu'jam Musthalahât Ushûll al-Fiqh 'Arabî-Inklîzî*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir.
- Syahrûr, Muhammad, 1990. *al-Kitâb wa al-Qur'an; Qirâ'ah Mu'âshirah*, Damaskus: al-Ahâli li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- , 2000. *Nahw Ushûl al-Jadidah li al-Fiqh al-Islâmî; Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: al-Ahâli li al-Thibâ'ah wa al-Nashr wa al-Tauzî'.
- Sjadzali, Munawir, 1995. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina.

- Taha, Mahmoud Mohamed, 1996. *The Second Message of Islam*, New York: Syracuse University Press.
- Tibi, Bassam, 1991. *Islam and The Cultural Accomodation of Social Change*, ter Clare Krojzl, Oxford: Westview Press.
- Wehr, Hans, 1976. *Arabic-English Dictionary, A Dictionary of Modern Written Arabic* ed. JM. Cowan, New York: Spoken Language Service.
- Weiss, Bernard G., 1998. *The Spirit of Islamic Law*, Athens: The University of Georgia Press.
- Zahrah, Muhammad Abû, *Ushûl al-Fiqh*, t.t.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.

MANUSIA DI MUKA CERMIN IBN ARABI (MEMAHAMI HAKIKAT MANUSIA DENGAN KACAMATA IBN ARABI)

Ahmad Kholil

Dosen Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam (UIN) Malang

Abstract

Although the essence of human being have been questioned long times ago, there are many conceptual answers toward that question. Thus it is common if human beings, as social and individual creatures may try to question it to find new answers. The answer is mainly gotten by contemplating one's self based on the existing concept or reflecting one's self using an individual spiritual experience.

The understanding to the essence of human beings described in this writing is based on the concept given by al-Syaikh al-Akbar ibn Arabi, it is philosophical and also sufistic. Who is a man? A man is "God" in its tajalli perfect form in the universe. Therefore, a man is not perfect when he can not show God's characteristics. Ibn Arabi says, "One of this characteristics is to be come a responsible leader either for himself or others".

Keywords: *hakikat, khalifah ma'nawi, tajalli*

A. Pendahuluan

Mengetahui konsep tentang manusia sangat penting artinya di dalam suatu sistem pemikiran dan juga di dalam kerangka berpikir manusia itu sendiri sebagai makhluk yang dikaruniai pemikiran. Konsep tentang manusia ini begitu penting karena ia merupakan suatu pandangan hidup yang mempengaruhi cara pandang yang berlanjut pada cara bersikap seseorang terhadap suatu sistem sosial budaya, ekonomi, dan politik di mana ia berada.

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang sekaligus sebagai makhluk paling misterius. Ia diakui sebagai misteri yang tidak pernah dapat dimengerti secara tuntas. Karena itu, keinginan untuk mengetahui hakikatnya hingga saat ini tidak pernah berhenti dibicarakan. Pandangan tentang manusia ini sangat berkaitan erat dengan sistem kepercayaan dan bahkan

merupakan bagian erat darinya. Sementara sistem kepercayaan itu merupakan landasan moral yang akan mempengaruhi corak peradaban manusia yang hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, konsep manusia itu penting diketahui bukan hanya demi pengetahuan terhadap manusia itu sendiri, tetapi yang lebih penting ialah karena ia merupakan syarat bagi pembenaran yang kritis dan landasan yang kuat bagi pengetahuan-pengetahuan manusia. (K. Munitz, 1979: 7).

Dalam lintasan sejarah pemikiran dan kebudayaan, pandangan yang fundamental mengenai manusia sering ditemukan dalam filsafat dan tasawuf. Kedua disiplin keilmuan ini memang erat kaitannya dengan kajian ketuhanan, yaitu Tuhan sebagai kebenaran Yang Mutlak, yang meliputi hakikat, wujud, kesempurnaan, awal penciptaan dan akhir kehidupan. Pembicaraan dalam filsafat dan tasawuf juga berkembang pada kajian tentang hakikat manusia sebagai entitas yang diciptakan dalam hubungannya dengan Tuhan sebagai penciptanya serta pencipta segala yang ada di sekeliling manusia, yaitu alam semesta. Demikian juga dalam hubungan manusia dengan alam itu sendiri.

Salah seorang *mutashawwif* yang memiliki konsep tentang manusia ini adalah Muhyiddin Ibn Arabi yang dikenal dengan konsep *Insan kamil*. Lewat konsepnya ini, penulis berusaha mengurai hakikat manusia dan struktur eksistensialnya sebagai makhluk pewaris tahta kekhilafahan Tuhan di bumi.

B. Metode Memahami Hakikat Manusia

Dalam usaha memahami hakikatnya, manusia menempuh berbagai cara agar sampai pada pengertian yang benar. Di antara cara atau metode yang digunakan itu adalah melalui pendekatan kebahasaan, yaitu dengan memahami pengertian bahasa yang dipakai untuk menyebut makhluk yang disebut manusia. (Yudi Latif, 1996:19) Arti kata manusia secara semantik bisa dirunut maknanya terutama dari asal kata yang digunakan dalam kultur bahasa asalnya. Ibn Manzur dalam *Lisan al-Arab* menyebut manusia sebagai *insan* yang berasal dari kata *nasiya* yang artinya lupa. Kata *Insan* juga ada yang mengatakan terbentuk dari kata dasar *uns* yang artinya jinak. *Insan*

yang berasal dari kata *nasiya* dan *uns* itu kemudian menunjuk kepada pengertian manusia yang memiliki sifat lupa dan jinak.

Tidak jauh beda dengan pengertian di atas, dalam peristilahan Arab dikenal ungkapan yang mengatakan (وما سمي الانسان الا لنسيانه). Ada juga ungkapan lain yang mendukung keberadaan manusia sebagai makhluk yang sering lalai dan memiliki sifat pelupa yaitu (الانسان محل الخطي والنسيان).

Dengan melakukan pendekatan secara bahasa juga bisa digunakan untuk mencari makna terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan manusia dalam proses hubungan antar sesamanya. Misalnya saja bagaimana kata manusia itu dimaknai dalam konteks budaya yang berlaku seperti penggunaan simbol-simbol tertentu dalam berbagai aspek kehidupannya. Dari sudut simbol yang digunakan ini manusia disebut sebagai makhluk simbolis, dan bukankah kebudayaan dalam berbagai wujudnya sebenarnya merupakan wujud simbolis dari eksistensi manusia, baik individual maupun kolektif.

Dalam kaitannya dengan pandangan ini, Erns Cassirer dan Susanne Langer menyebut manusia sebagai "Makhluk Simbolik" atau makhluk bersimbol. Pandangan ini menjelaskan salah satu posisi manusia sebagai *homo symbolicum* yang berkarya lewat tanda-tanda yang paling konkrit-eksak seperti matematika sampai dengan tanda atau simbol keagamaan. Bahkan dalam karya Cassirer, simbol ini ditempatkan sebagai persoalan fundamental dalam konseptualisasi. Representasi simbolik merupakan fungsi esensial dari kesadaran manusia dan ia menjelma tidak hanya dalam struktur sains, tapi juga dalam agama, mitos, bahasa, seni, dan sejarah. (Musa, 2002: 215).

Cara yang kedua untuk memahami hakikat manusia adalah dengan melalui pemahaman terhadap keberadaannya secara fisik yang sekaligus membedakan secara nyata dengan keberadaan makhluk yang lain. Sebut saja misalnya manusia itu sebagai makhluk yang memiliki organ tubuh yang lebih sempurna dibanding dengan makhluk Tuhan lainnya. Ia berjalan di atas dua kaki, dilengkapi dua tangan serta sarana fisik lain yang tertata secara artistik dan penuh estetika. Lebih dari itu, manusia juga dilengkapi dengan *infra struktur* berupa kemampuan berpikir yang tentunya hanya dimiliki manusia. Bahkan potensi berpikir ini merupakan anugerah Tuhan yang tiada tara bagi manusia. Oleh karena itu, keberadaan potensi berpikir

itulah yang akan menentukan hakikat manusia, dan hanya melalui potensi itu eksistensi dan nilai manusia ditentukan.

Kalau merujuk pada sejarah filsafat Yunani, yaitu di masa *Hellenisme-Romawi*, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah sejenis *species* binatang yang memiliki intelegensi dan aspek itu ditemukan serta dibangun di dalam kelompok-kelompok sosial yang saling bekerjasama. Oleh karena itu, selain manusia itu sebagai binatang yang berakal (*rational animal*), ia juga binatang politik (*political animal*). (Van Der Weij, 1988: 39). Pemaknaan ini dapat disaksikan dalam kehidupan yang nyata saat ini, di mana manusia tidak bisa lepas dari berpolitik, baik politik dalam arti sempit (kekuasaan), maupun dalam arti luas, yaitu mengatur hidupnya sendiri dengan potensi akal yang dimilikinya.

Cara lain yang dapat digunakan untuk memahami hakikat manusia adalah dengan melalui hasil karyanya. Hasil karya merupakan perwujudan nyata dari kualitas diri seseorang. Pemahaman demikian dapat pula menggiring pada pemahaman *setting* kehidupan manusia yang kompleks, dan termasuk di dalamnya antara lain adalah melalui *setting* sejarah, yaitu pengetahuan kapan dan di mana seseorang itu melahirkan karyanya. Demikian juga *setting* psikologis, yaitu bagaimana situasi emosional dan intelektual yang melatar belakangi hasil karya itu, di samping pendekatan bidang keilmuan lain yang berkaitan secara langsung dengan karya-karya seseorang, seperti bidang sastra, seni pahat, seni lukis, arsitektur dan ilmu-ilmu humaniora yang amat luas itu (Musa, 2002: 16). Oleh karena itu, tidak salah bila dikatakan bahwa hakikat manusia dapat ditentukan oleh sejumlah karya yang dihasilkan dalam wujud atau jenis apapun. Seberapa tinggi nilai etika dan estetika yang terkandung dalam suatu karya, sangat terkait dengan tata nilai yang dipahami oleh pencipta karya tersebut.

Termasuk dalam kategori ini adalah kecintaan terhadap suatu hasil karya yang tidak dihasilkannya sendiri, yaitu hasil karya orang lain. Suatu misal, seseorang memasang karya tertentu di sudut rumah atau dindingnya, kaligrafi atau sejenis lukisan lainnya. Apa yang dipasang itu menunjukkan pada kualitas nilai yang dikonsepsikan oleh orang tersebut.

Pendekatan lain selain dari tiga pendekatan di atas adalah pendekatan teologis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengikuti pola yang digariskan

Qur'an, mengingat Qur'an merupakan kitab petunjuk dari Tuhan bagi manusia dalam segala aspek kehidupannya. Dengan ungkapan lain, pendekatan ini berusaha memahami hakikat manusia dari sudut pandang Penciptanya, yaitu melalui wahyu Tuhan yang diturunkan dan tertulis dalam kitab suci. Bila dianalogikan dengan sebuah alat elektronik, maka Qur'an itu bagai buku resmi yang dikeluarkan pabriknya, untuk kemudian mesti digunakan oleh pengguna dalam usaha memahami teknik pengoperasiannya maupun mereparasi bila terjadi kerusakan.

Dalam filsafat Islam, melalui pendekatan teologis (qur'anic) ini, diharapkan dapat melengkapi sisi transendental yang tidak dapat ditemukan dalam ketiga pendekatan di atas. Dengan logika keterkaitan antara ciptaan (makhluq) dan Pencipta (Khaliq), maka yang lebih tahu terhadap ciptaan itu tidak lain adalah penciptanya. Oleh karena itu, pengetahuan pencipta terhadap ciptaannya sudah tentu jauh lebih mumpuni dan lengkap dibanding pengetahuan ciptaan tersebut terhadap dirinya sendiri. (Musa, 2002 : 217).

C. Hakikat Manusia Menurut Ibn Arabi

Kata hakikat berasal dari bahasa Arab (حَقِيقَة) yang mengandung makna sesuatu yang tetap, tidak berubah-ubah, yaitu suatu identitas esensial yang menyebabkan sesuatu menjadi dirinya sendiri dan berbeda dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian ungkapan hakikat manusia berarti adalah kecenderungan untuk memahami esensi yang tetap dan tidak berubah-ubah pada diri manusia, serta menandakan ciri khasnya yang membedakan dengan yang lain. Dalam filsafat, ungkapan hakikat manusia ini menandai suatu kecenderungan yang menganggap bahwa manusia memiliki definisi pra-wujud tentang kemanusiaannya. Definisi pra-wujud tersebut adalah esensi yang membedakan secara jelas dari eksistensinya. Dalam pandangan yang demikian, tampaknya esensi lebih penting dari pada eksistensi. Kecenderungan inilah yang mendominasi pembicaraan tentang manusia dalam sejarah filsafat pada periode klasik dan abad pertengahan.

Pada periode berikutnya, terjadi perubahan cara pandang, di mana manusia dianggap tidak memiliki ciri khas yang tetap yang dinamakan esensi. Manusia dipandang sebagai makhluk historis, karena ia memang memiliki

sejarah yang merupakan pembeda dengan makhluk lainnya. Manusia dapat dimengerti dari perjalanan sejarahnya, bukan melalui definisi pra-wujud, tapi merupakan rangkaian *anthropological constants*, yaitu dorongan-dorongan dan orientasi yang tetap ada pada diri manusia. (Nasution, 1988: 50).

Adanya perbedaan kecenderungan ini menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi manusia dalam upaya memahami dirinya. Pada periode klasik dan pertengahan, orientasi para filosof adalah esensi manusia yang dirumuskan melalui refleksi yang sangat spekulatif, sedangkan para filosof modern berorientasi pada eksistensinya dalam sejarah. Orientasi yang pertama lebih memiliki dimensi yang lebih vertikal dibanding dengan orientasi yang kedua yang lebih horizontal. Meskipun perumusan tentang manusia oleh para filosof terdahulu dimulai dengan deskripsi, namun pada akhirnya yang dituju adalah tatanan normatif yang menjadi acuan bagi kesempurnaan manusia. Kesempurnaan tersebut dapat berupa keserasian dengan struktur dan susunan mikrokosmos yang menyangkut dimensi material dan immaterial, dengan makrokosmos dan juga keserasian transendentalisme-metakosmos atau dengan Tuhan.

Sementara itu, Islam dengan Qur'annya telah menjelaskan kesempurnaan diri manusia, seperti yang tertera dalam surat *al-Tin*; 4-5 "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Kemudian kami kembalikan dia ke derajat yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih". Kesempurnaan demikian membuat manusia menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk Tuhan lainnya, bahkan ia telah diangkat sebagai *khalifah* (wakil) Tuhan di bumi-Nya. Akan tetapi jika potensi yang diberikan itu tidak diberdayakan dan manusia terlepas dari *prototype* yang telah Tuhan tentukan, maka ia berada di posisi yang teramat rendah, bahkan lebih rendah dari makhluk yang berasal dari materi yang sama. Oleh karena itu, jalan satu-satunya mencapai kesempurnaan ialah kembali ke Tuhan dengan iman dan amal shalih.

Pembicaraan lebih teknis tentang hakikat manusia ini muncul dalam literatur Islam sekitar abad ke-7 H./13 M, atas gagasan Ibn Arabi (w.638 H/1240 M). Ia mempergunakan istilah *al-Insan al-Kamil* untuk memberi label pada konsep manusia ideal yang menjadi lokus penampakan diri Tuhan. Akan tetapi, menurut Yunasril Ali, substansi konsep insan kamil itu dalam

Islam sebenarnya telah muncul jauh sebelum Ibn Arabi, hanya saja konsep yang digunakan tidak memakai istilah insan kamil, melainkan istilah lain seperti *al-Wali al-Kamil* oleh Abu Yazid al-Busthami (261 H/874 M), *Nur Muhammad* dan *al-Hulul* oleh al-Hallaj (309 H/913 M), atau juga al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320 H/932 M) dengan konsep *Khatm al-Auliya*. (Yunasril, 1997 : 8-11).

Sedikit berbeda dengan al-Hallaj yang memandang adanya unsur *lahut* dan *nasut* pada Tuhan dan Manusia, Ibn Arabi menjadikan unsur tersebut sebagai aspek *al-haqq* dan *al-khalq*. Al-Haqq merupakan aspek batin dan al-khalq aspek lahir. Aspek al-haqq ini identik dengan *al-jawhar* (substansi) dalam teologi Asy'ari. Dan aspek al-khalq identik dengan al-ardl (accident). Kedua aspek ini muncul dari respon akal, sedangkan pada hakikatnya segala realitas ini adalah satu. (al-Baghdadi, tt : 129).

Aspek lahir, yakni alam empiris yang serba ganda, merupakan wadah *tajalli* dari *asma* dan *sifat-sifat* Tuhan yang dipandang oleh Ibn Arabi sebagai aspek batin. Lebih lanjut, alam empiris yang tampak nyata dipandang mata ini tidak lain adalah khayalan belaka. Wujud hakiki yang sebenarnya adalah wujud Tuhan.

Ditinjau dari sudut ontologis, menurut Ibn Arabi, wujud alam empiris ini tidak mempunyai makna secara hakiki. Namun demikian, Tuhan sendirilah yang menghendaki kemunculannya. Alam ini dimunculkan Tuhan karena Ia ingin melihat citra diri-Nya melalui *makhlud* yang menjadi cermin *asma* dan *sifat-sifat*-Nya. Akan tetapi, alam empiris ini berada dalam wujud yang terpecah-pecah, sehingga tidak dapat menampung gambaran Tuhan secara sempurna. Tuhan baru dapat melihat citra-Nya yang sempurna pada insan kamil. Kesempurnaan itu dalam konsep Ibn Arabi berkat adanya *Nur Muhammad* (al-haqiqah al-Muhammadiyah) yang dipandang sebagai wadah *tajalli* Tuhan yang paripurna untuk memanifestasikan diri-Nya.⁴ Nur Muhammad ini merupakan makhluk yang paling pertama diciptakan Tuhan, ia telah ada sebelum penciptaan Adam AS. Oleh karena itu, pada bagian yang lain, Ibn Arabi juga menyebutnya dengan "akal pertama" (al-aql al-awwal), atau "pena tertinggi" (al-qalam al-a'la). Dialah yang menjadi sebab tercipta dan terpeliharanya alam semesta ini.

Dalam penjelasannya akan hal ini, Yunasril mengatakan "Akal pertama" merupakan lambang dari pengetahuan Tuhan yang *azali* dan tak

terbatas, yang *bertajalli* pada hakikat Muhammad. Sedangkan “pena” melambangkan alat tulis Tuhan, yang menuliskan pengetahuan-Nya. Dalam pena terdapat “tinta” sebagai lambang ruh yang masih bewujud potensialitas, dan dengan penulisan pengetahuan, terdapat “huruf-hurup” yang melambangkan bentuk alam. Hakikat Muhammad yang demikian, identik dengan *logos* dalam falsafi Philo dan lainnya, yang merupakan prototipe alam semesta. (Yunasril, 1997: 56)

Dengan demikian, insan kamil merupakan miniatur dan realitas ketuhanan dalam *tajalli-Nya* pada jagat raya. Oleh karena itu, Ibn Arabi menyebutnya sebagai alam *ashghar* (mikrokosmos) yang pada dirinya tercermin bagian-bagian dari jagat raya (makrokosmos). Esensi insan kamil merupakan cermin dari esensi Tuhan; jiwanya sebagai gambaran dari *al-nafs al-kulliyah* (jiwa universal); tubuhnya mencerminkan *arsy*; pengetahuannya mencerminkan pengetahuan Tuhan; hatinya berhubungan dengan *Bait al-Makmur*; kemampuan mental spiritualnya terkait dengan malaikat; daya ingatnya dengan Saturnus (Zuhal); daya intelektualnya dengan Yupiter (Musytari); dan lain-lain. (Ibid)

Dalam pandangan Ibn Arabi, hakikat Muhammad yang menjadi inti insan kamil adalah salah satu penyebab proses terciptanya Alam, karena pada dasarnya, penciptaan alam ini merupakan kehendak Tuhan agar Ia dapat dikenal dan dapat melihat citra diri-Nya.⁵ Akan tetapi maksud tersebut tidak dapat terwujud secara sempurna, karena alam ini tidak dapat mengenal diri-Nya. Oleh karena itu, pada hakikatnya, manusialah yang menjadi sebab adanya alam. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang secara sempurna mengidentifikasi hakikat Muhammad, karena hanya manusia semacam itulah yang bisa mengenal Tuhan.

Hakikat Muhammad yang menjadi inti kesempurnaan insan kamil itu, oleh Ibn Arabi dipandang sebagai realitas universal (*al-haqiqah al-kulliyah*) yang menghimpun segenap realitas. Ia merupakan “milik bersama” antara Tuhan dan makhluk-Nya. Oleh karena itu, ia tidak dapat disifati dengan *wujud* (ada) maupun *adam* (tiada), tidak dapat disifati dengan baru maupun qadim, karena bila berada pada “ada” yang qadim, iapun qadim, tetapi bila ia berada pada “ada” yang baru ia pun baru. Jadi, wujud dari hakikat Muhammad ini merupakan suatu bentuk wujud tersendiri yang

menghubungkan antara yang Mutlak dan alam yang terbatas (Yunasril, 1997: 58).

Dengan penjelasan yang diuraikan Ibn Arabi di atas, timbul pertanyaan kemudian, “ apakah manusia itu disebut sebagai insan kamil semata-mata karena ia sebagai wadah *tajalli* Tuhan yang paling sempurna ? Jika benar, berarti kesempurnaan manusia hanyalah dari sudut wujudnya saja, bukan dari segi pengetahuannya. Dengan ungkapan lain, ia sempurna hanya dari segi ontologis, bukan aksiologis. Bila diteliti lebih jauh, kelihatan bukan demikian yang dimaksud Ibn Arabi. Baginnya, yang dinamakan insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan wujud, terbukti karena ia merupakan manifestasi yang paling sempurna dari citra Tuhan. Sedangkan kesempurnaan dari segi pengetahuan, karena ia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yaitu menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan, yang disebut *makrifat*.

Sampai pada pembicaraan ini, Ibn Arabi tampaknya memiliki pandangan yang sama dengan para teoritikus tasawuf, seperti al-Qusyairi (w.465 H) atau para teoritikus tasawuf lainnya. Dalam teori-teori yang dirumuskan para sufi, ada tahapan (maqam) yang harus ditempuh bagi orang yang ingin mencapai *makrifah* sebagai maqam tertinggi dalam hubungannya dengan Tuhan. Untuk memulainya harus diawali dengan *riyadhah ruhaniyah* yang dijalani secara bertahap menempuh berbagai fase seperti *taubah*, *zuhud*, *wara'*, *shabr*, *tawakkal*, dan *ridla*.

Bila seseorang telah matang dalam pengelolaan diri dan menyadari sepenuhnya posisinya dalam suatu maqam, maka ia dapat pindah ke maqam selanjutnya. Tahap perpindahan itu disebut “tahap antara” (*barzakh*), yaitu peralihan dari maqam yang telah dijalani ke maqam berikutnya. Tidak mudah memang melalui maqam-maqam tersebut. Oleh sebab itu diperlukan ketekunan dan kesabaran serta waktu yang tidak singkat. Meskipun demikian, jika tekad seseorang telah tertuju kepada wujud Yang Mutlak itu, niscaya dia akan bisa sampai kepada keadaan (*al-hal*) yang menjadi dambaan para pencari kebenaran hakiki.

Tahap puncak yang diharapkan dapat dicapai oleh pencari kebenaran hakiki dalam perjalanan spiritualnya itu ialah maqam atau keadaan *makrifah*. Makrifah ini dimulai dengan mengenal dan menyadari jati diri. Karena

dengan mengenal jati dirinya, niscaya seseorang akan mengenal Tuhannya. Dalam sebuah Hadits yang masih diperselisihkan kedudukan shahih tidaknya menyatakan “من عرف نفسه عرف ربه”. Meskipun demikian, Ibn Arabi dalam *Fushush al-Hikam* menguatkannya dengan makna ayat “Kami memperlihatkan tanda-tanda Kami pada segenaf ufuk dan pada diri mereka sendiri. (Lihat *Fushush*, 69.)

Kesadaran akan eksistensi Tuhan berarti mengenal Tuhan sebagai wujud hakiki yang mutlak, sementara wujud yang lainnya adalah wujud bayangan yang nisbi. Wujud bayangan ini, sebenarnya hanya *image*, sehingga yang benar-benar wujud hanyalah Tuhan. Tapi jangan terburu menyandangkan gelar makrifah hanya dengan terma-terma *lisan*, sebab Ibn Arabi juga punya penjelasan lain tentang makrifah ini. Ia mengatakan:

من قال يعلم أن الله خالقه
 ولم يجر كان برهانا بأنه جهلا
 لا يعلم الله إلا الله فـاتتبهوا
 فليس حاضرکم مثل الذي غفلا
 العجز عن درك الادراك معرفة
 كذا هوالحكم فيه عند من عتلا
 هو الا له فلا تحصي محامده
 هوالتزیه فلا تضرب له مثلا
 (محيي الدين ابن عربي ، الفتوحات المكية . ١ : ٧٧)

Artinya:

Barang siapa mengaku mengetahui Allah bergaul dengannya
 Lalu ia tidak beranjak (dari pengakuan itu), itu tanda ia tidak mengetahui-Nya
 Tidak ada yang tahu Allah kecuali Ia sendiri, ingatlah
 Yang sadar di antara kalian tentu berbeda dengan yang lalai
 (sadar akan) Ketidak- mampuan menangkap makna adalah *makrifah*
 Begitulah penilaian bagi orang yang berakal
 Dialah Tuhan yang pujian pada-Nya tiada terhingga
 Dia Mahasuci, maka jangan ciptakan bagi-Nya bandingan.

Dari sepintas kutipan ini, selain wahana introspeksi atas diri manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, bisa juga dipetik pengertian bahwa *ibadah* atau pengabdian yang dilakukan manusia terhadap Tuhan haruslah dipahami sebagai suatu proses pencarian kebenaran secara tulus dan murni,

tanpa belunggu dan pembatasan yang tidak jarang diciptakan oleh si *abid* itu sendiri. Belunggu itu pada zaman dulu adalah berhala yang muncul dalam wujud patung atau representasi mitologis tentang Tuhan. Sedangkan di zaman modern saat ini bisa muncul dalam wujud pikiran atau pendapat (rasio) yang dimutlakkan hingga menjadi seperti Tuhan. Padahal yang mutlak dan yang paling nyata hanyalah Tuhan itu sendiri, namun demikian Ia penuh selubung, apalagi bagi *pendosa*. Meskipun demikian, ketika seseorang sadar akan ketidak-tahuan atau keterbatasan pengetahuannya terhadap Tuhan, karena selubung yang menyelimuti namun diiringi dengan tetap *sami'na wa atha'na*, apalagi diiringi dengan perasaan *ikhlash* menjalankan segala ketentuan-Nya, itu sudah bagian dari makrifah. Demikian ditegaskan Ibn Arabi dalam kutipan di atas.

Kembali kepada konsep insan kamil, ia sebagai wadah *tajalli* Tuhan yang sempurna, maka hakikat manusia dalam pandangan Ibn Arabi tidak lain adalah orang yang menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan. Di samping itu, kesadaran akan eksistensi Tuhan berarti juga kesadaran seseorang terhadap dirinya sebagai wadah *tajalli* Tuhan, di mana kualitas-kualitas (sifat-sifat) Tuhan mempunyai refleksi simbolis terhadap jiwa dalam wujud kebijakan-kebijakan rohaniah dan kearifan-kearifan sosial.

Dalam kondisi demikian, maka manusia yang telah memahami hakikatnya akan dijadikan Tuhan sebagai *khalifah-Nya* di bumi. Khalifah yang dimaksud di sini adalah dalam pengertian sebagai wakil (na'ib) Tuhan (al-khilafah ma'nawiyah), bukan semata-mata jabatan dalam pemerintahan yang secara lahir merupakan tugas pengendalian sosial politik dalam suatu wilayah negara. Jabatan sebagai khalifah *ma'nawi* ini menempati posisi yang paling dasar, karena merupakan fokus kesadaran ketuhanan yang merupakan sebab muncul dan lestarnya alam secara keseluruhan.

Dalam ungkapan lain, orang harus dapat menemukan Tuhan untuk kemudian hadir bersama-Nya, kapanpun dan dimanapun ia berada.⁷ Bagaimana caranya agar orang dapat menemukan Tuhan? Ditegaskan oleh Ibn Arabi bahwa setiap orang harus terus-menerus mencari untuk kemudian menemukan dan menghadirkan-Nya dalam kenyataan, tidak dalam konsep-konsep dan teori. Caranya, orang harus mengalami kebigungan (*hairat*), tetapi tidak seperti kebingungan karena tersesat atau tidak menemukan

jalan, melainkan kebingungan karena tidak dapat mengangkat *tabir* yang menghalanginya untuk melihat dan menghadirkan Tuhan di manapun ia berada. (William Chitick, 2001: 37-38).

D. Penutup

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan-Nya yang lain. Kondisi ini akan berbalik seratus delapan puluh derajat manakala si manusia itu tidak menyadari eksistensi dirinya sebagai *abid* dan eksistensi Tuhannya sebagai *ma'bud* yang ditunjang dengan keengganannya untuk berbuat baik terhadap apa dan siapa saja. Jika sudah demikian, maka manusia yang hidup itu lebih hina daripada bangkainya.

Faktor utama yang membuat manusia terhina adalah kecintaannya yang mendalam terhadap materi, padahal dunia ini hanya maya dan ia diperintah oleh yang *al-Haq* supaya menjauhi yang mengejar dan mendekati yang menghindari (*al-zuhd*).⁸Karena itu, Ibn Arabi memberi nasihat kepada para pencari kebenaran supaya *berzuhd* dan bersibuk ria hanya dengan Tuhan. Secara eksplisit ia menyatakan, “kebanyakan manusia yang menginginkan agar kebutuhannya terpenuhi hanya sibuk dengan hal tersebut, sementara kami tidak terpesona, hidup *berzuhd* dan hanya *isyighal* dengan Allah—*entoh* demikian, kebutuhanpun tetap terpenuhi.” Termasuk dalam hal ini menyangkut pengetahuan, jangan terpedaya hanya oleh pengamatan indera dan penalaran rasio yang kemampuannya jelas terbatas pada materi yang bisa diamati dan entitas yang bisa dinalar.

Dengan berpaling dari materi, manusia akan menjadi manusia yang sebenarnya (*kamil*), dan ia akan mendapat pengetahuan yang esoterik, yang disebut oleh Ibn Arabi *ilm al-asrar*. Pengetahuan ini pada dasarnya identik dengan pengetahuan Tuhan sendiri, karena itu, orang yang dapat mencapainya hanyalah orang yang menyadari kesatuan esensialnya dengan Tuhan. Sebagai pengetahuan Tuhan, ia bersifat pasti dan meyakinkan, karena ia merupakan visi langsung terhadap hakikat sesuatu, dan orang yang mendapat pengetahuan ini berada dalam cahaya Tuhan, yaitu di jalan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Munitz. 1979. *The Ways of Philosophy*. New York: Macmillan Publishing Co, Inc.
- Yudi Latif dan Idi Subandi Ibrahim (Ed.). 1996. *Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan.
- Musa Asy'ari. 2002. *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI.
- P.A. Van Der Weij. 1988. *Filsuf-filsuf Besar tentang Manusia*. Terj. K. Bertens. Jakarta: Gramedia.
- Dick Hartoko. 1986. *Kamus Populer Filsafat*. Jakarta: Rajawali.
- Muhammad yasir Nasution. 1988. *Manusia Menurut Al-Ghazali*. Jakarta. Rajawali Press.
- Yunasril Ali. 1997. *Manusia Citra Ilahi*. Jakarta: Paramadina .
- Al-Khatib al-Baghdadi. Tt. *Tarikh Baghdad*. Beirut . Dar al-Fikr.
- Al-Mas'udi, *Muruj al-Dzahab wa Ma'adin al-Jawhar*. 1973. Beirut: Dar al-Fikr.
- Harun Nasution. 1973. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibn Arabi. Tt. *al-Futuhat al-Makkiyah*. Beirut: Dar al-Shadir.
- William C. Chittick. 2001. *Tuhan Sejati dan tuhan-tuhan Palsu*. Terj. Achmad Nidjam dkk. Yogyakarta: Qalam.
- , 1983. *The Sufi Path of Love: The Spiritual Teaching of Rumi*. New York. State University of New York Press.
- Al-Imam al-Ghazali. Tt. *Majmu'ah Rasa'il al-Imam al-Ghazali*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ahmad ibn Muhammad Ujaibah. 1266 H. *Iqadh al-Himam fi Syarh al-Hikam*. Jiddah: al-Haramain.
- Sayyed Hossein Nasr dkk. 2003. *Warisan Sufi*. Yogyakarta: Pustaka Sufi.

PENERAPAN PRINSIP ISO 9001: 2000 DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Mulyono

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Staff Lemlitbang Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Abstract

The fast development of science and technology and rapid change in this life has recently been an inevitable phenomenon. Education institution as open social institution regarded as agent of change is demanded to respond this change. The decree No. 20, 2003 about National Education System Section 50 article 3 conceded that the central government and/or local government should conduct at least one education unit to all education levels in which it is later projected to be education unit with international standard. One of the efforts to reach education with either national or international standard is by the implementation of quality management ISO. One of characteristics of education institution with national standard is by the implementation of the principles of management ISO 9001:2000, while one of the characteristics of education institution with international standard is the implementation of management ISO 9001:2000. This article will deal with the implementation of management ISO 9001:2000 in education institution.

Keywords: implementation, principle, education institution

A. Latar Belakang

Tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecepatan perubahan yang saat ini tidak terelakkan sudah barang tentu tidak dapat dianggap sesuatu yang dapat diabaikan. Lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial yang bersifat terbuka juga sebagai agen perubahan (*agen of change*) perlu memperhatikan adanya tuntutan perubahan tersebut.

Seiring dengan hal tersebut, terbukanya Asian Free Trade Area (AFTA), sejak 1 Januari 2003 lalu itu mengindikasikan gong kompetisi SDM dalam perspektif global sudah mulai ditabuh. Di mana saat ini mulai terjadi kompetisi SDM global akan merambah memasuki relung kehidupan masyarakat mulai dari pusat kota hingga pelosok desa. Saat kompetisi SDM dan pendidikan

terjadi, lembaga pendidikan formal maupun nonformal akan mengisi setiap kota dan kabupaten. Kita akan disuguhkan dengan *franchise-franchise* lembaga pendidikan dari negara-negara Asean, Amerika, Eropa, Cina, Korea, Jepang termasuk dari Timur Tengah. Saat ini pendidikan di negara-negara tersebut sudah merambah seperti jamur di musim hujan, yang tentu saja, sasaran utamanya kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Jambi. Sebentar lagi akan merambah menguasai wilayah-wilayah kota/kabupaten di Indonesia.

Lembaga-lembaga pendidikan asing yang diminati masyarakat, dilihat dari sudut pembiayaan, justru relatif lebih mahal, melampaui standar biaya pendidikan yang terbaik di Indonesia. Besarnya minat masyarakat menyerbu pendidikan *franchise* ini, kata kuncinya ternyata adalah lembaga-lembaga pendidikan tersebut melahirkan *output*nya benar-benar dapat diharapkan sesuai dengan kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*) masyarakat, sehingga output pendidikan mereka, belum selesai pun sudah di-*order* oleh pihak pengguna, baik dalam pemenuhan SDM lokal, nasional bahkan global (Mukhtar, 2004, 268-269).

Kasus pendidikan *Franchise* (pendidikan asing) yang saat ini sudah merambah di kota-kota besar Indonesia, justru telah menjadi *trend* bagi anak-anak kota untuk berlomba-lomba memasukinya. Hal ini disebabkan, karena lembaga pendidikan *Franchise* sangat pandai mengemas pendidikan persekolahannya dengan kualitas/mutu, kompetensi, keunggulan, kompetitif dan profesionalitas (Mukhtar, 2004, 270).

Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana mengupayakan agar lembaga-lembaga pendidikan kita memiliki mutu bertaraf nasional bahkan internasional agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga *Franchise* yang mulai berkembang pesat di Indonesia?

Salah satu upaya yang secepatnya ditangani oleh para penyelenggara pendidikan adalah perlu adanya transformasi dan inovasi sistem manajemen kelembagaan persekolahan, yang meliputi: (1) birokrasi pendidikan persekolahan; (2) pembiayaan; (3) *reward* dan *punishment* yang jelas; (4) budaya sekolah/akademis; (5) jaringan/jalinan sekolah (NW/WW); (6) teknologi informasi pendidikan; (7) *entrepreneurship* (kewirausahaan); (8) kemandirian; dan (9) *marketing*. Bahkan transformasi dan inovasi sistem manajemen

persekolahan sedapat mungkin diarahkan pada penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000.

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan misalnya, sejak beberapa tahun terakhir telah mencanangkan adanya satu identitas bagi sekolah-sekolah menengah kejuruan di seluruh Indonesia. Identitas dimaksud adalah sebagai sekolah bertaraf nasional atau bertaraf internasional. Sekolah bertaraf nasional salah satu cirinya adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip manajemen ISO 9001: 2000. Sedangkan untuk sekolah bertaraf internasional salah satu cirinya adalah diterapkannya manajemen ISO 9001: 2000. Artikel ini secara singkat membahas penerapan manajemen ISO 9001: 2000 di lembaga pendidikan.

B. Penerapan Prinsip Manajemen ISO 9001: 2000

Secara prinsip sebenarnya siapa saja dapat menerapkan manajemen dengan pendekatan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000 termasuk di lingkungan lembaga pendidikan (sekolah, madrasah dan perguruan tinggi). Sistem ini merupakan sistem manajemen yang menekankan kepada kepuasan pelanggan. Pelanggan pada sistem manajemen mutu adalah pelanggan internal, pelanggan eksternal dan pihak yang berkepentingan (*interested parties*).

Dalam menerapkan prinsip manajemen ISO 9001: 2000 guna pemenuhan kepuasan pelanggan maka dikenal **delapan prinsip dasar manajemen mutu** yaitu:

1. *Customer Focus* (Perhatian pada pelanggan)
2. *Leadership* (Kepemimpinan)
3. *Involvement of people* (Pelibatan orang)
4. *Process approach* (Pendekatan proses)
5. *System approach to management* (Pendekatan sistem pada manajemen)
6. *Continual improvement* (Perbaikan berkelanjutan)
7. *Factual approach to decision making* (Pengambilan keputusan berdasar fakta)

8. *Mutually beneficial supplier relationships* (Hubungan pemasok yang saling menguntungkan)

Delapan dasar prinsip manajemen mutu tersebut di atas merupakan dasar penerapan sistem manajemen mutu dalam kelompok ISO 9000. Alasan penerapan sistem manajemen mutu adalah untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kepuasan pada pelanggannya atas layanan produk dari organisasi. Pelanggan menghendaki produk sesuai dengan karakteristik yang dapat memuaskan kebutuhan dan harapan mereka. Kebutuhan dan harapan dinyatakan dalam spesifikasi produk yang secara terpadu dinamakan persyaratan pelanggan (Hawignyo dan Budi, 2004: 23).

Persyaratan pelanggan dapat ditentukan melalui kontrak oleh pelanggan atau dapat ditetapkan oleh organisasi sendiri. Dalam kedua hal tersebut apabila dapat dipenuhi oleh organisasi maka pelanggan menetapkan keberterimaan produk. Karena kemajuan teknologi dan kebutuhan serta harapan pelanggan yang senantiasa meningkat dan berubah serta tekanan persaingan yang ketat, maka untuk dapat selalu memuaskan pelanggannya, organisasi didorong untuk selalu memperbaiki proses produknya secara terencana dan terukur.

Pendekatan sistem manajemen mutu (SMM) mengajak organisasi untuk menganalisis persyaratan pelanggan, menetapkan proses yang mampu memberi sumbangan bagi produk yang dapat diterima oleh pelanggan dan supaya konsisten dalam menjaga kualitas produk maka proses-proses tersebut harus terkendali.

C. Tujuan Penerapan ISO

Penerapan prinsip manajemen mutu ISO 9001:2000 di lingkungan lembaga pendidikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan pendidikan.
2. Membangun kesadaran tentang perlunya melakukan pelayanan secara prima terhadap pelanggan.

3. Mendidik diri sendiri (pengelola lembaga pendidikan) agar taat terhadap sesuatu yang disepakati.
4. Menyiapkan dokumen mutu.

D. Manfaat Penerapan ISO

Manfaat yang dapat diambil dari penerapan prinsip manajemen ISO 9001: 2000 di lembaga pendidikan adalah:

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal.
2. Terbangunnya kesadaran pengelola lembaga pendidikan dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap pelanggan.
3. Terdidiknya pengelola lembaga pendidikan dalam menaati sesuatu yang telah disepakati.
4. Tersusunnya dokumen manajemen mutu.

E. Pengertian ISO 9001: 2000

1. ISO

ISO diartikan sebagai "The International Organization for Standardization" (Organisasi Internasional untuk Standardisasi) adalah merupakan badan federasi dunia yang berkenaan dengan standar.

2. Manajemen Mutu

Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok orang-orang untuk mencapai satu tujuan organisasional (G.R. Terry dan L.W. Rue, 1988). Sedangkan manajemen memiliki fungsi dasar sebagai *planning, organizing, staffing, directing, and controlling*. (Afsaneh Nahavandi, *The art and Science of Leadership*, Arizona State University-West).

Mutu didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan. Kebutuhan atau harapan yang ditetapkan secara langsung/eksplisit atau tidak langsung/implisit, oleh organisasi atau perorangan yang menerima suatu produk (pelanggan) berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh suatu produk.

3. Pelanggan

Pelanggan atau *customer* adalah seseorang atau sekelompok orang yang menerima layanan jasa atau barang dari produsen.

4. Sertifikat ISO

Sertifikat ISO adalah sebuah pernyataan pengakuan tertulis diberikan kepada sebuah institusi yang telah menerapkan ISO sebagai standar dalam menyelenggarakan organisasinya setelah melalui proses audit internal dan eksternal. Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi internasional yang memiliki wewenang terhadap sertifikasi.

F. Delapan Langkah Prinsip ISO 9001: 2000

1. Pusat Perhatian Pada Pelanggan (*Customer Focus*)

Perhatian utama sebuah organisasi adalah kepada pelanggan. Organisasi bergantung pada pelanggannya dan oleh sebab itu hendaknya organisasi berusaha memahami kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang dari pelanggannya, dan selalu berusaha untuk dapat melampaui harapan pelanggan. Berkembang tidaknya sebuah organisasi tergantung pada ada tidaknya pelanggan yang dilayani.

Siapa pelanggan lembaga pendidikan? Pelanggan lembaga pendidikan secara internal adalah guru dan pegawai yang ada di sekolah dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Sedangkan secara eksternal pelanggan lembaga pendidikan adalah peserta didik, orangtua siswa, instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Kedua jenis pelanggan di atas hendaknya menjadi perhatian pengelola lembaga pendidikan dalam pelayanannya, sehingga hasil akhir sebagai produk pendidikan yaitu tamatan sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan demikian maka seluruh program, biaya dan sumber daya lainnya yang ada di lembaga pendidikan adalah untuk keperluan pelayanan terhadap pelanggan.

2. Kepemimpinan (*Leadership*)

Pemimpin menetapkan kesatuan tujuan dan arah suatu organisasi. Mereka hendaknya menciptakan dan memelihara lingkungan internal tempat orang dapat melibatkan dirinya secara penuh dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pemimpin sangat penting artinya bagi keberlangsungan manajemen di lembaga pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin bersama-sama dengan semua sumberdaya manusia yang ada di sekolah merencanakan, menetapkan sasaran, melaksanakan, melakukan tindakan pencegahan, melakukan tindakan koreksi, mengevaluasi dan meningkatkan secara berkelanjutan tentang berbagai kegiatan pelayanan terhadap pelanggan.

3. Pelibatan Orang (*Involvement of People*)

Orang pada semua tingkatan mulai dari penjaga sekolah, tenaga administrasi, guru, asisten (guru magang), pembina kegiatan sekolah, ketua unit sekolah, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah itu sendiri adalah inti sebuah organisasi sehingga pelibatan mereka secara penuh memungkinkan kemampuannya dapat dipakai untuk kemanfaatan organisasi secara keseluruhan.

4. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Agar hasil yang dikehendaki tercapai lebih efisien, maka kegiatan dan sumberdaya yang ada seperti sumberdaya manusia, bangunan, peralatan dan infrastruktur lainnya yang tersedia di sekolah dikelola sebagai suatu proses yang sinergis. Setiap proses tentunya memerlukan satu

kesepakatan aturan main berupa mekanisme kerja yang tertuang dalam satu skema alur kegiatan. Skema selanjutnya dideskripsikan dalam sebuah prosedur atau instruksi kerja yang memudahkan setiap individu dalam organisasi untuk melaksanakan tugasnya secara baik dalam suatu proses yang disepakati.

5. Pendekatan Sistem pada Manajemen (*System Approach To Management*)

Mengetahui, memahami dan mengelola proses yang saling terkait sebagai sistem memberi sumbangan pada keefektifan dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk itu dalam pelaksanaannya sistem yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan secara konsisten

6. Perbaikan Berlanjut (*Continual Improvement*)

Sebuah organisasi yang baik akan memperhatikan suatu perbaikan yang berlanjut, artinya bahwa organisasi secara menyeluruh hendaknya menjadikan perbaikan sebagai tujuan tetap bagi organisasi. Kekurangan atau kesalahan dalam melaksanakan suatu kegiatan bagi suatu organisasi adalah merupakan hal yang wajar, namun bagaimana organisasi dapat secara terus menerus memperbaikinya sehingga tidak ada sebuah kesalahan atau kekurangan yang sama terjadi berulang-ulang.

7. Pendekatan Fakta dalam Pengambilan Keputusan (*Factual Approach To Decision Making*)

Keputusan yang diambil oleh sebuah organisasi tidak dapat dilakukan tanpa suatu analisis yang memadai. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya untuk secara terus menerus melakukan pencatatan atau perekaman terhadap segala sesuatu yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka memenuhi tuntutan pelanggan. Dengan demikian maka suatu keputusan yang efektif akan dapat diambil didasarkan pada analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui rekaman sebelumnya.

8. Hubungan Pemasok Yang Saling Menguntungkan (*Mutually Beneficial Supplier Relationship*)

Sebuah organisasi dan pemasoknya saling bergantung satu sama lain. Saling ketergantungan ini didasarkan pada adanya kepentingan yang saling ketergantungan pula. Hubungan keduanya diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kemampuan keduanya dalam menciptakan nilai masing-masing. Nilai dimaksud seperti adanya saling dipercaya, saling menepati janji, saling menampilkan kejujuran, dan saling menghormati satu sama lain (Hawignyo dan Budi, 2004: 26-27).

G. Pendekatan Proses Dalam ISO 9001: 2000

Pendekatan proses yang dilakukan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 ditekankan pada:

- 1) Proses adalah suatu aktivitas dengan menggunakan sumberdaya untuk mengubah input menjadi output.
- 2) Pemahaman dan pemenuhan persyaratan.
- 3) Pertimbangan akan nilai tambah yang diberikan oleh suatu proses.
- 4) Perolehan hasil atas kinerja proses dan keefektifannya.
- 5) Perbaikan berlanjut dari proses yang mengacu pada pengukuran yang obyektif.
- 6) Pihak berkepentingan (*interested parties*) memainkan peran penting dalam menetapkan persyaratan sebagai masukan pada organisasi.
- 7) Pemantauan kepuasan pihak berkepentingan menghendaki penilaian informasi yang berkaitan dengan persepsi pihak berkepentingan tentang sejauhmana kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi (Hawignyo dan Budi, 2004: 31-32).

H. Proses di Organisasi

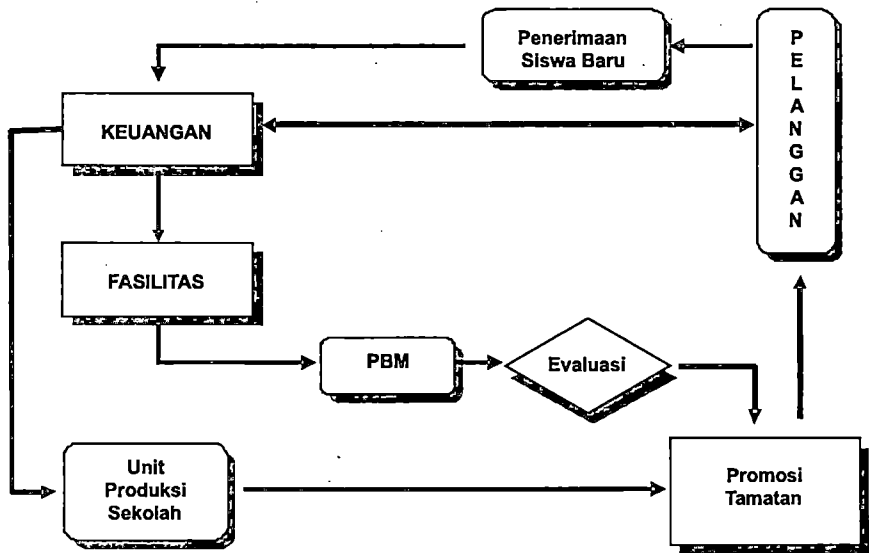
Proses di dalam organisasi adalah suatu aktivitas dan interaksi dari banyak proses. Proses-proses tersebut dapat dibagi dalam tiga (3) jenis berdasarkan cakupannya, yaitu: (1) Proses Utama, (2) Proses Lintas Departemen/

Fungsi dan (3) Proses Internal. Rincian ketiga proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Utama

- 1) Proses yang menggambarkan urutan secara umum bagaimana suatu organisasi memenuhi persyaratan pelanggan.
- 2) Proses tersebut dimulai dari sejak penerimaan order sampai produk diterima oleh pelanggan.

Contoh: Proses Utama di Sekolah



(Diadopsi dari Hawignyo dan Budi, 2004: 33)

2. Proses Lintas Departemen/Fungsi

- 1) Proses yang menggambarkan interaksi antar departemen/instalasi/jurusan/fungsi.
- 2) Proses ini dapat melibatkan 2 departemen/fungsi atau lebih dalam rangka menghasilkan output.
- 3) Dapat menggambarkan proses yang tidak dicakup pada proses utama.

3. Proses Internal

- 1) Menggambarkan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih personel serta interaksinya dalam satu departemen/fungsi.
- 2) Proses dan atau interaksi yang terjadi antar satu proses internal dengan proses internal lainnya sangat menentukan kinerja departemen/fungsi tersebut.
- 3) Personel dalam departemen/fungsi dapat menetapkan "Cycle time" untuk setiap proses (Hawignyo dan Budi, 2004: 33-34).

I. Perencanaan Penerapan Prinsip ISO di Lembaga Pendidikan

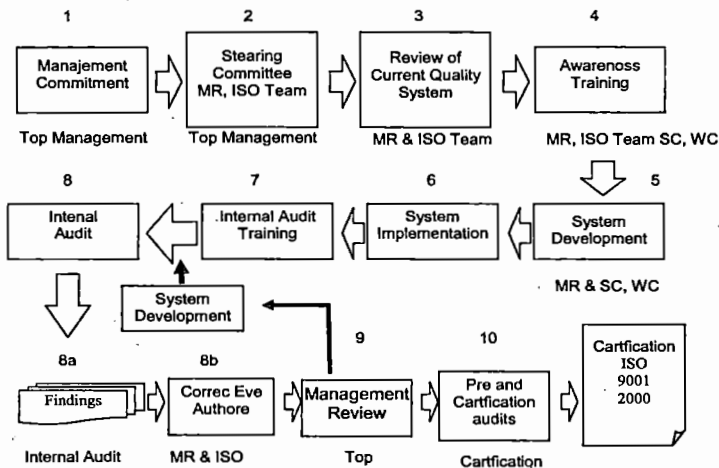
Tahapan selanjutnya setelah memahami fungsi dan manfaat penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000, adalah berlanjut ke tahap perencanaan untuk melakukan adopsi dan penerapan pada sistem manajemen di lembaga pendidikan.

Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan proses penerapan tersebut ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan yaitu:

1. Langkah 10 Tahap Implementasi Prinsip SMM ISO 9001: 2000

Tahapan Penerapan SMM ISO 9001: 2000 sebagai berikut:

Kesepuluh langkah tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
10 Step of Obtaining the QMS Certification



(Diadopsi dari Hawignyo dan Budi, 2004: 35)

1) Komitmen Manajemen (Kepala Sekolah, Wakasek, Ketua/ Pembina Unit Sekolah).

Komitmen dimaksudkan untuk menyepakati bahwa sekolah akan melakukan perubahan terhadap manajemen yang biasa dilakukan menjadi manajemen yang menggunakan pendekatan ISO. Dilakukan dalam suatu rapat yang melibatkan seluruh warga sekolah yang disebut dengan rapat tinjauan manajemen.

2) Penetapan Tim Pengembang yaitu Wakil Manajemen Mutu dan Tim Kerja

Penetapan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dalam suatu rapat. Wakil manajemen mutu adalah orang yang mewakili sekolah sebagai koordinator dalam merancang dan mengendalikan jalannya manajemen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Selanjutnya Wakil Manajemen Mutu dan Tim Kerja melakukan pertemuan guna mempersiapkan penyusunan dokumen mutu.

3) Pemetaan Bisnis Proses Organisasi (proses kerja dari tupoksi organisasi sekolah)

Sebelum SOP dan IK dibuat, bisnis proses dibuat terlebih dahulu dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sekolah yang tertuang dalam SK pendirian sekolah (SK pendirian biasanya berisi tentang mandat yang diberikan pemerintah dan atau yayasan kepada pengelola sekolah). Biasanya bisnis proses dituangkan dalam bentuk *chart* yang mudah dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan.

4) Pelatihan Kesadaran Mutu/Pemahaman Mutu

Pelatihan terhadap seluruh warga sekolah agar mereka mendukung kebijakan penerapan pendekatan manajemen ISO.

5) Pengembangan Sistem dan Pelatihan Penyusunan Dokumentasi Mutu.

Pengembangan dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada warga sekolah dalam menyusun dokumen mutu. Dokumen mutu dimaksud adalah visi, misi sekolah (dapat menggunakan yang telah ada dalam renstra sekolah), sasaran mutu sekolah, standar operasional (SOP), instruksi kerja (IK), dan formulir/blanko-blanko yang diperlukan dalam mencapai sasaran mutu. Sedangkan diklat dimaksudkan untuk memasyarakatkan SOP dan IK kepada seluruh warga sekolah, sehingga mereka dapat langsung terlibat dalam penyusunan dokumen mutu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

6) Implementasi Sistem dan dokumentasi Mutu

Implementasi sistem akan lebih monumental apabila dilakukan dengan satu momen tertentu misalnya awal tahun ajaran atau awal semester sehingga penerapan prosedur ataupun instruksi kerjanya dilaksanakan sejak awal suatu kegiatan. Jika suatu SOP atau IK tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan masalah maka perlu dilakukan pencatatan, sehingga pada saatnya dapat dilakukan revisi. Revisi dapat dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh warga sekolah terkait agar hasil revisi langsung segera diketahui oleh seluruh warga.

7) Pelatihan Internal Audit

Pelatihan internal audit dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga audit di dalam diri sekolah. Materi yang disajikan dalam pelatihan adalah menyangkut dokumen mutu, prosedur teknik wawancara dan pelaporan hasil audit.

8) Internal Audit

Audit adalah satu kegiatan untuk melihat sejauh mana keterlaksanaan suatu prosedur maupun instruksi kerja dalam suatu kegiatan yang telah dibuat SOP atau IK-nya, apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Audit dilakukan dengan melakukan wawancara

terhadap personil yang bertanggungjawab atas pekerjaan dan melihat bukti-bukti rekaman yang seharusnya ada menurut SOP dan IK-nya. Audit internal dilakukan melalui:

- a. Temuan-temuan hasil audit. Temuan-temuan hasil audit ditulis dalam suatu format audit kemudian disampaikan kepada *auditee* (orang yang diaudit) untuk menyamakan persepsi tentang temuannya.
- b. Tindakan perbaikan hasil audit internal. Selanjutnya *auditee* membuat tanggapan/kesanggupan dalam waktu tertentu untuk memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang dibuatnya.

9) **Tinjauan Manajemen** adalah suatu pertemuan antara WMM, Tim Pengembangan, dan unsur-unsur terkait di sekolah.

Pertemuan akan membicarakan mengenai hasil audit internal dengan berbagai temuan yang ada dan menyepakati tentang rencana perbaikan atau penyempurnaan SOP dan IK.

10) **Pre Audit dan Audit Sertifikasi oleh Badan Sertifikasi.**

Kegiatan ini hanya dilakukan bagi sekolah yang akan melakukan sertifikasi ISO, sedangkan untuk sekolah yang hanya akan melaksanakan prinsip-prinsip ISO tidak perlu dilakukan. Audit dilakukan oleh satu organisasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit eksternal seperti misalnya KEMA, TUV dsb.

2. Penjabaran 10 Langkah Menjadi Aktivitas dan Program

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Menyepakati rencana penerapan Manajemen ISO, Penetapan WMM dan Tim Kerja ISO		
2	Pelatihan Kesadaran Mutu bagi Warga sekolah		
3	Penetapan Visi dan Misi sekolah		
4	Membuat Kebijakan Mutu oleh Manajemen (Ka. Sek, Wakasek, Ketua Unit Sekolah)		
5	Penyusunan sasaran mutu yang dikehendaki		
6	Sosialisasi Kebijakan mutu kepada warga sekolah		

7	Review Struktur Organisasi, diadakan perbuahan jika perlu		
8	Penetapan Struktur Organisasi sesuai SMM ISO		
9	Penyusunan Tugas, Tanggungjawab dan wewenang seluruh personel sekolah		
10	Pemetaan Bisnis Proses Pendidikan di sekolah		
11	Pelatihan Penyusunan Dokuman		
12	Penyusunan Pedoman Mutu		
13	Penyusunan Prosedur Mutu		
14	Penyusun Instruksi Kerja		
15	Penyusunan Form/ Formulir Mutu		
16	Review dokumen mutu		
17	Penetapan Penerapan Prinsip SMM ISO		
18	Implementasi prinsip SMM ISO		
19	Pelatihan Internal Audit		
20	Internal Audit		
21	Tindakan Perbaikan (jika ada ketidak sesuaian produk)		
22	Tinjauan Manajemen (Rapat manajemen untuk evaluasi)		

3. Penyusunan Interaksi Proses Diklat di Sekolah dengan Prinsip ISO

No.	Aktivitas Sekolah	Diskripsi	Penanggung Jawab
1	Penyusunan program sekolah dengan Komite Sekolah		
2	Promosi Sekolah		
3	Penerimaan Siswa baru		
4	Pengembangan kurikulum		
5	Proses Pembelajaran di sekolah		
6	Proses pembelajaran di industri/lembaga magang (PPL)		
7	Ujian Akhir Sekolah		
8	Uji Kompetensi/Sertifikasi		
9	Ujian Akhir Nasional		
10	Pengelolaan Fasilitas		

11	Pengelolaan Perpustakaan		
12	Pengelolaan Unit Produksi		
13	Pengelolaan UKS		
14	Organisasi Kesiswaan		
15	Koperasi Sekolah		
16	Pelatihan SDM Sekolah		
17	Bimbingan Karir/ Bimbingan & Penyuluhan		
18	Penyusunan Bahan Ajar		
19	Kegiatan ekstra kurikuler		
20	Pengadaan guru tamu		
21	Kerjasama antar Lembaga		
22	Pemasaran tamatan		
23	Penelusuran tamatan		

J. Penutup

UU Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 3 mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Salah satu upaya untuk menuju satuan pendidikan bertaraf nasional dan bertaraf internasional maka perlu diterapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000. Pada tahun terakhir ini sudah ada beberapa lembaga pendidikan negeri yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ISO dalam sistem manajemen persekolahan, antara lain: SMKN 1 Surabaya untuk tingkat SLTA dan VEDC Arjosari Malang untuk tingkat perguruan tinggi.

Dalam waktu dekat kita berharap dan berupaya agar semakin bertambah lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang mampu untuk mengimplementasikan ISO 9001: 2000 termasuk lembaga pendidikan Islam dan lebih khusus lagi di berbagai jurusan dan program studi di lingkungan UIN Malang. Keberadaan Unit KJM (Kantor Jaminan Mutu) sejak 2004 di lingkungan UIN Malang misalnya, yang berperan sebagai lembaga audit internal kampus merupakan langkah awal untuk merintis penerapan ISO 9001: 2000 di UIN Malang sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan cita-cita besar menjadi PTAIN bertaraf internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- ISO/TC 176/SC 2/N 434, ISO 9001: 2000 *Quality Management System Requirement*, ISO, Switzerland, 2000.
- Gaspersz, Vincent, *ISO 9001: 2000 and Continual Quality Improvement*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Koesalamwardi, H., *ISO 9001: 2000*, Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia, Jakarta: PE, Januari 2001.
- Hawignyo, Agung Budi Susanto, Menerapkan Prinsip ISO, dalam *Buku Pintar Asistensi SMK Berstandar Nasional/Internasional*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2004
- Mukhtar, *Inovasi Sekolah Dalam Perspektif Era Global: Harapan dan Tantangan*, *Media Akademika*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 19, No. 4, Oktober 2004, Pusat Penelitian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

KONSEP KEPERIBADIAN GURU: PERSPEKTIF HISTORIS

Isti'annah Abubakar

Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Abstract

Teaching is perceived as a very heavy duty, but for other, teaching is the art and full charity. Teacher is really person who teach pupil to rich the best life. But, in turn, public does not care to the teaching profession. New generation are seemingly are not interested to enter the profession. Improprosperity of teacher's life is the main factors of public's undesirable to the teaching profession, this is the problem. Based on the phenomena or reality, there are many ways produced to solve the problem. One of them is Public Regulation of Teaching Profession (UU No. 14 Th.2005 Tentang Guru Dan Dosen). We realize that regulation is not the mere solution. We recommend that teacher's personality and performance have to improve to the ideal one and it is the important way to solve.

Keywords: teacher, personality, profession

A. Pendahuluan

Guru merupakan profesi yang mengalami pasang surut dalam percaturan dunia keprofesian. Kalaulah dulu guru dianggap sebagai profesi sakral, membanggakan yang terlihat ketika dengan bangganya seseorang yang bermantukan seorang guru, tapi saat ini guru disinyalir menjadi profesi yang termarginalkan. Ini terlihat dari banyaknya generasi penerus yang sedikit bercita-citakan sebagai guru. Mereka cenderung menjadikan dokter, insinyur, pilot, sebagai pilihan profesi di masa depan. Ada berbagai macam alasan yang dikemukakan akibat ketidakmauan mereka, namun yang jelas segii kesejahteraan lah yang menempati urutan pertama bagi seseorang untuk tidak memilih guru sebagai profesinya.

Fenomena di atas disebabkan adanya pergeseran dalam memaknai profesi seorang guru. Pergeseran ini disebabkan beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal di antaranya:

1. Adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru asal dia berpengetahuan.
2. Kekurangan guru di daerah terpencil memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai keahlian (mendidik) untuk menjadi guru.
3. Banyak guru yang belum menghargai profesinya apalagi berusaha mengembangkan profesinya tersebut. Perasaan rendah diri karena menjadi guru, penyalahgunaan profesi untuk kepuasan dan kepentingan pribadi.

Sedangkan faktor internal yang dimaksud adalah adanya kelemahan yang terdapat pada diri guru itu sendiri di antaranya rendahnya kompetensi profesional mereka

Kesemuanya itu sudah menjadi wacana umum yang terus dicari pemecahannya, terutama di akhir tahun 2005 dengan akan disahkannya UU profesi guru dan dosen. Namun demikian perlu disadari bersama, bahwa UU tersebut bukan satu-satunya solusi yang dapat mendongkrak popularitas profesi guru. Naiknya popularitas guru hanya akan terjadi bila guru secara pro aktif meningkatkan kapasiitasnya sebagai guru. Artinya, UU tersebut tidak akan berdaya guna secara maksimal bila guru sendiri kurang *greget* dalam meningkatkan kualitas dia sebagai seorang guru.

Akankah hal semacam ini berlangsung di masa datang inilah yang hendak dibahas untuk kemudian mendapatkan kejelasan dan *pemappingan* atas apa yang terjadi dalam profesi keguruan.

B. Pembahasan

Kepribadian guru mempunyai kelebihan sendiri bila diterapkan dalam kelas karena ia akan memberikan kecenderungan dan kesenangan yang berbeda kepada murid. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kepribadian guru sulit ditemukan kadarnya dan tidak mudah untuk dicari batasannya serta sulit pula untuk didefinisikan secara *jamik* dan *manik*. Kepribadian juga diibaratkan seperti magnet, listrik dan radio yang tidak bisa diketahui kecuali setelah kita tahu bekasnya atau pengaruhnya.

Kepribadian ialah kumpulan sifat-sifat yang *aqliyah*, *jismiah*, *khalqiyah* yang dan *iradiyah* yang biasa membedakan seseorang dengan orang lain (Slamet Yusuf:37).

Dikatakan guru yang mahir adalah guru yang mampu untuk menundukkan hati mereka dan mempengaruhi mereka dengan baik sehingga ia dapat memerintah mereka dan berbicara dengan mereka. Maka dengan kepribadian itu memungkinkan untuk mengarahkan mereka pada jalan yang lurus.

Umar bin Utbah (dalam Slamet Yusuf :39), berkata pada guru dari anaknya sbb: "Hendaklah perbaiki pertama-pertama yang engkau lakukan terhadap anak saya dilakukan dengan perbaiki dirimu maka mereka akan tertuju padamu, yang mereka anggap baik adalah apa yang engkau tinggalkan. Menurut Mr. Norman Mc. Munn (Slamet Yusuf:41), kepribadian itu didapat dari latihan yakni dari kebiasaan dan pendidikan yang sungguh-sungguh. Tokoh pendidikan dari Inggris, *Sir T.Percy Nunn* mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mendidik kepribadian (Andreas Hafera, 2000).

Kepribadian itu bisa membangkitkan semangat, tekun dalam menjalankan tugas senang memberi manfaat kepada murid menghormati peraturan sekolah sehingga membuat murid bersifat lemah lembut memberanikan mereka, mendorong pada cinta pekerjaan, memajukan berfikir secara bebas tetapi terbatas yang bisa membantu membentuk pribadi menguatkan kepribadian menguatkan kehendak membiasakan percaya pada diri sendiri.

Suksesnya seorang guru tergantung pada kepribadian, luasnya ilmu pengetahuan tentang materi pelajaran serta banyaknya pengalaman. Tugas seorang guru itu sangat berat, tidak mampu dilaksanakan kecuali apabila kuat kepribadiannya, cinta dengan tugas, ikhlas dalam mengerjakan memelihara waktu murid, cinta kebenaran, adil dalam pergaulan. Ada yang mengatakan bahwa masa depan anak-anak di tangan guru dan di tangan gurulah terbentuknya umat.

Ditulis Athiyah Al-Abrosy (dalam Slamet Yusuf: 42) bahwasannya sifat-sifat yang seyogyanya dimiliki seorang guru:

1. Guru harus menjadi bapak sebelum ia menjadi pengajar.

2. Hubungan guru dengan murid harus baik.
3. Guru harus selalu memperhatikan murid serta pelajaran mereka.
4. Guru harus peka terhadap lingkungan sekitar murid.
5. Guru wajib menjadi contoh/teladan di dalam keadilan dan keindahan serta kemuliaan.
6. Guru wajib ikhlas di dalam pekerjaannya.
7. Guru wajib menghubungkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan
8. Guru wajib selalu membaca dan mengadakan penyelidikan
9. Guru harus mampu dalam mengajar bagus penyiapannya dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya
10. Guru harus sarat dengan ide sekolah yang modern
11. Guru harus punya niat yang tetap
12. Guru harus sehat jasmaninya
13. Guru harus punya pribadi yang mantap

1. Guru ditempatkan pada tempat yang mulia sesuai dengan hadits Nabi

Pada suatu hari, Rasulullah keluar rumah kemudian beliau melihat ada 2 majlis. Majlis yang satu terdiri dari orang yang berdoa kepada Allah dan mengharap kepadaNya. Majlis kedua terdiri dari jamaah yang mengajarkan agama kepada manusia. Beliau bersabda Adapun yang itu (yang pertama) mereka memohon kepada Allah jika Dia berekanaan mereka akan diberi dan Dia juga berkenan untuk tidak memberi. Dan yang itu (kedua) mereka mengajari manusia, dan bahwasannya aku diutus adalah hanya untuk mengajar. Kemudian beliau maju dan ikut duduk pada kelompok ke-2. Dengan demikian Nabi yang mulia telah membuat sebaik-baik contoh buat kita agar menjadi pengajar dan pendorong dalam mengajar serta mengakui keutamaannya.

Demikian juga seperti yang dikatakan Martin Luther: "Jika aku mempunyai waktu untuk menenggalkan tugas memberi nasehat dan memberi petunjuk pasti aku akan memilih profesi sebagai pengajar.

Ucapan Bismark: "Sungguh kami telah dipengaruhi oleh guru." Senada dengan itu Iramus dalam ucapannya: "Berilah aku kantor untuk guru dan aku berjanji kepadamu dengan hati seorang berilmu. Sedangkan Syauiq Bik: "Berdiri dan hormatilah guru dan berilah ia penghormatan." Hampir-hampir saja seorang guru itu merupakan utusan.

"Hai Ben Sherira, curahkanlah segenap tenagamu untuk mengajar anak-anakmu sewaktu masih kecil dan berikanlah hadiah kepada guru atas jasanya karena apa yang kamu berikan adalah diberikan untuk anak-anakmu," Ungkap Ustadz Al Alim Al Muhiqq Ahmad Amin.

Mengajar adalah pekerjaan yang memayahkan, tidak mendatangkan harta dan tidak memperoleh pangkat. Mengajar itu hanya pantas dan bagus bagi orang yang *qana'ah* terhadap masalah dunia dengan hidup sederhana dan dalam pembagian rizki yang sangat sempit. Guru yang *fasid* adalah guru yang menjadikan harta dan pangkat sebagai tujuan utama dan mengharapkan keduniaan. Mengajar adalah pekerjaan jiwa. Guru itu menciptakan dirinya dan amalnya ke langit, keluarganya adalah yang menariknya ke bumi dengan kekerasan.

Apakah dia rela berkorban seperti berkorbannya tentara? apakah dia siap menerima kenyataan untuk bertapa seperti pendeta apakah dia siap berhibur dengan harta ma'nawi untuk meninggalkan yang materi dan membentuk dirinya sebagai orang berilmu yang *qanaah* serta menempatkan kelezatan-kelezatan akal dan rohani pada kelezatan badan?"

Seorang penulis Inggris (dalam Slamet Yusuf :32) mengatakan: "kurikulum, peraturan sekolah, bangunan-bangunan yang besar dan peralatan dalam pendidikan dan pengajaran tidaklah lebih penting dari guru karena guru mempunyai pengaruh besar di hadapan siswa dari sebab ilmunya, etikanya, perbuatannya dan ketrampilannya.

Fesyar pernah menyerukan tahun 1917 (dalam Slamet Yusuf :35) bahwa guru hendaknya sudah tidak merasa kesulitan lagi dalam masalah keuangan atau kebutuhan hidupnya karena tugas pokok mereka adalah mengelola pendidikan bagi guru yang sudah kawin hendaknya mempunyai kondisi sosial ekonomi yang sudah mapan sehingga mampu mendidik keluarganya dengan baik. Seorang guru yang susah, begitu juga

seorang guru yang miskin akan mendapat kesan kurang baik di tengah-tengah masyarakat

Tugas guru dapat disimpulkan mempunyai 3 tugas pokok, yaitu : (1) Tugas dalam bidang profesi yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Tugas guru dalam hal ini dituntut untuk selalu mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan IPTEK, (2) tugas dalam bidang kemanusiaan, memposisikan dirinya sebagai orang tua kedua (Usman,2002:7) (3) tugas dalam bidang kemasyarakatan dalam hal ini pembelajarn seperti dikutip Usman dari *Adfams dan Decey dalam Basic Principles of Student* meliputi: (a) guru sebagai demonstrator, (b) sebagai pengelola kelas, (c) sebagai mediator dan fasilitator, (d) sebagai evaluator. Sedangkan menurut Djamarah (2000,44) meliputi: (a) sebagai inspirator, (b) sebagi informator, (c) sebagai organisator, (d) sebagai motivator, (d) sebagai inisiator, (e) sebagai pembimbing, (f) sebagai uswah (teladan atau model), (g) seabagai penasehat.

2. Kompetensi : Kepribadian

Kompetensi secara bahasa diartikan kemampuan atau kecakapan. Hal ini diilhami dari KKBI dimana kompetensi diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Sedangkan menurut Partanto (1994), dalam Kamus Ilmiah Populer, kompetensi diartikan sebagai kecakapan, wewenang, kekuasaan dan kemampuan. Sedangkan secara terminologis, sebagai berikut:

1. Menurut Broke and Stone, gambaran hakekat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti.
2. McLeod dalam Usman (2001), keadaan berwenang atau memenuhi syarat menuntut ketentuan hukum.
3. Jhonson, perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang diprasyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
4. Pengertian lain diartikan sebagai kemampuan dasar yang mengaplikasikan apa yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya.

5. Menunjuk pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Hitami dan Sahrodi (2004), pemilikan nilai, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
7. McAshan dalam Mulyasa (2003:38) sebagai pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
8. Finch dan Crunkilton (1979:222) merupakan penguasaan terhadap suatu tugas, ketampilan sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.
9. Kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

Aspek kompetensi menurut Gordon dalam Mulyasa (2003:39),

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Kemampuan
4. Nilai
5. Sikap
6. Minat

Jenis kompetensi, meliputi di antaranya: (a) Kompetensi personal, (b) kompetensi profesional, (c) kompetensi sosial meliputi (a) trampil berkomunikasi dengan orang lain, (b) bersikap simpatik terhadap siswa dan masyarakat, (c) dapat bekerjasama dengan orang lain, (d) pandai bergaul.

Kompetensi personal, yaitu sikap pribadi guru yang dijiwai oleh agama dan filsafat pancasila yang akan mengagungkan moral dan budaya. Dan ini mencakup kemampuan dan integritas pribadi, peka terhadap perubahan dan pembaharuan, berpikir alternatif, adil, jujur, obyektif, disiplin, ulet, tekun, simpatik, menarik, luwes, terbuka, kreatif dan berwibawa Kompetensi personal bisa diidentikkan dengan kepribadian dan

kepribadian yang baik akan berpengaruh terhadap hidup dan kebiasaan belajar para siswa. Untuk memiliki kepribadian yang baik ini guru dituntut memiliki kematangan dan kedewasaan pribadi serta jasmani dan rohani, dan cirinya adalah sbb: (1) memiliki pedoman hidup, (2) mampu melihat segala sesuatu secara obyektif, (3) mampu bertanggung jawab

Ciri guru yang profesional dikutip dalam Jurnal *Educationl Leadership* (1998): (1) mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2) menguasai secara mendalam bahan pelajaran yang diajarkannya serta metode pembelajaran yang relevan, (3) bertanggung jawab dalam memantau hasil belajar melalui berbagai cara evaluasi, (4) mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pegalamnanya, (5) guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya

Yang mempengaruhi rendahnya profesionalisme guru, menurut Akadum (1999) (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total, (2) rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma etika profesi keguruan, (3) pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati, dll.

Jihad oleh Muhaimin (2003:230-231) diartikan sebagai makna kesediaan bekerja keras dengan mencurahkan segala kemampuan, baik fisik/materi maupun totalitas dirinya menuju jalan Allah, mempunyai sikap ketelitian dan kecermatan, serta terbuka terhadap kritik dari luar, mempunyai kebanggaan terhadap pekerjaan yang bermutu (bukan asal kerja) dan mempunyai wawasan jangka panjang (harapan masa depan)

Mengenai keajahteraan guru menurut Komball Wiles (dalam Bafadal, 2003:101-102), ada 8 hal yang diinginkan guru melalui kerjanya (1) adanya rasa aman dan hidup layak, (2) kondisi kerja yang menyenangkan, (3) rasa diikutsertakan, (4) perlakuan yang wajar dan jujur, (5) rasa mampu, (5) pengakuan dan penghargaan atas sumbangan, (7) ikut ambil bagian dalam pembuatan kebijakan sekolah, (8) kesempatan mengembangkan *self respect*.

Pembahasan diatas semakin mempertajam adanya keterkaitan yang kuat antara kompetensi dan kepribadian guru. Keduanya—secara

bersamaan- mencoba untuk merealisasikan profil guru ideal dari berbagai sudut pandang baik personal, soial dan akademik.

3. Kepribadian Guru dalam Perspektif Historis

a. Profil Guru di masa dulu

Secara singkat telah dijelaskan di atas bahwa profesi guru di masa dulu merupakan profesi idaman, dimana semua orang ingin menjadi guru, kalau toh tidak berhasil sekedar bermantukan guru saja pun sudah bangga.

Kebanggaan yang mendarah daging dimasa lalu ini merupakan sesuatu yang manarik untuk dikaji, ada apa dengan guru sehingga menjadi profesi yang sangat diminati? Padahal kalo dilihat secara kasad mata, dari segi kesejahteraan sangat jauh dari kurang, namun demikian mereka selalu mendapatkan tempat tertinggi dalam tatanan masyarakat pada waktu. Guru benar-benar diposisikan dan dihargai.

Bila bukan dari aspek kesejahteraan, pastilah ada aspek yang sangat fenomenal dalam profesi guru itu sendiri. Sosok, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang mewakili profil guru di masa lalu. Artinya, bila ingin mengetahui secara detail tentang profil guru masa lalu maka amatilah bagaimana kepribadian beliau. Sosok guru sebagai **pahlawan tanpa tanda jasa** benar-benar dapat diamati, tak ada batasan waktu, tempat dalam mengajarkan ilmu dan yang paling penting mereka betul-betul the *ideal model*. Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan sejalan yang secara tidak langsung menimbulkan *kewibawaan sejati* dalam diri beliau.

Kepribadian semacam inilah yang kemudian menjadikan murid-murid beliau termotivasi untuk menjadi guru sekaliber Ki Hajar Dewantara. Ini sesuai dengan *statement* yang mengatakan bahwa pribadi guru itu besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan darma baktinya dan guna berpengaruh pada muridnya.

Namun demikian harus juga dipahami bahwa bukan hanya kepribadian saja yang menentukan keberhasilan tugasnya sebagai guru tetapi harus pula dilengkapi dengan ilmu khusus, kebudayaan tertentu dan persiapan pelayanan yang teratur.

Artinya bisa dikatakan profil guru di masa lalu adalah profil guru ideal, dimana mereka mumpuni dan matang dalam aspek kepribadian, keilmuan dan perilaku yang semua itu kemudian dilengkapi dengan semangat pengabdian atau menurut Muhaimin identik dengan semangat jihad. Jihad oleh diartikan sebagai makna kesediaan bekerja keras (denganmencurahkan segala kemampuan, baik fisik/ materi maupun totalitas dirinya) menuju jalan Allah, mempunyai sikap ketelitian dan kecermatan, serta terbuka terhadap kritik dari luar, mempunyai kebanggaan terhadap pekerjaan yang bermutu (bukan asal kerja) dan mempunyai wawasan jangka panjang (harapan masa depan).

Secara lebih dalam, profil guru masa lalu bisa diamati dalam sajak berikut ini:

Siapa Guru Bangsa Ini?

Anda dan saya!

Yang berarti kita. Semua tak terkecuali

Termasuk pak Lurah adalah guru bangsa ini ketika

Dengan senyum membuatkan KTP bagi si Bejo

Tanpa rasa pamrih. Juga Pak darmo yang sopir bus

Adalah guru bangsa ini ketika mempersilahkan

Kendaraan lain yang mau menyalip untuk mendahului.

Demikian pula Pak Budi yang pengusaha adalah guru bangsa ini

Ketika membuang limbah tanpa merusak lingkungan.

Tak terkecuali Pak Edi, pejabat yang senantiasa

Lebih dulu memberi salam selamat pagi kepada

Bawahannya, dia adalah guru bangsa ini.

Atau si Udin, adalah guru bangsa ini ketika membuat sumur
Tidak pernah menipu soal kedalaman sumurnya.
Mereka semua adalah guru bagi bangsanya.
Termasuk Anda dan Saya.
Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membimbing
Negeri ini agar lebih baik dan lebih maju.
Perlukah kita mendatangkan guru-guru dari negara-negara lain?
Relakah kita bila kita digurui oleh bangsa-bangsa lain?
Atau maukah kita terus-terusan menjadi murid bagi bangsa ini?
Kita semua wajib menjadi guru bagi kemajuan bangsa ini. (Dikutip
dari Tilaar, 1999: 333)

b. Profil Guru Masa Kini dan Akan Datang

Kemerosotan profesi guru baik di dalam minat pemuda kita untuk memasukinya maupun oleh masyarakat yang kurang memberi perhatian atau penghargaan terhadap profesi guru menunjukkan adanya keharusan untuk mencari paradigma baru supaya profesi guru memenuhi tuntutan masyarakat baru dalam milenium ketiga. Perlu disadar bahwa fungsi dan peranan guru bisa berubah tapi profesi guru akan selalu tetap dibutuhkan.

Sebelum menganalisis tentang profil atau kepribadian guru masa kini dan akan datang maka perlu diketahui karakteristik masyarakat yang dihadapi yang notabene merupakan konsumen atau pengguna jasa pendidikan. Menurut Tilaar (1999: 281), ada 3 karakteristik masyarakat masa kini dan akan datang (= masyarakat milenium 21), yaitu:

- 1) Masyarakat Teknologi, dimana kemajuan teknologi sangat berkembang pesat sehingga membuat dunia menjadi satu, sekat-sekat yang membatasi bangsa-bangsa, pribadi-pribadi menjadi hilang sehingga bentuk-bentuk komunikasi umat manusia akan berubah.

- 2) Masyarakat terbuka, pada jenis ini dibutuhkan manusia yang mampu mengembangkan kemampuan dan yang mampu berkerasi untuk peningkatan mutu kehidupannya serta sekaligus mutu kehidupan bangsa dan masyarakatnya
- 3) Masyarakat madani, yaitu masyarakat yang saling menghargai satu dengan yang lain, yang mengakui akan hak-hak asasi manusia yang menghormati akan prestasi dari para anggotanya sesuai dengan kemampuan yang dapat ditunjukkannya bagi masyarakat.

c. Deskripsi Profil Guru Masa Kini

Untuk memahami posisi guru masa kini, dapat dipahami dari sajak-sajak berikut:

Sejuta batu nisan
Guru tua yang terlupakan sejarah
Terbaca torehan darah kering
Disini berbaring seorang guru
semampu membaca buku usang
Sambil belajar menahan lapar (Kompas, 26 Desember 2006).

Dari puisi diatas dapat dipahami ada 3 pesan global yang disampaikan Winarno, yaitu:

- 1) Adanya kecenderungan profesi guru terlupakan. Senada dengan ini, Tilaar juga mengatakan bahwa profesi guru diambang kematian karena bukan saja tidak diminati oleh putra bangsa yang terbaik juga karena masyarakat sendiri tidak memberikan penghargaan yang wajar terhadap profesi guru. (Tilaar, 1999:285). Padahal untuk mengatasi itu semua diperlukan suatu penghargaan masyarakat, karena suatu profesi akan hidup dan berkembang apabila tersebut dihargai oleh masyarakat. Dan ini ditunjukkan dengan adanya keinginan masyarakat untuk memilih profesi sebagai suatu unggulan (Tilaar, 1999: 291).

- 2) Kemampuan finansial yang amat memprihatinkan. Tilaar dalam hal ini mengatakan bahwa imbalan ekonomis dalam sektor modern lebih besar daripada profesi yang tua seperti guru dan petani. (Tilaar, 1999:285).
- 3) Pentingnya mengembalikan guru sebagai profesi suci, mengingat banyak guru yang terjankiti perilaku instan dan praktis.

Setelah kita melihat profil profesi guru Indonesia dewasa ini tentunya tidak dapat kita harapkan masyarakat kita dapat dibawa untuk memasuki masyarakat abad 21 yang kompetitif. Masyarakat kompetitif yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi. Untuk itu profil guru yang dibutuhkan adalah:

- 1) Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang (*mature and developing personality*)
- 2) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, hal ini diilhami dari *surat Az Zumar ayat 9*, " katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Bahwasannya yang dapat mengambil pelajaran itu adalah orang yang mempunyai akal dan juga dalam *surat ash-Shaf ayat 2-3* " Hai orang-orang yang beriman mengapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian Allah karena kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat"
- 3) Keterampilan membangkitkan minat peserta didik
- 4) Pengembangan profesi yang berkesinambungan.

C. Analisis

Uraian di atas menjelaskan secara kongkrit bagaimana meningkatkan popularitas profesi guru dimasa kini dan akan datang. Bila diklasifikasikan, maka penjelasan di atas hanya berkuat atau ditekankan pada aspek , (1) performansi (penampilan luar) seorang guru, (2) akademik, dimana guru dituntut untuk selalu belajar dan meneliti, (3) kesejahteraan guru. Ketiga

hal di atas tidak *balance* sehingga yang terjadi protes akan rendahnya gaji yang diterima seorang guru sehingga harus *ngompreng* sana *ngompreng* sini.

Dari klasifikasi di atas, maka dapat langsung dikatakan bagaimana sebenarnya profil guru kita ini. Namun demikian, kesalahan tidak terletak pada guru sebagai *person*, tapi semua itu telah termasuk dalam sistem yang sangat kuat sehingga diperluka *kontinuitas* untuk memperbaikinya.

Dari beberapa pembahasan tentang profesi guru di atas, penekanan yang diperjuangkan hanyalah pada masalah materiall sehingga sangatlah wajar bila kemudian salah satu pengajar UIN Jakarta dalam Swara Cendikia mengatakan bahwa sistem pendidikan kita sudah termaterialisasikan, artinya semuanya harus ada pelicin. Dan ini berimbas pada guru, dimana kita jumpai sangat minimnya jiwa pengabdian yang ada dalam diri guru, apalagi yang berada di perkotaan.

Selain minimnya semangat pengabdian=*jihad*, minim pula sifat *qonaah* seorang guru sehingga terjadilah malapraktik pendidikan, baik dengan menjual nilai, *nggompreng* buku atau bahkan sampai jualan narkoba. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa guru kita miskin kreativitas atau kureang lincah dalam menangkap peluang yang ada.

Sehingga kita tidak menyalahkan jika ada *statement* bahwa pekerjaan guru itu berat untuk itu dibutuhkan komitmen tinggi untuk melakoninya. Artinya jika profesi guru sudah pilihan kita, maka pastilah sudah disadari sejak awal bagaimana *plus-minusnya* profesi guru. Jika ini disadari secara mendalam, maka tidak akan ada protes sampai turun ke jalan hanya sekedar untuk memperjuangkan hak, padahal bila ditanyakan ulang sudahkan seorang guru melakukan kewajiban, karena notabene hak bisa diambil bila sudah melaksanakan kewajiban, baik kewajiban mengajar atau mendidik. Ini juga pernah dilakukan Socrates, di mana ia menolak gaji (Hasan, 1988, 187).

Menyikapi hal ini, hendaklah kita melakukan apa yang dikatakan Maslow sebelum hidupnya berakhir dengan mengatakan, Ini senada dengan piramid Maslow yang telah dibalik, karena di akhir hidupnya Maslow mengatakan *Every one should self actualize as a firts priority then for themselves people will be valued by others, loved by others, feel secure and survive*. Bila

dianalogikan, maka setidaknya guru harus melakukan sesuatu terlebih dulu untuk dapat dihargai (mis; baik itu dengan mengajar dengan maksimal). Bila ini sudah dilakukan maka secara otomatis, masyarakat ataupun pemerintah tanpa diminta pun akan menaikkan kesejahteraan guru.

Masalah pergeseran kepribadian guru dari waktu ke waktu dapat diperjelas dalam tabel berikut ini:

NO	DULU	KINI, AKAN DATANG
1.	Tanpa pamrih	No pamrih no <i>service</i>
2.	Komitmen tinggi	Komitmen angin-anginan
3.	Istiqomah	Istiqomahnya tergantung
4.	Qonaah	Kurang qonaah

Keterangan:

Bila mau dikomparasikan maka ke-3 hal di atas adalah profil guru di masa dulu dengan guru dimasa kini dan akan datang. Dan bila dipahami lebih lanjut, perbedaan terletak pada ruh pendidikan itu sendiri. Artinya pendidikan yang notabene lapangan pengabdian, seorang guru menggunakan paradigma yang berbeda. Bila dahulu paradigma yang digunakan adalah amal jariyah *ansich*. Ini semua termotivasi dari hadits Nabi tentang 3 amalan kekal yang salah satunya adalah amal jariyah, serta hikmah Arab

(العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر)

Sedangkan paradigma guru masa kini dan akan datang (merupakan prediksi, artinya bisa terjadi dan tidak), berpatokan pada mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Karena rezeki yang dicari maka bila mendapatkan rezeki kecil akan kebingungan dan mencari obyek lain. Prots gaji dan demo-demo lain merupakan akiobat logis dari paradigman yang digunakan tersebut.

Selain itu bila seseorang telah memilih menjadi guru maka ia kan terjun total dalam bidang yang telah dipilihnya sehingga perilaku, ucapan dan tindakan selalu disesuaikan dengan profesi yang telah dipilihnya. Sedangkan saat ini statemen atau ibart guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari merupakan dampak kurang diaplikasikannya ruh guru oleh guru tersebut. Misalnya, berapa banyak guru melarang rokok muridnya namun ia sendiri merokok dan masih banyak lagi yang lainnya.

Untuk masa kini dan masa akan datang di mana keadaan dunia dan zaman sangat global, terjangkitnya paradigma materialis dan hedonisme maka yang paling membedakan antara guru dulu dengan sekarang dan mungkin masa yang akan datang adalah sifat *qanaah* yang dimiliki oleh seorang guru. Ada fenomena menarik dimana guru dulu tidak mau menerima gaji (Arabiah Baina Yadaik, h.103), dan keadaan ini merata. Memang kita masih menjumpai guru yang bersifat *qanaah* plus jiwa pengabdian yang tinggi namun itu hanya bisa dijumpai di daerah-daerah pedalaman dan hampir bisa dipastikan mereka menyadari komitmen sebagai seorang guru. Sedangkan di daerah kebanyakan, adalah sebaliknya.

D. Tawaran Solusi

Melihat fenomena kepribadian guru yang kian hari kian bergeser dan melemah, maka diperlukan usaha untuk dapat memperbaiki keadaan ini yang nantinya secara tidak langsung akan mendongkrak profesi guru itu sendiri. Diantara yang dapat kami tawarkan disini adalah:

1. Mempertebal Sifat *Qanaah*

Guru dimasa kini dan akan datang haruslah memahami betul agar dapat bersikap *qanaah*, bersikap menerima tapi bukan pasif. Keadaan yang bangsa yang sulit ini bukanlah harus ditangisi, tapi dijadikan tantangan untuk dapat mengeksplorasi kreativitas guru. Hal ini sudah terjadi di sektor kehidupan lainnya seperti ekonomi. Naiknya harga BBM malah menjadikan seseorang lebih kreatif untuk membuat kompor yang berbahan bakar rendah ekonomis. Guru sendiri juga bisa bila mau, misalnya bagaimana seorang guru bertindak seminim mungkin namun tetap

tujuan pembelajaran tercapai. Artinya mengajar jangan hanya dimaknai sebagai pekerjaan yang melelahkan, namun *enjoy*. Partisipasi guru dalam kegiatan penelitian (dalam hal ini penelitian tindakan kelas) seharusnya dijadikan salah satu cara untuk dapat meningkatkan ekonomi guru. Itupun kalau jeli melihat peluang seperti yang dilakukan oleh guru Bahasa Indonesia MTsN Malang I.

2. Mempertebal Komitmen

Ketika seseorang memilih profesi guru, maka saat itu juga harus disadari bahwa guru adalah pekerjaan mengabdikan bukan lahan bisnis. Bila ini disadari secara total maka akan tercipta sosok guru yang sangat *qanaah* berkomitmen tinggi. Untuk merealisasikan hal ini maka diperlukan seleksi yang ketat dalam penerimaan mahasiswa keguruan dan penyeleksian di saat akan mengabdikan ilmunya dalam lapangan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, Ibrahim 2003, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah dasar dalam kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hitami dan Sahrodi (2004), *Menuju Penguatan Pendidikan Islam : Orientasi Pendidikan Pada Kecakapan Hidup (Life Skill) Lektur Vol X No.1* Cirebon: STAIN Cirebon Press.
- Joni, Raka, 1984, *Wawasan Kependidikan Guru*, Jakarta Depdikbud.
- Langgulong, Hasan, 1998, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta.
- Partanto (1994), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya Arkola.
- Mulyasa, 2003, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, 2003, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2003, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi Dedi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusda.
- Tilaar, 1999, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, Tera Indonesia, Magelang.
- Usman, Uzer, 2002, *Menjadi Guru Profesional*, Edisi II Cet Ke 14 Bandung, PR remaja Rosdakarya.
- Winarno Surakhmad yang dimuat di *Kompas* Senin 26 Desember 2005, *Memahami Protes Guru Lewat Puisi*.
- Yusuf, Slamet, *Sifat-sifat yang seyogyanya dimiliki seorang guru*, Makalah.
- _____, *Misi guru dan bagaimana seharusnya menjadi guru*, Makalah.